



KABUPATEN BUOL  
SULAWESI TENGAH



**SPKD** TAHUN 2017-2022

**SPKD**

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)  
KABUPATEN BUOL SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017-2022



**SPKD**  
TAHUN 2017-2022

**STRATEGI  
PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH**



KABUPATEN BUOL  
SULAWESI TENGAH



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur selalu tercurahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Salah satu yang dapat meminimalisir tingkat kemiskinan di suatu daerah yaitu adanya strategi yang disusun dengan perencanaan yang baik. Dengan demikian kami dari BAPEDDA kabupaten Buol, menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) pemerintah kabupaten Buol serta melibatkan komponen masyarakat terkait. Keberadaan dokumen SPKD ini diharapkan menjadi tonggak dan momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buol bersama warga masyarakat dalam memantapkan tekad untuk menanggulangi persoalan kemiskinan secara lebih konseptual, konsisten, integrated dan berkelanjutan. ini mengandung makna sekaligus tantangan bahwa keberadaan dokumen SPKD ini harus dapat meningkatkan efektifitas kinerja pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol, sehingga SPKD tidak sekedar dokumen tanpa makna. Dokumen SPKD ini pada dasarnya melengkapi dan mengelaborasi secara lebih mendalam visi, misi, kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buol.

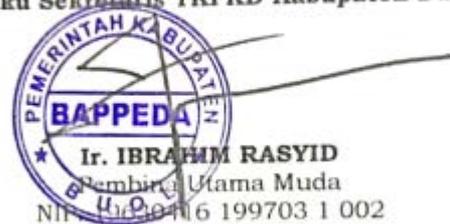
Penyusunan SPKD dengan melibatkan berbagai pihak diharapkan memperkuat komitmen semua pihak untuk ikut berperan serta secara aktif dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dokumen ini bukan hanya dokumen pemerintah, tetapi merupakan dokumen bersama. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini mengakui kemiskinan sebagai masalah multidimensi.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara martabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak hak dasar yang sama dengan anggota



masyarakat lainnya. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen SPKD ini tetap didasarkan atas pendekatan berbasis hak dan kewajiban.

Buol, Novemeber 2019  
**Kepala Bappeda Kabupaten Buol,  
Selaku Sekretaris TKPKD Kabupaten Buol**



**Ir. IBRAHIM RASYID**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1941061997031002



## DAFTAR ISI

	Hal.
SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Pentingnya SPKD Bagi Kabupaten Buol	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan SPKD	I-8
1.3. Tujuan dan Manfaat SPKD Bagi Daerah	I-11
1.4. Keluaran/Hasil	I-12
1.5. Sistematika	I-13
BAB II KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN BUOL	II-1
2.1. Kondisi Geografi	II-1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-6
2.1.2.1. Posisi Astronomis	II-6
2.1.2.2. Morfologi	II-6
2.1.2.3. Topografi	II-8
2.1.2.4. Hidrologi	II-9
2.1.2.5. Klimatologi	II-11
2.1.2.6. Penggunaan Lahan	II-12
2.2. Kependudukan	II-16
2.3. Identifikasi Indikator Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat	II-21
2.3.1. Kesehatan	II-21
2.3.2. Pendidikan	II-21
2.3.3. Ketenagakerjaan	II-22
2.3.4. Perumahan dan Lingkungan	II-24
2.3.5. Kemiskinan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol	II-31
2.3.5.1. Ketersediaan Pangan	II-35
2.3.5.2. Aspek Akses dan Konsumsi Pangan Masyarakat	II-50
2.3.5.3. Persentase Daerah Berhutan	II-51
2.3.5.4. Daerah Rawan Bencana	II-53
2.3.5.5. Perkembangan Harga Beras, Harga Bahan Pokok Dan Kebutuhan Pokok Utama	II-57



2.3.5.6. Penilaian Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Buol II-58

BAB	III	PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS DAN INTERVENSI	III-1
	3.1.	Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	III-4
	3.2.	Bidang Kesehatan	III-6
	3.3.	Bidang Pendidikan	III-10
	3.4.	Penentuan Wilayah Prioritas dan Intervensi Ketahanan Pangan	III-13
	3.4.1.	Kecamatan Prioritas	III-13
	3.4.2.	Intervensi Kebijakan	III-15
BAB	IV	ANALISIS ANGGARAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BUOL	IV-1
	4.1.	Gambaran Umum Anggaran Berdasarkan Peranan Perangkat Daerah di Kabupaten Buol	IV-1
	4.2.	Distribusi Anggaran	IV-3
	4.3.	Analisis Gap Budgeting (Jurang Anggaran) Kemiskinan dan Kesejahteraan	IV-18
	4.4.	Analisis Jurang Anggaran pada Urusan Kesehatan	IV-18
	4.5.	Analisis Jurang Anggaran Pendidikan	IV-24
	4.6.	Analisis Jurang Anggaran Infrastruktur Dasar	IV-28
	4.7.	Analisis Jurang Anggaran Pendidikan	IV-32
BAB	V	TARGET DAN PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	V-1
	5.1.	Target dan Prioritas RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-1
	5.2.	Target dan Prioritas dalam APBD Kabupaten Buol (2017-2022)	V-7
	5.2.1.	Target dan Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	V-8
	5.2.2.	Target dan Prioritas Bidang Kesehatan	V-10
	5.2.3.	Target dan Prioritas Bidang Kesehatan	V-11
	5.2.4.	Target dan Prioritas Bidang Kesehatan	V-12
	5.2.5.	Target dan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	V-15
BAB	VI	RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	VI-1
	6.1.	Rencana Aksi Daerah Bidang Kesehatan	VI-3
	6.2.	Rencana Aksi Daerah Bidang Pendidikan	VI-5
	6.3.	Rencana Aksi Daerah Bidang Ketenagakerjaan	VI-6
	6.4.	Rencana Aksi Daerah Bidang Perumahan dan Lingkungan	VI-13





---

6.5.	Rencana Aksi Daerah Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Buol	VI-15
BAB VII	PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BUOL	VII-1
7.1.	Monitoring dan Evaluasi Sebagai Sebuah Strategi	VII-1
7.2.	Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten Buol	VII-18
BAB VIII	KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN	VIII-1
8.1.	Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD	VIII-1
8.2.	Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Renstra	VIII-2
8.3.	Kaji Ulang Integrasi Kebijakan Penanggulangan Intergrasi dalam RKPD	VIII-7



## DAFTAR TABEL

Judul	Hal.
Tabel 2.1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-1
Tabel 2.2. Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se – Kabupaten Buol	II-3
Tabel 2.3. Klasifikasi Kelas Lereng Kabupaten Buol	II-9
Tabel 2.4. Rata-rata Suhu (°C) dan Kelembaban Udara (%) Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-11
Tabel 2.5. Rata-Rata Curah Hujan, Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-12
Tabel 2.6. Proporsi Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol	II-13
Tabel 2.7. Sebaran Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol	II-13
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Per Kecamatan Tahun 2017	II-16
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-17
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2010 – 2017	II-18
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-19
Tabel 2.12. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-20
Tabel 2.13. Umur Harapan Hidup Kabupaten Buol, Sulteng dan Indonesia Periode 2013-2018	II-21
Tabel 2.14. Harapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol, Sulteng & Indonesia Periode 2013-2018	II-22



Tabel 2.15.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol, Sulteng & Indonesia Periode 2013-2018	II-22
Tabel 2.16.	Ketenagakerjaan di Kabupaten Buol Tahun 2013-2018	II-23
Tabel 2.17.	Jumlah Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Lahan Tempat Tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40 % terendah	II-25
Tabel 2.18.	Jumlah rumah tangga menurut sumber air minum dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buol	II-26
Tabel 2.19.	Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buol	II-27
Tabel 2.20.	Jumlah rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar dengan status kesejahteraan 40 % terendah Kabupaten Buol	II-29
Tabel 2.21.	Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buol	II-30
Tabel 2.22.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Buol Tahun 2016 dan 2017	II-36
Tabel 2.23.	Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2017	II-37
Tabel 2.24.	Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-38
Tabel 2.25.	Estimasi Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-39
Tabel 2.26.	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Buol Tahun 2013 – 2017	II-40
Tabel 2.27.	Persebaran Luas Sawah (Ha) Menurut Sumber Pengairannya Di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-40
Tabel 2.28.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sayuran	II-43



Tabel 2.29.	Luas Area Perkebunan (Ha) di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-44
Tabel 2.30.	Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Buol Tahun 2012-2015	II-44
Tabel 2.31.	Populasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas Di Kabupaten Buol Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.32.	Populasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas Di Kabupaten Buol Tahun 2017	II-47
Tabel 2.33.	Produksi Telur di Di Kabupaten Buol Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.34.	Produksi (ton) Perikanan Budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-49
Tabel 2.35.	Persentase Hutan terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2017	II-52
Tabel 2.36.	Perkembangan Harga Beras, Harga Kebutuhan Pokok dan Pokok Utama	II-58
Tabel 2.37.	Hasil Analisis Kerentanan Pangan di Kabupaten Buol Tahun 2018	II-60
Tabel 2.38.	Hasil Analisis Kerentanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan Dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol	II-62
Tabel 3.1.	Rangking RTM Kabupaten Buol	III-1
Tabel 3.2.	Individu Miskin Kabupaten Buol	III-2
Tabel 3.3.	Individu Miskin Bekerja dan Tidak Bekerja di Kabupaten Buol	III-4
Tabel 3.4.	Individu Miskin Bekerja Kabupaten Buol	III-5
Tabel 3.5.	Jumlah Individu Memiliki Penyakit Kronis di Kabupaten Buol	III-6
Tabel 3.6.	Jumlah Individu Rumah Tangga Miskin Menderita Cacat Tahun 2017	III-10
Tabel 3.7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia, Sulteng dan Kabupaten Buol Tahun 2016-2018	III-11



Tabel 3.8.	Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Buol, Tahun 2017	III-11
Tabel 3.9.	Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Tahun 2015 (jiwa)	III-12
Tabel 3.10.	Bobot Indikator Kabupaten Berdasarkan Expert Judgment	III-14
Tabel 3.11.	Analisis Prioritas Wilayah Yang Rentan Pangan Berdasarkan Indikator Ketersediaan Pangan dan Ketahanan Pangan Sementara Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol	III-15
Tabel 3.12.	Alternatif intervensi yang dapat dilakukan di wilayah Kecamatan Prioritas	III-16
Tabel 4.1.	Uraian Distribusi Anggaran Menurut Program, Indikator Program, Target dan Distribusi Anggaran Dan OPD Pelaksana, Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-3
Tabel 4.2.	Jurang Akumulasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol Periode 2018 – 2022	IV-17
Tabel 4.3.	Gap Budgeting (Jurang Anggaran) Kemiskinan dan Kesejahteraan di Kabupaten Buol Periode 2018 – 2022	IV-18
Tabel 4.4.	Alokasi Anggaran Menurut Program, Indikator Target, pada Urusan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-20
Tabel 4.5.	Jurang Anggaran pada Urusan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-23
Tabel 4.6.	Alokasi Anggaran Menurut Program, Target, pada Urusan Pendidikan dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-25
Tabel 4.7.	Jurang Anggaran pada Urusan Pendidikan dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-26
Tabel 4.8.	Alokasi Anggaran Menurut Program, Target pada Urusan Infrastruktur Dasar dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-28



Tabel 4.9.	Jurang Anggaran pada Urusan Infrastruktur Dasar dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-30
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran Menurut Program, dan Target pada Urusan Pangan dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-32
Tabel 4.11.	Jurang Anggaran pada Urusan Pangan dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	IV-34
Tabel 5.1.	Target Capaian Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	V-1
Tabel 5.2.	Target Indikator Kinerja OPD Terkait Ketahanan Pangan di Kabupaten Buol 2018-2021	V-17
Tabel 6.1.	Identifikasi Masalah Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-3
Tabel 6.2.	Identifikasi Masalah Kemiskinan Bidang Pendidikan di Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-5
Tabel 6.3.	Ketenagakerjaan di Kabupaten Buol Tahun 2013-2018	VI-12
Tabel 6.4.	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan Indonesia	VI-13
Tabel 6.5.	Rencana Aksi Daerah Bidang Infrastruktur	VI-14
Tabel 6.6.	Masalah Kemiskinan, Strategi Pemecahan Masalah melalui Program dan Kegiatan pad Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Buol	VI-18
Tabel 8.1.	Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kemiskinan	VIII-1
Tabel 8.2.	Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Renstra	VIII-3



## DAFTAR GAMBAR

Judul	Hal
Gambar 2.1. Peta Kelas Lereng Kabupaten Buol	II-9
Gambar 2.2. Peta Penggunaan lahan Kabupaten Buol	II-15
Gambar 2.3. Peta Arahana Penggunaan Lahan untuk Pertanian Perkebunan Kabupaten Buol	II-45
Gambar 2.4. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	II-50
Gambar 2.5. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016	II-51
Gambar 5.1. Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat	V-8
Gambar 7.1. Proses Penyusunan Evaluasi	VII-12
Gambar 7.2. Mekanisme dan Prosedur Monitoring dan evaluasi Penanggulangan kemiskinan	VII-16



## DAFTAR GRAFIK

Judul	Hal.
Grafik 2.1. Persentase RTM yang memiliki rumah bukan di Lahan Sendiri Tahun 2015	II-24
Grafik 2.2. Persentase Sumber Air Minum RTM Yang Tidak Terlindung	II-26
Grafik 2.3. RTM Yang Menggunakan Listrik Non PLN dan Tidak Memiliki Listrik	II-28
Grafik 2.4. Persentase RTM Yang Tidak Memiliki Jamban	II-28
Grafik 2.5. Persentase RTM yang tidak memiliki Septick Tank	II-30
Grafik 3.1. RTM Dikarenakan Lemahnya Infrastruktur	III-2
Grafik 3.2. Individu Miskin di Kabupaten Buol	III-3
Grafik 3.3. Angka Penyakit Kronis di Umur 15 Tahun Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Buol Periode Tahun 2015, 2016-2018 data belum tersedia	III-7
Grafik 3.4. Angka Penyakit Kronis di Umur 15-44 Tahun Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Buol Periode Tahun 2015	III-9
Grafik 3.5. Angka Penyakit Kronis di Umur 45-59 Tahun Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Buol Periode Tahun 2015	III-9
Grafik 3.6. Angka Penyakit Kronis di Umur 60 Tahun Keatas Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Buol Periode Tahun 2015	III-9
Grafik 4.1. Gambaran Umum Anggaran Berdasarkan Peranan Perangkat Daerah di Kabupaten Buol Periode 2018-2022	IV-1
Grafik 5.2. Rangking Prioritas Penangan RTM Tidak Memiliki Jamban	V-12
Grafik 5.3. Rangking Prioritas Penangan RTM Tidak Memiliki Septick	V-13
Grafik 5.4. Rangking Prioritas Penyediaan Sumber Air Minum	V-13
Grafik 5.5. Rangking Prioritas Penyediaan Sambungan Listrik PLN	V-14



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Pentingnya SPKD Bagi Kabupaten Buol**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi sanitasi dan lingkungan. Bila kita mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yaitu: Pasal 27 ayat 2; Pasal 28 Huruf A; Pasal 28 Huruf B ayat 2; Pasal 28 Huruf C ayat 1 dan 2; Pasal 28 Huruf D ayat 2; Pasal 28 Huruf H ayat 1 dan 3; Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4; serta Pasal 34 ayat 1, 2,3, dan ayat 4, maka tujuan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang maupun yang termaktub dalam RPJM nasional 2009–2014 adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan



dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, serta menurunkan jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan kompleksitas dan keragaman dari dimensi-dimensi kemiskinan, maka penyebab kemiskinan di Kabupaten Buol dengan daerah lain dapat sangat berbeda. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh juga harus dilakukan di tingkat daerah agar lebih mencerminkan kondisi riil aspek geopolitik Kabupaten Buol. Hal ini sejalan dengan era otonomi daerah, Pemerintah Daerah menjadi pelaku strategis untuk langsung melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan, yakni pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama, akan tetapi bergeser menjadi fasilitator, katalisator dan dinamisator upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan melakukan hal-hal berikut ini :

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama, agar semua pihak selaku pemangku kepentingan (*stakeholders*), yakni Pemerintah, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Perguruan Tinggi maupun masyarakat umum lainnya memiliki komitmen yang sama dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikannya secara sektoral, terpusat, seragam dan berbasis proyek. Masalah Kemiskinan menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan atas hak-hak dasar kaum miskin melalui kebijakan dan program Penanggulangan yang terpadu dan berkesinambungan;
2. Menempatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan spesifik daerah, agar tercipta proses pembelajaran dan internalisasi tanggung



- jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan ;
3. Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ;
  4. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum yang paling mendasar bagi masyarakat termasuk bagi penduduk miskin melalui pengembangan standar pelayanan minimal ;
  5. Melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin ;
  6. Meningkatkan efektivitas pendayagunaan dana pusat dan daerah dalam membiayai program penanggulangan kemiskinan ;

Sampai dengan Tahun 2017, kemiskinan di Kabupaten Buol ternyata masih menjadi masalah dalam proses dan kegiatan pembangunan yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan absolut di Kabupaten Buol. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Kabupaten Buol berjumlah 25,76 ribu jiwa atau proporsinya mencapai 16,65 persen di Tahun 2017.

Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan baik sebelumnya melalui program pemberdayaan dan pendampingan maupun dengan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Namun upaya itu belumlah cukup untuk mengurangi secara signifikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buol. Kekurang berhasil program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama beberapa tahun sangat dipengaruhi oleh faktor kerentanan masyarakat terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, bencana alam dan bencana sosial (konflik) yang terjadi.

Fenomena yang lain dari persoalan kemiskinan di Kabupaten Buol, persebarannya tidak saja pada komunitas masyarakat yang bermukim di tengah-tengah wilayah pesisir, tetapi juga terkonsentrasi terbesar pada



beberapa kecamatan terutama pada desa-desa terpencil (*remote area*) di wilayah. Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K) Tahun 2015 menunjukkan bahwa konsentrasi kemiskinan berada pada Kecamatan Biau mencapai 1.665 Kepala Keluarga dan 1.470 KK di Kecamatan Bokat. Sebaliknya, konsentrasi kemiskinan terkecil berada pada Kecamatan Paleleh Barat mencapai 709 KK. Secara kultural, masyarakat Kabupaten Buol yang bermukim pada perkotaan, perdesaan, terpencil mencapai 13.401 KK yang masalah sosial mereka merata pada semua aspek, seperti belum bersentuhan dengan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta sarana infrastruktur untuk kebutuhan keseharian yang tidak menunjang. Namun, kemiskinan dalam konteks ini hanya dari perspektif pihak luar, sedangkan mereka sama sekali tidak merasa miskin karena seringnya mereka berpindah tempat terutama apabila ada anggota komunitas mereka yang meninggal dunia.

Hal lain yang perlu dikemukakan, persoalan kemiskinan di Kabupaten Buol tidak semata terjadi karena faktor internal, tetapi faktor eksternal juga turut berkontribusi sehingga mempercepat pelebaran permasalahan kemiskinan secara makro. Karena jika dirunut ke belakang, maka akan dijumpai ragam masalah yang mendorong akselerasi angka kemiskinan yang cenderung memperlihatkan trend kenaikan setiap tahunnya, seperti situasi perekonomian nasional yang belum lepas dari krisis global serta kebijakan Pemerintah Pusat yang membebani rakyat. Dari kedua faktor tersebut, langsung atau tidak langsung sering menyebabkan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buol untuk menanggulangi permasalahan masyarakat miskin seolah tak berarti banyak. Kecenderungan tersebut terlihat ketika Pemerintah Pusat mencabut subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *subprime mortgage* penduduk miskin meningkat dari 77.871 jiwa di tahun 2009 menjadi 83.379 jiwa di Tahun 2010. Dampak langsung yang dirasakan di Kabupaten Buol adalah adanya kenaikan biaya hidup di masyarakat menyebabkan beban penderitaan



yang ditanggung masyarakat miskin makin berat. Fenomena internal yang berpengaruh pada kenaikan maupun penurunan angka kemiskinan adalah bencana alam, tanah longsor, angin ribut, puting beliung maupun *mismanagement* belanja daerah antara lain tidak terkoordinasinya dengan baik belanja melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), besarnya belanja aparatur daripada belanja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak yang selanjutnya diperparah oleh perilaku sebagian aparatur yang menjadikan APBD hanya sebagai anjungan tunai mandiri (ATM) bagi pundi-pundi mereka sebagai konsekuensi dari sikap mental hedonisme.

Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Buol tersebut juga tidak terlepas dari faktor struktural. Selama ini, persoalan kemiskinan yang terjadi tidak semata karena adanya persoalan kekurangan sumber-sumber penghasilan, tetapi juga berkorelasi dengan adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan masyarakat miskin, seperti tidak adanya akses yang memadai dari masyarakat miskin ke sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya masyarakat miskin tersebut terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial, juga secara politik, mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hajat hidup mereka. Proses ini berlangsung bagai sebuah sistem yang timbal balik yang cenderung saling terkait dan saling mengunci, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin itu sendiri.

Untuk menjawab tantangan dan masalah kemiskinan tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat arah dan tepat sasaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk terlibat secara sinergis dan duduk bersama untuk membangun kepedulian dengan fokus menanggulangi masalah kemiskinan secara bersama. Karena bila situasi ini tidak segera



ditanggulangi, akan memperparah kondisi masyarakat miskin. Hal ini terlihat dengan indikasi lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, merebaknya sikap menunggu berbagai program bantuan pemerintah. Bila kondisi ini terbiarkan secara terus-menerus, maka akan berdampak pada terbangunnya sistem sosial yang melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas jika tidak cepat terantisipasi.

Di sisi lain upaya-upaya penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan hanya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi, seperti peningkatan penghasilan, pemberian kredit lunak, dan sebagainya. Semua ini tidak dapat disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin tetapi tidak serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Cara pandang yang menjadi kelemahan mendasar yang selama ini terjadi adalah melihat kemiskinan tidak secara multi-dimensional. Faktor kemiskinan selama ini hanya dilihat dari satu perspektif, yakni adanya perspektif yang masih melihat kemiskinan terjadi karena adanya faktor tunggal, seperti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh rendahnya penghasilan (ekonomi), sehingga pemecahan yang logis adalah dengan meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan disini seolah-olah menjadi obat mujarab terhadap semua persoalan kemiskinan. Sesungguhnya, akar masalah kemiskinan tidak semata pada faktor penghasilan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang berkorelasi positif dengan berbagai peluang yang dapat diraihnya. Jadi lebih merupakan akibat dari suatu situasi yang terjadi oleh sebab kebijakan politik yang tidak adil yang diterapkan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tersingkir dari sumberdaya kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidup mereka secara layak.

Permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:



1. Belum meratanya pembangunan hingga ke perdesaan;
  - a. Kesempatan berusaha di perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin di daerah perdesaan;
  - b. Masih tingginya pengangguran terbuka di perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan karena ketrampilan penduduk miskin yang sangat terbatas;
  - c. Masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat miskin yang menggantungkan diri pada usaha mikro;
2. Masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar;
  - a. Masih terdapatnya kasus kurang gizi dan gizi buruk;
  - b. Cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga sasaran masih jauh dari memadai;
  - c. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi terutama di daerah-daerah terisolir;
  - d. Masih kurangnya dukungan penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
3. Harga kebutuhan bahan pokok cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin ;
4. Belum maksimalnya dukungan dan kebijakan ekonomi dan politik yang berorientasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ;
5. Masih lemahnya manajemen dan administrasi di tingkat desa/kelurahan berkaitan dengan pendataan jumlah penduduk miskin ;
6. Koordinasi di antara para pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Pers, dan para kelompok peduli lainnya dalam penanggulangan kemiskinan belum dilaksanakan secara maksimal ;
7. Penataan lingkungan pemukiman terutama pada kantong-kantong penduduk miskin, belum memenuhi standar lingkungan pemukiman



- yang memadai dengan ketersediaan prasarana dan sarana baik perkotaan maupun di perdesaan yang memadai (jalan setapak, sanitasi, pembuangan sampah, listrik dan penerangan jalan) ;
8. Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga, Kartu Kesehatan bagi penduduk miskin terutama di perdesaan ;
  9. Masih terbatasnya kemampuan pemberian pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin karena wilayah kerja Puskesmas sangat luas dan belum meratanya bidan desa di semua kecamatan ;
  10. Masih terbatasnya kemampuan pemberian subsidi/bantuan pendidikan bagi penduduk miskin, baik pendidikan formal maupun untuk pendidikan luar sekolah. Kondisi ini menyebabkan masalah kemiskinan di Kabupaten Buol terletak pada bidang pendidikan. Hal ini diperparah pula oleh angka putus sekolah sangat tinggi bahkan tertinggi di Sulawesi Tengah ;
  11. Terbatasnya kemampuan penyediaan sarana air bersih bagi penduduk pada komunitas masyarakat miskin ;
  12. Kontribusi dan peran serta masyarakat/swasta dalam penanggulangan kemiskinan masih belum memadai misalnya dalam optimalisasi penyelenggaraan Zakat dalam masyarakat yang beragama Islam ;
  13. Kontribusi dan peran serta dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan yang juga masih belum memadai, misalnya dalam optimalisasi penyelenggaraan CSR.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan SPKD**

Dalam rangka legitimasi dokumen SPKD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, maka penyusunannya didasarkan pada beberapa peraturan yang berlaku sebagai acuan kebijakan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Peraturan perundangan tentang RPJPN 2005-2025 memuat tujuan



- pembangunan nasional jangka panjang termasuk di dalamnya mengamanatkan penanggulangan kemiskinan berbasis hak. Presiden terpilih menghasilkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam skala lima tahunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Aturan perundangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membuat manajemen pembangunan nasional secara teknokratik, demokratis, partisipatif serta *top down* dan *bottom up*. Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan secara substantif diletakkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada kebijakan RPJMN yang membuat kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan perundangan Keuangan Negara menjadi dasar bagi analisis penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan;
  4. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan perundangan ini menjadi dasar bagi peran TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam paradigma desentralisasi dan otonomi daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Aturan perundangan yang berisi tentang sejumlah hak-hak yang dikategorikan ke dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,



antara lain hak atas kehidupan yang layak, hak atas pangan dan sebagainya. Prinsip-prinsip hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi dasar implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun kebijakan operasional sebagai basis legitimasi penyusunan SPKD Kabupaten Buol Tahun 2018-2023, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
6. Instruktur Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
9. Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang TKPKD ;
10. Keputusan Menko Kesra No. 5/KEP/Menko/Kesra/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja TKPKD;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 050/132/Bappeda-GST/2011 tentang TKPKD Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2018);



13. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buol Nomor 188.04/41.07/Bappeda/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2019.

Kebijakan operasional ini tidak langsung terkait dengan SPKD namun dapat dirujuk secara konvergen khususnya dalam hal penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program pemerintah yang bersifat pro-rakyat yang meliputi rencana produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan dan penanggung jawab.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat SPKD Bagi Daerah**

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Buol merupakan arah bersama bagi pemerintah kabupaten, dunia usaha (swasta), masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terarah dan sinergis. Dengan demikian, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol adalah;

1. Memandu perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif ;
2. Mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Buol, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan para pihak untuk peduli bekerjasama memecahkan masalah kemiskinan, mendorong kesetaraan dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
3. Membangun sinergi dan konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan;
4. Pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, lembaga swadaya



masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga-lembaga donor dan para pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan di Kabupaten Buol;

5. Komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
6. Sebagai arah kebijakan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui program yang akan dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Buol.

Sementara itu di sisi lain, dokumen SPKD Kabupaten Buol ini diharapkan dapat sangat bermanfaat untuk hal-hal yang sangat memberi manfaat, dalam rangka upaya:

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol;
2. Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol;
3. Terbentuknya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol;
4. Terbentuknya sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol ;

#### 1.4. Keluaran/Hasil

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan memperoleh hasil berupa dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya dokumen sebagai acuan dalam melakukan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah ;



2. Adanya Gambaran Tentang Strategi Dan Rencana Tindak Lanjut Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Adanya Dokumen Rencana Aksi Konkrit Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran terbuka rendah, Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, serta adanya perbaikan standar pelayanan minimal (SPM) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

### 1.5. Sistematika

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini disusun dalam delapan bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang:**

1. Pentingnya SPKD:
2. Dasar hukum penyusunan SPKD:
3. Tujuan dan Manfaat SPKD:
4. Keluaran/Hasil:
5. Sistematika.

#### **BAB II. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Buol, menguraikan tentang :**

1. Kondisi Geografi:
  - Luas dan Batas Wilayah Administrasi:
  - Letak dan Kondisi Geografi.
2. Kependudukan :
3. Identifikasi Indikator Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi aspek :
  - Kesehatan;
  - Pendidikan;
  - Ketenagakerjaan;
  - Perumahan dan Lingkungan;
  - Ketahanan Pangan.



### **BAB III. Penentuan Wilayah Prioritas dan Intervensi, meliputi Bidang:**

1. Kemiskinan dan Ketenagakerjaan;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Ketahanan Pangan, yang berkaitan dengan;
  - Penentuan Wilayah Kecamatan Prioritas;
  - Intervensi Kebijakan.

### **BAB IV. Analisis Anggaran SPKD Kabupaten Buol, meliputi uraian tentang:**

1. Gambaran Umum Anggaran Berdasarkan Peran Perangkat Daerah di Kabupaten Buol;
2. Distribusi Anggaran;
3. Analisis Jurang Anggaran (Budgetting Gap) Kemiskinan dan Kesejahteraan;
4. Analisis Jurang Anggaran pada Urusan Kesehatan;
5. Analisis Jurang Anggaran pada Urusan Pendidikan;
6. Analisis Jurang Anggaran pada Urusan Infra Struktur;
7. Analisis Jurang Anggaran pada Urusan Ketahanan Pangan.

### **BAB V. Target dan Prioritas Percepatan Penanggung Kemiskinan Daerah Kabupaten Buol, menguraikan tentang:**

1. Target dan Prioritas RPJMD Kabupaten Buol Periode 2012-2022;
2. Target dan Prioritas dalam Proyeksi APBD Kabupaten Buol Periode 2017-2022, meliputi Bidang :
  - Kemiskinan dan Ketenagakerjaan;
  - Kesehatan;
  - Pendidikan;
  - Infra Struktur.

### **BAB VI. Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penanggulangan Kemiskinan, menurut Bidang:**

- Kesehatan;
- Pendidikan;
- Ketenagakerjaan;
- Perumahan dan Lingkungan;
- Ketahanan Pangan.

### **BAB VII. Penguatan Kelembagaan dalam Pelaksanaan SPKD Kabupaten Buol, diuraikan meliputi:**

1. Monitoring dan Evaluasi sebagai Sebuah Strategi;



2. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Buol.

**BAB VIII. Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan, meliputi:**

1. Kaji Ulang dan Integrasi Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD;
2. Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Renstra;
3. Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPKD.



## BAB II KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN BUOL

### 2.1. Kondisi Geografi

#### 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Buol memiliki potensi daerah begitu melimpah di antaranya lahan pertanian, perkebunan rakyat, kawasan hutan, perikanan darat, kelautan, pertambangan dan energi serta pariwisata. Letak geografis wilayah Kabupaten Buol memiliki luas mencapai 4.043,57 Km<sup>2</sup> atau sekitar 5,94 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Selengkapnya luas wilayah Kabupaten Buol menurut kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Buol Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Lakea	208,55	5,16
2.	Biau	217,8	5,39
3.	Karamat	153,1	3,79
4.	Momunu	400,4	9,90
5.	Tiloan	1.437,70	35,56
6.	Bokat	196,1	4,85
7.	Bukal	355,52	8,79
8.	Bunobogu	327,15	8,09
9.	Gadung	160,38	3,97
10.	Paleleh	386,19	9,55
11.	Paleleh Barat	200,68	4,96
<b>JUMLAH</b>		<b>4.043,57</b>	<b>4.043,57</b>

Sumber: Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

Luas wilayah dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki kabupaten ini merupakan sumberdaya yang bersifat terbarukan dan tak terbarukan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan pengelolaannya dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah, baik



Pemerintah Pusat maupun daerah. Pengelolaan sumberdaya alam ini dilakukan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi meningkatkan kemakmuran masyarakat, secara efisien, transparan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Secara administratif, Kabupaten Buol berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli dan Laut Sulawesi. Secara rinci batas-batas wilayah administratif Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi.
- Sebelah selatan : Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah timur : Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
- Sebelah barat : Kabupaten Tolitoli.

Apabila dicermati, letak Kabupaten Buol sangat strategis dengan tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Buol ke depan, yaitu:

- Letak geografis Kabupaten Buol yang berbatasan dengan Laut Sulawesi secara tidak langsung akan membuka akses ke Negara-Negara Asia lainnya, sehingga Kabupaten Buol dapat menjadi salah satu pintu Sulawesi untuk pengembangan hubungan dagang dan investasi di era pasar bebas;
- Sebagian besar wilayah Kabupaten Buol mencakup Laut Sulawesi dan ke arah barat dekat dengan Selat Makassar yang akan mendukung terciptanya hubungan dagang dan investasi dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia;
- Adanya keragaman potensi masing-masing daerah sekitar Kabupaten Buol akan mendorong interkoneksi ekonomi, saling mendukung dan bersinergi untuk kemajuan bersama pada masing-masing wilayah.

Letak ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai konsekuensi logis dari berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Letak demikian ini merupakan salah satu potensi dan modal



bagi pengembangan Kabupaten Buol di masa yang akan datang. Secara administratif Kabupaten Buol terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 7 (tujuh) kelurahan, dan 108 (seratus delapan) desa, dengan rincian seperti pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se – Kabupaten Buol**

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Momunu	Momunu Pinamula Pujimulyo Taluan Potugu Panimbul Tongon Lamadong Pomayagon Guamomial Lamadong Pajeko Wakat Soraya Permata putih Mangubi	
2.	Lakea	Tuinan Lakea II Lakea I Lakuan Buol Bukaan Ngune Ilambe	
3.	Bokat	Tayadun Poongan Bongo Doulan Kantan Kodolagon	
		Negeri Lama Bokat IV Butukan Bokat	



No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
		Tikopo Bukamog Tang Duamayo Langudon	
4.	Bunobogu	Lonu Tamit Botugolu Bunobogu Konamukan Ponipingan Inalatan Domag Mekar Bunobogu Selatan Pokobo	
5.	Paleleh	Umu Mulangato Lilito Talaki Batu Rata Kwala Besar Tolau Paleleh Lintidu Pionoto Dopalak Dutuno	
6.	Biau		Buol Kali Leok II Leok I Kumaligon Kulango Bugis
7.	Tiloan	Boilan Kokobuka Air Terang Panilan Jaya Jatimulya	
		Lomuli Balau Maniala	



No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
		Monggonit	
8.	Bukal	Biau Bungkudu Rantemaranu Winangun Modo Unone Mopu Diat Potangoan Binuang Yugut Mooyong Mulat Bukal	
9.	Gadung	Lokodidi Matinan Taat Lokodoka Labuton Bulagidun Diapati Nandu Lipubogu Bulagidun Tanjung Pandangan	
10.	Karamat	Mokupo Mendaan Baruga Monano Busak I Busak II Lamakan	
11.	Paleleh Barat	Bodi Tayokan Harmoni Lunguto  Timbulon Oyak Hulubalang	

Sumber : RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.



## 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

### 2.1.2.1. Posisi Astronomis

Secara geografis wilayah Kabupaten Buol terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak astronomisnya antara  $0,35^{\circ}$ - $1,20^{\circ}$  Lintang Utara dan  $120,12^{\circ}$ - $122,09^{\circ}$  Bujur Timur. Ibu Kota Kabupaten Buol terletak di Kecamatan Biau yang berjarak sekitar 493 Km dari Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.1.2.2. Morfologi

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Buol berada di antara jajaran vulkanik lengan utara (northern volcanic ranges) dengan wilayah pegunungan bagian tengah (central mountains) dari Pulau Sulawesi. Morfologi wilayah ini sebagian merupakan perbukitan dengan relief sedang, sebagian besar yang ber relief tinggi terutama pada bagian selatan. Sebagian lagi ber relief rendah yang umumnya berupa dataran alluvial dan wilayah-wilayah pesisir pantai, atau bagian utara Kabupaten Buol.

Wilayah bertopografi tinggi terdiri dari deretan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi lebih dari 2.000 m dpl (di atas permukaan laut). Selain itu, terdapat pula perbukitan yang sebagian berupa karst, ada yang menjorok hingga ke batas garis pantai dengan elevasi antara 100 – 300 m, yaitu Tanjung Dako di Kecamatan Karamat dan beberapa pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol berupa pulau kecil dengan morfologi tidak rumit, di antaranya Pulau Busak, Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di perairan Laut Sulawesi.

Berdasarkan proses geologi, pengelompokan umum morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dibagi dalam:

- a) **Lereng/Tebing Depresi**, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut, lereng yang terbentuk berupa tebing curam karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 100 – 200 meter.



- b) **Daerah Paparan**, dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut.
- c) **Dataran**, terdiri dari:
- Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Biau.
  - Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada.  
Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan permukiman yang sudah lama dibuka.
- d) **Perbukitan**, terdiri dari:
- Punggung bukit sedimen asimetrik takter orientasi. Bentukan seperti ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang wilayah Kabupaten Buol
  - Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral. Bentukan bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Lakea.
  - Deretan perbukitan di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Lakea, Kecamatan Tiloan dan Kecamatan Paleleh.
- e) **Pegunungan**, terdiri dari:
- Punggung bukit sedimentasi metrik tertoreh melebar, sebarannya dijumpai disebagian wilayah kecamatan yang ada.
  - Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol. Satuan ini merupakan bagian terbesar morfologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Buol. Ketinggiannya berkisar 800–2.500 m dpl (G. Malino). Wilayah-wilayah pegunungan yang termasuk dalam satuan ini meliputi deretan Pegunungan Malino, G. Bangkalang dan G. Tetembu serta G. Tentolomatian di Pegunungan Paleleh.



### 2.1.2.3. Topografi

Luas wilayah Kabupaten Buol berada pada topografi dengan ketinggian 0-1000 m dpl (di atas permukaan laut) dengan rincian sebagai berikut: 553,97 km<sup>2</sup> (13,70 persen) antara 1-100 m dpl, 1.629,96 km<sup>2</sup> (40,31 persen) antara 100-500 m dpl, 1.572,14 km<sup>2</sup> (38,88 persen) antara 500-1.000 m dpl, dan 287,5 km<sup>2</sup> (7,11 persen) berada pada ketinggian >1.000 m dpl.

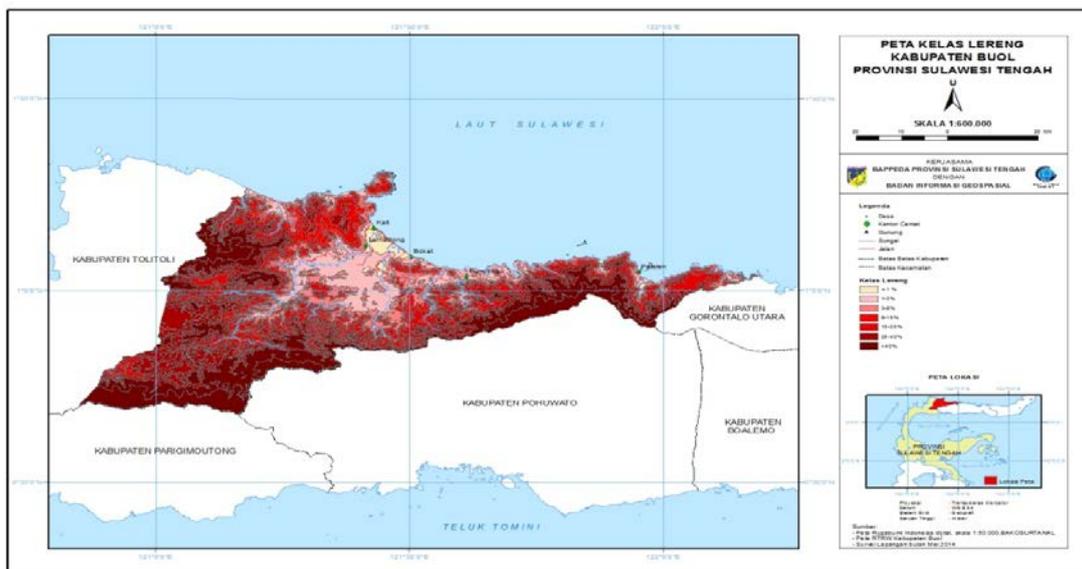
Kemiringan tanah terbagi atas 4 (empat) kelompok yaitu, datar, bergelombang, curam dan sangat curam dengan rincian sebagai berikut : 429,43 km<sup>2</sup> (10,62 persen) antara 0-2° (datar), 866,54 km<sup>2</sup> (21,43 persen) memiliki kemiringan 2-15° (bergelombang), 1.066,29 km<sup>2</sup> (26,375 persen) memiliki kemiringan 16-40° (curam) dan 1.666,76 km<sup>2</sup> (41,22 persen) memiliki kemiringan di atas 40° (sangat curam).

Kemiringan Lereng wilayah Kabupaten Buol mencakup 7 (tujuh) kelas, di mana wilayah bergunung dengan kelerengan 40 persen mendominasi wilayah tersebut dengan luas 95.210,84 Ha (25,03 persen), kemudian wilayah berbukit dengan kelerengan (25-40 persen) seluas 90.646,11 Ha (23,83 persen). Wilayah berbukit dengan kelerengan (15-40 persen) seluas 156.508,61 Ha (41,14 persen), wilayah bergelombang dengan kelerengan (8-15 persen) seluas 33.567,60 Ha (8,82 persen), wilayah berombak dengan kemiringan (3-8 persen) seluas 39.389,11 Ha (10,35 persen), sedangkan wilayah datar dan agak datar (0-8 persen) seluas 55.766,17 Ha (14,66 persen). Hampir setengah (48,85 persen) dari luas Kabupaten Buol memiliki kemiringan > 25 persen. Peta Kelas Lereng Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.3, sedangkan luasan masing-masing kelas disajikan dalam Gambar 2.1 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi Kelas Lereng Kabupaten Buol**

No.	Kelerengan	Keterangan	Luas (Ha)	Luas (%)
1.	< 1 %	Datar	7,349.05	
2.	1-3%	Agak Datar	48,417.12	12.73
3.	3-8%	Berombak	39,389.11	10.35
4.	8-15%	Bergelombang	33,567.60	8.82
5.	15-25%	Berbukit	65,862.50	17.31
6.	25-40%	Berbukit	90,646.11	23.83
7.	>40%	Bergunung	95,210.84	25.03
8.	Total		380,442.33	100.00

Sumber: Bappeda Kabupaten Buol, SIPD Kabupaten Buol Tahun 2016



Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

**Gambar 2.1**  
**Peta Kelas Lereng Kabupaten Buol**

#### 2.1.2.4. Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Buol pada umumnya sama dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 38 sungai, di mana 15 sungai memiliki panjang lebih dari 20 kilometer dan 18 sungai kurang



dari 20 kilometer. Sungai-sungai tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Beberapa sungai telah dimanfaatkan sebagai sumber irigasi baik teknis maupun non teknis.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Buol meliputi Wilayah Sungai Buol, Lantikadigo, Lonu, Bunobogu, Bulagidun, Bodi, Timbulon sudah saatnya dikelola dengan baik, karena kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah sektor yang harus dilayani (industri, pariwisata, perkotaan, pertanian, perikanan, perkebunan, kesehatan, dan lain-lain). Ketersediaan air jumlahnya relatif tetap, bahkan cenderung semakin berkurang karena menurunnya kondisi dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik akibat terjadinya benturan kepentingan, jika permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumberdaya air untuk pemenuhannya (supply). Oleh karena itu, perlu secara proporsional dan seimbang, antara rencana pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya air.

Beberapa daerah aliran sungai telah mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan, erosi yang berlebihan telah mengakibatkan terjadinya sedimentasi. Pengambilan air tanah yang berlebihan di beberapa akuifer telah mengakibatkan terjadi intrusi air laut dan penurunan elevasi muka tanah. Ketidak tersediaan sistem sanitasi dan pengolahan limbah industri yang baik, juga telah mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah dan sungai oleh buangan air rumah tangga dan industri, terutama di musim kemarau. Di saat lain di musim hujan, banjir terjadi di mana-mana, akibat karena semakin kecilnya daerah resapan, turunnya kapasitas sungai dan rusaknya sistem drainasi internal.

Pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air mencakup sistem jaringan prasarana yang mampu digunakan sebagai upaya



pendayagunaan sumberdaya air khususnya pertanian, pengendalian daya rusak air (banjir dan abrasi pantai), dan konservasi sumberdaya air. Sumberdaya air ini termasuk juga sumberdaya air pada wilayah pesisir Buol yang memiliki potensi daya rusak tinggi dengan terjadinya abrasi di pantai Buol, sehingga tindakan pengendalian daya rusak perlu dilakukan.

#### 2.1.2.5. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Buol yang dideskripsikan dalam laporan ini menyangkut suhu, kelembaban, curah hujan, tekanan udara, kecepatan angin dan lama penyinaran matahari. Untuk lebih jelasnya komponen klimatologi tersebut disajikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Rata-rata Suhu (°C) dan Kelembaban Udara (%) Menurut Bulan**  
**di Kabupaten Buol Tahun 2017**

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban (%)
Januari	23,7	30,9	26,7	85,2
Februari	23,2	30,3	26,3	86,6
Maret	23,5	30,9	26,5	85,6
April	23,5	31,2	27,0	84,4
Mei	23,6	30,7	27,8	80,8
Juni	24,0	30,7	26,9	84,0
Juli	23,1	30,6	26,9	82,9
Agustus	22,3	30,3	26,6	85,2
September	23,4	31,4	26,9	84,7
Oktober	22,6	31,0	27,5	80,9
Nopember	24,0	31,3	27,5	82,5
Desember	24,4	31,3	28,0	na

Sumber: Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

Tabel 2.4 di atas menunjukkan secara umum, iklim wilayah Kabupaten Buol sama dengan iklim Sulawesi Tengah. Suhu udara berkisar antara 22,3°C sampai dengan 31,4°C. Kelembaban udara



berkisar antara 80,8 persen sampai dengan 86,6 persen. Tekanan udara berkisar di antara 1.008,8 mb hingga 1.011,6 mb. Kecepatan angin berkisar antara 90 knot hingga 110 knot, yang tertinggi terjadi pada Bulan maret sampai September. Penyinaran matahari berkisar antara 32 persen hingga 74 persen. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni yang mencapai 574 mm, dan terendah pada bulan oktober mencapai 42,8 mm. Untuk lengkapnya data klimatologi disajikan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Rata-Rata Curah Hujan, Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2017**

Bulan	Curah Hujan (mm)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	229,9	1.010,2	90	54
Februari	140,2	1.011,6	90	39
Maret	170,2	1.011,1	110	52
April	157,2	1.011,1	110	74
Mei	145,2	1.010,1	110	64
Juni	574,0	1.011,0	110	32
Juli	337,0	1.010,7	110	52
Agustus	374,4	1.010,2	110	54
September	177,6	1.010,9	110	56
Oktober	42,8	1.009,6	90	63
November	165,8	1.008,8	90	59
Desember	144,0	1.009,4	90	53

Sumber: Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

#### 2.1.2.6. Penggunaan Lahan

Adapun penggunaan dan fungsi lahan di Kabupaten Buol dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu: (1) Kawasan Budi Daya; (2) Kawasan Penyangga dan (3) Kawasan Lindung. Secara rinci



proporsi penggunaan dan fungsi lahan di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Proporsi Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kawasan Budidaya	169.389,82	44,3
2.	Kawasan Penyangga	144.947,96	37,91
3.	Kawasan Lindung	68.050,47	17,8
<b>Total</b>		<b>382.388,25</b>	<b>100</b>

Sumber: Distarum Kabupaten Buol, RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2030

Sedangkan sebaran penggunaan dan fungsi lahan pada masing-masing kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7**  
**Sebaran Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol**

No.	Nama Kecamatan	Penggunaan dan Fungsi Lahan (Ha)			Jumlah
		Kawasan Budidaya	Kawasan Penyangga	Kawasan Lindung	
1.	Biau	9.450,40	0,47	0	9.450,87
2.	Bokat	11.629,83	3,34	2.890,05	14.523,22
3.	Bukal	20.386,80	16.444,67	13.826,85	50.658,32
4.	Bunobogu	4.220,35	18.709,47	5.370,59	28.300,41
5.	Gadung	4.646,43	11.021,33	4.120,06	19.787,82
6.	Karamat	7.707,41	8.296,24	0	16.003,65
7.	Lakea	3.220,40	22.048,84	0	25.269,24
8.	Momunu	28.815,70	5.480,58	0	34.296,24
9.	Paleleh	9.874,68	11.378,03	7.241,01	28.493,72
10.	Paleleh Barat	4.453,93	10.557,61	2.174,60	17.168,14
11.	Tiloan	65.001,89	41.007,38	32.427,30	138.436,57
<b>Jumlah</b>		169.389,82	144.947,96	68.050,47	382.388,25

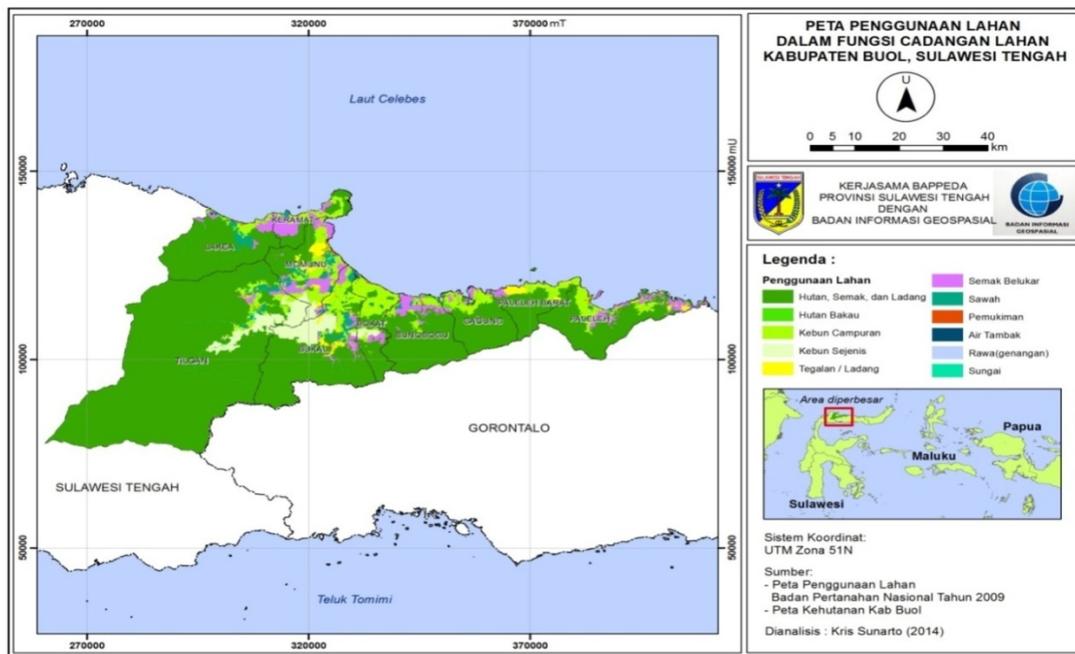
Sumber: Distarum Kabupaten Buol, RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2030



Berdasarkan Tabel 2.7, wilayah kecamatan yang memiliki penggunaan dan fungsi lahan sebagai kawasan budidaya terbesar adalah Kecamatan Tiloan yaitu 65.001,89 Ha (38,3 persen) dan yang terkecil adalah Kecamatan Lakea yaitu 3.220,40 Ha (1,90 persen). Kawasan penyangga terbesar terdapat di Kecamatan Lakea yaitu 22.048,84 Ha (15,21 persen) dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Biau yaitu 0,47 Ha (0,003 persen). Sedangkan Kawasan lindung terbesar berada di Kecamatan Tiloan yaitu 32.427,30 Ha (47,65 persen) dan terdapat 4 (empat) wilayah kecamatan yang tidak memiliki kawasan lindung yaitu Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lakea dan Kecamatan Momunu. Dari angka tersebut di atas jika disertai data spasial atau peta tersedia maupun peta hasil analisis, maka akan semakin tampak kondisi dan potensi sehingga dapat menghasilkan saran ataupun arahan, atas ketersediaan lahan atau disebut sebagai cadangan lahan.

Cadangan lahan suatu wilayah sangat perlu diketahui potensi maupun sebarannya, untuk kemudian dikelola berdasarkan pola Tata Ruang yang ada maupun Tata Wilayah yang kemudian diperbaharui berdasarkan keselarasan kebutuhan daerah yang berazas optimasi penggunaan lahan dan kelestarian lingkungan. Melalui peta penggunaan lahan ini tercermin potensi cadangan lahan yang ideal bahwa lahan perbukitan dan pegunungan yang luas wilayahnya berkisar 60 persen perlu tertutup dengan vegetasi alam hutan maupun hutan produksi dan kebun rakyat yang berazas konservasi. Dalam kondisi demikian, potensi air tanah dan kondisi lingkungan akan bernuansa alami akan merambah ke arah wilayah hilir. Dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan penggunaan lahan, kondisi tersebut kini telah sangat berubah. Kondisi lahan hutan sudah semakin terbatas, pembukaan hutan menjadi perladangan semakin meluas, desakan permintaan perizinan perkebunan pun telah merambah wilayah yang bukan peruntukannya.

Area penggunaan lahan sebagai fungsi lahan cadangan Kabupaten Buol terlihat pada Gambar 2.2 berikut:



Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

### Gambar 2.2 Peta Penggunaan lahan Kabupaten Buol

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa hutan, semak dan perladangan digabung menjadi satu simbol dengan maksud bahwa areal tersebut merupakan cadangan lahan yang sangat memerlukan cara kelola sebagai kawasan yang bervegetasi lebat dan berazas konservasi. Koservasi lahan, hutan dan air serta biota pada kawasan tersebut perlu diutamakan. Hutan bakau dan nipah sebagai cadangan lahan ekosistem pesisir yang perlu dipertahankan. Kebun campuran sebagai kebun rakyat yang dapat diintensifkan oleh masyarakat antara lain cengkeh, coklat, kopi dan berbagai tanaman keras lainnya. Kebun sejenis dalam gambar ini menunjukkan luasan kebun kelapa sawit yang berdasarkan kesesuaian dan bukan perizinan. Tegalan dan ladang merupakan cadangan lahan yang masih dapat diintensifkan pengelolaan pola tanamnya. Semak belukar pada peta menunjukkan semak belukar di lahan kering dan sebagian di lahan basah wilayah pesisir. Semak belukar merupakan cadangan lahan yang harus dikelola secara bijaksana, ada kemungkinan harus dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem, dan ada yang perlu



diubah dan dimanfaatkan untuk areal tanaman pangan maupun bahan ekspor. Sawah di daerah Kabupaten Buol mempunyai tiga tipe, sawah irigasi setengah teknis, irigasi sederhana yang disebut sebagai irigasi desa dan tadah hujan. Masing-masing masih dapat diintensifkan melalui pengelolaan saluran irigasi yang lebih baik. Kawasan pemukiman pasti akan berkembang seiring kebutuhan lahan untuk tempat tinggal.

## 2.2. Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam proses pembangunan, seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitasnya baik, sedangkan jika kualitasnya kurang baik dapat berakibat pada beban pembangunan. Penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Per Kecamatan**  
**Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk
1.	Lakea	10.985	7,06
2.	Biau	39.178	24,18
3.	Karamat	9.075	5,83
4.	Momunu	15.081	9,69
5.	Tiloan	13.268	8,53
6.	Bokat	13.420	8,63
7.	Bukal	15.045	9,67
8.	Bunobogu	9.416	6,05
9.	Gadung	12.189	7,83
10.	Paleleh	11.971	7,69
11.	Paleleh Barat	5.965	3,83
<b>JUMLAH</b>		<b>155.593</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.



Demikian pula jika komposisi dan distribusinya tidak seimbang dan merata, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, karena daerah yang penduduknya sedikit relatif sulit berkembang akibat kurangnya sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Buol Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	9.216	9.223	18.439
5-9	9.102	8.613	17.715
10-14	8.593	8.127	16.720
15-19	7.642	7.211	14.853
20-24	6.116	5.988	12.104
25-29	6.526	6.310	12.836
30-34	6.287	6.024	12.311
35-39	6.290	5.721	12.011
40-44	5.487	4.881	10.368
45-49	4.195	3.778	7.973
50-54	3.289	2.899	6.188
55-59	2.692	2.348	5.040
60-64	1.628	1.533	3.161
65+	2.662	3.212	5.874
<b>Jumlah</b>	<b>79.725</b>	<b>75.868</b>	<b>155.593</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

Jumlah penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2010 sebanyak 134.357 jiwa sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 152.296 jiwa, selanjutnya meningkat kembali pada Tahun 2017 mencapai 155.593 jiwa.



Laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2010 ke Tahun 2017 sebesar 2,26 persen, sementara laju pertumbuhan penduduk Tahun 2016-2017 rata-rata 2,16 persen per tahun. Jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buol Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.10 berikut:

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2010 – 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1.	Lakea	9.700	10.819	10.985	1,69	1,53
2.	Biau	27.567	37.369	39.178	5,01	4,84
3.	Karamat	8.296	8.981	9.075	1,20	1,05
4.	Momunu	13.896	14.938	15.081	1,11	0,96
5.	Tiloan	9.955	12.771	13.268	4,06	3,89
6.	Bokat	12.609	13.333	13.420	0,81	0,65
7.	Bukal	13.485	14.848	15.045	1,48	1,33
8.	Bunobogu	8.814	9.349	9.416	0,86	0,72
9.	Gadung	13.337	12.092	12.189	0,95	0,80
10.	Paleleh	11.323	11.905	11.971	0,71	0,55
11.	Paleleh Barat	5.375	5.891	5.965	1,41	1,26
<b>JUMLAH</b>		<b>134.357</b>	<b>152.296</b>	<b>155.593</b>	<b>2,26</b>	<b>2,16</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Buol selama 5 (lima) tahun terakhir masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi ini berarti pemerintah harus dapat mengimbangi untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan



papan serta ketersediaan lapangan pekerjaan untuk mencegah kerawanan sosial yang dapat ditimbulkan. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Rasio
		Laki Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Lakea	5.635	5.350	10.985	105,33
2.	Biau	19.880	19.298	39.178	103,02
3.	Karamat	4.688	4.387	9.075	106,86
4.	Momunu	7.694	7.387	15.081	104,16
5.	Tiloan	6.885	6.383	13.268	107,86
6.	Bokat	6.793	6.627	13.420	102,50
7.	Bukal	7.839	7.206	15.045	108,78
8.	Bunobogu	4.853	4.563	9.416	106,36
9.	Gadung	6.238	5.951	12.189	104,82
10.	Paleleh	6.138	5.833	11.971	105,23
11.	Paleleh Barat	3.082	2.883	5.965	106,90
<b>JUMLAH</b>		<b>79.725</b>	<b>75.868</b>	<b>155.593</b>	<b>105,08</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Buol pada Tahun 2017, jenis kelamin laki-laki sebanyak 79.725 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 75.878 jiwa. Jenis kelamin laki laki masih lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, rasio jenis kelamin sebesar 105,08.



Distribusi dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2017 mencapai 38,48 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Biau dengan kepadatan 179,88 penduduk/km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Tiloan dengan kepadatan 9,23 penduduk/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.12**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Buol Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1.	Lakea	208,55	52,67
2.	Biau	217,8	179,88
3.	Karamat	153,1	59,27
4.	Momunu	400,4	37,66
5.	Tiloan	1.437,70	9,23
6.	Bokat	196,1	68,43
7.	Bukal	355,52	42,32
8.	Bunobogu	327,15	28,78
9.	Gadung	160,38	76,00
10.	Paleleh	386,19	31,00
11.	Paleleh Barat	200,68	29,72
<b>JUMLAH</b>		<b>4.043,57</b>	<b>38,48</b>

Sumber: Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.

Dengan kondisi penyebaran penduduk yang masih belum merata, maka diperlukan langkah dan strategi yang dapat mendorong dan



memacu pemerataan jumlah penduduk dengan meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan.

### 2.3. Identifikasi Indikator Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat

#### 2.3.1. Kesehatan

Pada sisi kemiskinan kesehatan Kabupaten Buol selama periode 2013-2018 yang diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat 1,01 kali lipat atau meningkat 0,95 tahun dari 66,64 tahun pada 2013 menjadi 67,59 tahun pada 2018. Sedangkan UHH Provinsi Sulteng juga meningkat dari 67,02 tahun pada 2013 menjadi 67,78 tahun pada 2018 atau naik 0,76 tahun. UHH Indonesia meningkat pula sebesar 1,01 kali lipat dari 70,40 tahun pada 2013 menjadi 71,20 tahun pada 2018 atau naik 0,8 tahun.

**Tabel 2.13.**  
**Umur Harapan Hidup Kabupaten Buol, Sulteng dan Indonesia**  
**Periode 2013-2018**

Uraian	Umur Harapan Hidup (Tahun)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buol	66,64	66,66	66,86	66,93	67,00	67,59
Sulawesi Tengah	67,02	67,18	67,26	67,31	67,32	67,78
Indonesia	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah

#### 2.3.2. Pendidikan

Kinerja pendidikan di Kabupaten Buol tercermin dari data Harapan Rata-rata Lama Sekolah (HLS) pada tabel 2.14, yang meningkat dari 12,54 tahun pada 2013 menjadi 13,06 tahun pada 2017. Angka HLS Kabupaten Buol tersebut lebih tinggi dari HLS Sulteng dan Nasional yang masing-masing meningkat dari 12,36 tahun dan 12,10 tahun pada 2013 menjadi 13,13 tahun dan 12,91 tahun pada 2018.



**Tabel 2.14.**  
**Harapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol, Sulteng & Indonesia Periode 2013-2018**

Kode	Kab/Kota	HLS					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7207	Buol	12,54	13,03	13,04	13,05	13,06	na
7200	Sulawesi Tengah	12.36	12.71	12.72	12.92	13.04	13.13
0000	Indonesia	12.10	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah

Adapun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol, Sulteng dan Indonesia selama periode 2013-2018.

**Tabel 2.15.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol, Sulteng & Indonesia Periode 2013-2018**

Kode	Kab/Kota	RLS					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7207	Buol	8.04	8.30	8,32	8,62	8,63	na
7200	Sulawesi Tengah	7.82	7.89	7.97	8.12	8.29	8.52
0000	Indonesia	7.61	7.73	7.84	7.95	8.10	8.17

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah

Selama periode 2013-2018, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buol melampaui RLS Sulteng dan Nasional. RLS Kabupaten Buol meningkat dari 8,04 tahun pada 2013 menjadi 8,63 tahun pada 2017. Sedangkan RLS Sulteng dan Nasional meningkat dari 7,82 tahun dan 7,61 tahun pada 2013 menjadi 8,52 tahun dan 8,17 tahun pada 2013.

### 2.3.3. Ketenagakerjaan

Pada sisi ketenagakerjaan, kecuali Tahun 2016 yang memang tidak tersedia datanya secara nasional, selama periode 2013-2018.



**Tabel 2.16**  
**Ketenagakerjaan di Kabupaten Buol Tahun 2013-2018**

Uraian		2013		2014		2015		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Angkatan Kerja	Bekerja	57.893	65,51	61.153	63,032	65.075	65,45859	64.487	61,721	68.303	63,9565
	Pengangguran	1.016	1,15	1.243	1,28	2.418	2,43	2.966	2,84	3.274	3,07
	<b>Total</b>	<b>58.909</b>	<b>66,66</b>	<b>62.396</b>	<b>64,31</b>	<b>67.493</b>	<b>67,89</b>	<b>67.453</b>	<b>64,56</b>	<b>71.577</b>	<b>67,02</b>
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah					8.477	8,53	10.405	9,9587	11.036	10,3337
	Mengurus RT	29.464	33,34	34.623	35,6868	19.934	20,05	21.321	20,406	20.144	18,8621
	Lain-lain					3.510	3,53	5.303	5,0755	4.039	3,78198
	<b>TOTAL</b>	<b>29.464</b>	<b>33,34</b>	<b>34.623</b>	<b>35,6868</b>	<b>31.921</b>	<b>32,11</b>	<b>37.029</b>	<b>35,44</b>	<b>35.219</b>	<b>32,9778</b>
Total Penduduk 15 tahun Ke atas		88.373	61,98	97.019	66,50	99.414	66,72	104.482	67,15	106.796	67,2561
TPAK		<b>58.909</b>	<b>66,66</b>	<b>62.396</b>	<b>64,31</b>	<b>67.493</b>	<b>67,89</b>	<b>67.453</b>	<b>64,56</b>	<b>71.577</b>	<b>67,02</b>
Tingkat Pengangguran		1.016	1,72	1.243	1,99	2.418	3,58	2.966	4,40	3.274	4,57
Total Penduduk		142.585		145.889		149.004		155.593		158.790	

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah



Selama periode 2013-2018, angkatan kerja di Kabupaten Buol meningkat dari 58.909 jiwa pada 2013 menjadi 71.577 jiwa pada 2018 atau terjadi peningkatan sebesar 1,22 kali lipat atau pertumbuhannya mencapai 3,97 persen. Dari jumlah tersebut, 98,28 persen Angkatan Kerja berada pada kategori bekerja. Namun, di Tahun 2018, proporsi Angkatan Kerja yang berada pada kategori bekerja menurun menjadi 95,42 persen. Angka Pengangguran meningkat dari 1.016 jiwa di Tahun 2013 menjadi 3.274 jiwa di Tahun 2018 atau meningkat 3,22 kali lipat atau meningkat sebesar 26,37 persen. Tingginya angka kenaikan pengangguran terbuka ini menjadi satu dari beberapa faktor utama penyebab kemiskinan di Kabupaten Buol.

#### 2.3.4. Perumahan dan Lingkungan

Kemiskinan infrastruktur akan dianalisis melalui indikator proporsi rumah layak huni (Atap, lantai dan dinding), proporsi rumah tangga sumber air minum layak, proporsi rumah tangga memiliki listrik dan proporsi rumah tangga memiliki sanitasi layak.

**Grafik 2.1**  
**Persentase RTM yang memiliki rumah bukan di Lahan Sendiri**  
**Tahun 2015**





Grafik di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Tiloan memiliki persentase tertinggi Rumah Tangga Miskin yang memiliki rumah bukan di lahan sendiri, yakni sebesar 19,5 persen, disusul kemudian oleh Kecamatan Kramat sebesar 15,3 persen dan Kecamatan Biau sebesar 14,6 persen. Secara rata-rata, di Kabupaten Buol terdapat 10,2 persen atau 1.238 rumah tangga miskin yang berdiri bukan di lahan sendiri.

**Tabel 2.17**  
**Jumlah Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Lahan Tempat Tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40 % terendah**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				%RTM Bukan Milik Sendiri
		Milik Sendiri	Milik Orang Lain	Tanah Negara	Lainnya	
1	Lakea	784	60	1	2	7,4%
2	Biau	1.251	198	15	1	14,6%
3	Karamat	813	140	5	2	15,3%
4	Momunu	1,443	158	0	16	10,8%
5	Tiloan	741	151	24	4	19,5%
6	Bokat	1.144	110	3	4	9,3%
7	Bukal	1.335	48	6	1	4,0%
8	Bunabogu	769	77	0	0	9,1%
9	Gadung	1.035	73	2	1	6,8%
10	Paleleh	1,056	58	3	0	5,5%
11	Paleleh Barat	586	66	7	2	11,3%
<b>Jumlah</b>		<b>10.958</b>	<b>1.139</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>10,2%</b>

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)



**Tabel 2.18.**  
**Jumlah rumah tangga menurut sumber air minum dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buol**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
		Air Kemasan	Air Ledeng	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	% Sumber Tidak Terlindung
1	Lakea	7	42	574	271	22,64%
2	Biau	440	347	614	264	13,10%
3	Karamat	6	109	821	105	5,98%
4	Momunu	19	74	875	801	43,46%
5	Tiloan	2	149	260	588	87,63%
6	Bokat	28	96	835	511	28,48%
7	Bukal	4	1	598	901	75,02%
8	Bunobogu	9	146	272	508	72,68%
9	Gadung	25	322	300	547	57,76%
10	Paleleh	24	131	674	392	26,08%
11	Paleleh Barat	7	1	240	461	94,47%
<b>Jumlah</b>		<b>571</b>	<b>1.418</b>	<b>6.063</b>	<b>5.349</b>	<b>37,90%</b>

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)

**Grafik 2.2**  
**Persentase Sumber Air Minum RTM Yang Tidak Terlindung**





Dari grafik nampak bahwa 94,47 persen Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Paleleh Barat memanfaatkan sumber air minum yang tidak terlindung, kemudian 87,63 persen di Kecamatan Tiloan dan 75,02 persen di Kecamatan Bukal. Hal ini sangat berpotensi menyebabkan penyakit diare dan penyakit lainnya. Rata-rata di Kabupaten Buol terdapat 37,90 persen rumah tangga miskin mengkonsumsi sumber air minum yang tidak terlindung.

**Tabel 2.19.**  
**Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buol**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Tidak ada listrik	%Listrik non-PLN+Tidak ada listrik
1	Lakea	777	7	110	13,09%
2	Biau	1.446	14	205	13,15%
3	Karamat	796	51	194	23,54%
4	Momunu	1.213	40	388	26,08%
5	Tiloan	198	440	361	80,18%
6	Bokat	953	112	405	35,17%
7	Bukal	356	245	903	76,33%
8	Bunobogu	720	5	210	22,99%
9	Gadung	977	9	208	18,17%
10	Paleleh	707	216	298	42,10%
11	Paleleh Barat	193	295	221	72,78%
<b>Jumlah</b>		<b>8.336</b>	<b>1.434</b>	<b>5.503</b>	<b>37,20%</b>

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)



**Grafik 2.3.**  
**RTM Yang Menggunakan Listrik Non PLN dan Tidak Memiliki Listrik**



Dari grafik menunjukkan bahwa di semua kecamatan masih terapat rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN dan bahkan tidak mempunyai listrik. Persentase tertinggi berada di Kecamatan Tilolan yakni sebesar 80,18 persen rumah tangga miskin, selanjutnya Kecamatan Bukal sebesar 76,33 persen dan Kecamatan Paleleh Barat sebesar 72,78 persen. Rata-rata rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN dan tidak memiliki listrik sebesar 37,20 persen atau sebesar 4.937 RTM.

**Grafik 2.4**  
**Persentase RTM Yang Tidak Memiliki Jamban**





**Tabel 2.20**  
**Jumlah rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar dengan status kesejahteraan 40 % terendah Kabupaten Buol**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		Jamban Sendiri	Jamban Bersama/ Umum	Tidak ada	%Tidak ada
1	Lakea	259	78	557	62,30%
2	Biau	739	248	678	40,72%
3	Karamat	209	151	681	65,42%
4	Momunu	674	240	855	48,33%
5	Tiloan	399	113	478	48,75%
6	Bokat	340	151	979	66,60%
7	Bukal	590	166	748	49,73%
8	Bunobogu	333	242	360	38,50%
9	Gadung	340	96	758	63,48%
10	Paleleh	172	37	1.012	82,88%
11	Paleleh Barat	176	80	453	63,89%
<b>Jumlah</b>		<b>4.231</b>	<b>1.602</b>	<b>7.568</b>	<b>56,47%</b>

**Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)**

Dari grafik nampak bahwa rata-rata rumah tangga miskin yang tidak memiliki Jamban di Kabupaten Buol adalah sebanyak 56,47 persen atau sebanyak 7.568 rumah tangga. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Paleleh sebanyak 82,88 persen, Kecamatan Bokat sebesar 66,60 persen dan Kecamatan Karamat sebesar 65,42 persen. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan tingkat kesehatan masyarakat.



**Tabel 2.21**  
**Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Buol**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			
		Tangki/S PAL	Lubang Tanah	Lainnya	% Non Tangki/S PAL
1	Lakea	205	128	561	77,07%
2	Biau	514	167	984	69,13%
3	Karamat	108	319	614	89,63%
4	Momunu	470	451	848	73,43%
5	Tiloan	117	332	550	88,29%
6	Bokat	305	113	1.052	79,25%
7	Bukal	313	398	793	79,19%
8	Bunobogu	353	107	475	62,25%
9	Gadung	271	61	862	77,30%
10	Paleleh	110	72	1.039	90,99%
11	Paleleh Barat	189	19	501	73,34%
<b>Jumlah</b>		<b>2.955</b>	<b>2.167</b>	<b>8.279</b>	<b>77,95%</b>

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)

**Grafik 2.5.**  
**Persentase RTM yang tidak memiliki Septick Tank**



Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)



Grafik ini menunjukkan bahwa Kecamatan Paleleh mempunyai persentase Rumah Tangga Miskin yang tidak memiliki *septic tank* yakni sebesar 90,99 persen, kemudian Kecamatan Karamat sebesar 89,63 persen dan Kecamatan Tiloan sebesar 88,29 persen. Rata-rata Kabupaten Buol, persentase rumah tangga miskin yang tidak memiliki *septic tank* sebesar 77,95 persen atau sebesar 10.446 rumah tangga.

### **2.3.5. Kemiskinan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol**

Ketahanan pangan di daerah adalah kemampuan penduduk di suatu daerah untuk setiap saat mendapatkan pangan yang cukup untuk aktifitas dan kehidupan yang sehat. Ketahanan pangan mencakup pencapaian minimum pada: (1) ketersediaan nutrisi yang cukup, memadai dan pangan yang aman, (2) adanya jaminan untuk memperoleh pangan yang layak dalam lingkungan sosial dan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat, atau tanpa harus mengais sisa-sisa makanan dalam sampah, mencuri, ataupun dengan cara lain yang tidak pantas (Bickel et al, 2000). Dalam tingkat keluarga, hal tersebut penting karena keluarga merupakan awal dari kehidupan bagi anak dan anggota keluarga yang lain terutama dalam hal pangan, gizi, pendidikan dan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan dan distribusi pangan serta subsistem konsumsi. Ketersediaan dan distribusi memfasilitasi pasokan pangan yang stabil dan merata ke seluruh wilayah, sedangkan subsistem konsumsi memungkinkan setiap rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dan memanfaatkannya secara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggotanya (Suryana, 2004).



Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Deklarasi Roma Tahun 1975 memberikan definisi “Food security as the availability at all times of adequate world food supplies of basic food stuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices”. Beberapa Pilar ketahanan pangan (Food Security), yakni:

- 1. Food availability**, Ketersediaan Pangan (food availability), yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat;
- 2. Food Acces**, Akses pangan (food access), yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan;
- 3. Food Utilization**, Penyerapan pangan (food utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumahtangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita;
- 4. Food Stability**, Stabilitas pangan merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis



(chronic food insecurity) dan kerawanan pangan sementara (transitory food insecurity). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial;

**5. Nutritional status**, Status gizi adalah *outcome* ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya status gizi ini diukur dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

Ada 10 Indikator Kerawanan Pangan Kronis:

1. Aspek ketersediaan: konsumsi normatif;
2. Aspek Akses pangan dan mata pencaharian: KK miskin, tidak akses listrik, Desa yang tidak dilalui kendaraan roda empat;
3. Aspek kesehatan dan gizi: wanita buta huruf, umur harapan hidup, bayi kurang gizi, tingkat kematian bayi, penduduk tinggal >5km dari puskesmas.

Terdapat 4 Indikator Kerawanan Pangan Sementara (transien):

1. Persentase daerah berhutan;
2. Persentasi daerah puso;
3. Daerah rawan longsor dan banjir;
4. Penyimpangan curah hujan.

Terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan nasional menjelaskan cara penanganan daerah rawan pangan yakni dengan menjumlahkan 3 indikator di bawah ini:

1. Pertanian terkait dengan menghitung ketersediaan pangan (setara pangan beras) yakni perbandingan antara ketersediaan pangan (beras) dengan kebutuhan beras;
2. Perbandingan antara kesehatan dengan preferensi energi:

$$= \frac{(n \text{ gizi} < -2 \text{ SD})}{(n \text{ balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100\%$$



3. Perbandingan Sosial Budaya dengan kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera:

- Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera;
- Keluarga sejahtera-satu (KS1): jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Secara metodologis, kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu **ketersediaan pangan**, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut. Dibandingkan dengan FSVA 2015, terdapat beberapa perubahan indikator FSVA 2018, yaitu: i) pangsa pengeluaran pangan rumah tangga digunakan sebagai indikator menggantikan presentase desa dengan akses penghubung yang tidak memadai; ii) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun digunakan sebagai indikator menggantikan perempuan buta huruf; dan iii) rasio tenaga kesehatan digunakan untuk menggantikan persentase desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. Perubahan indikator dilakukan berdasarkan kemampuannya untuk melihat kekurangan gizi jangka panjang, agar selaras dengan program pemerintah dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta ketersediaan data pada tingkat kabupaten secara berkala. Berikut ini disajikan kondisi kemiskinan dilihat dari sisi kerawanan pangan terutama yang terkait dengan **ketersediaan pangan** dan **ketahanan pangan sementara** (*transien*) diwakili oleh persentase daerah berhutan.



### **2.3.5.1. Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan terkait dengan istilah kemandirian pangan. Disebutkan bahwa Kemandirian Pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari dalam negeri, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan produksi pangan lokal sesuai dengan potensi dan pola pangan masyarakat setempat. Sumber penyediaan pangan yang diutamakan berasal dari dalam negeri merupakan perwujudan kesadaran bahwa industri pangan dihasilkan oleh lebih dari 60 persen rumah tangga Indonesia, mulai dari produsen kecil seperti petani, industri rumah tangga sampai industri besar dengan berbagai infrastrukturnya (kapital dan tenaga kerja). Berikut ini diuraikan aspek penyediaan pangan di Kabupaten Buol.

#### **A. Produktivitas Tanaman Pangan**

Sebagai daerah yang berkembang, sektor pertanian di Kabupaten Buol masih memegang peranan penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat mengingat sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor penunjang bagi sektor industri, perdagangan dan jasa. Potensi pertanian di Kabupaten Buol tercermin dari luas sawah dan hasil produksi tanaman pangan di wilayah ini.

Luas panen dan produktifitas tanaman pangan (padi dan pangan utama lainnya) di Kabupaten Buol Tahun 2017 (Belum tersedia data luas panen Tahun 2018) terlihat pada Tabel 2.22



**Tabel 2.22**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Lainnya**  
**di Kabupaten Buol Tahun 2016 dan 2017**

No.	Tanaman Pangan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (kw/ha)
1.	Padi Sawah	6.225,3	25.834	41,57
2.	Padi Ladang	426,5	1.181,4	27,78
3.	Jagung	12.406,4	68.359,0	55,15
4.	Kedelai	11,7	11,3	9,71
5.	Kacang Tanah	83	172	20,7
6.	Kacang Hijau	12	10	7,9
7.	Ubi Kayu	28	619	209,5
8.	Ubi Jalar	24	357	105,1

**Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol 2018; Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017.**

Tabel 2.22 menunjukkan bahwa produktifitas tanaman padi atau bahan pangan utama di Kabupaten Buol Tahun 2017 mencapai 41,57 kw/Ha. Produktivitas tertinggi pada tanaman jagung mencapai 55,15 kw/H. Berdasarkan Laporan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas tanam, luas panen dan produksi jagung pada Tahun 2013 mengalami penurunan disebabkan harga jagung masih rendah sehingga belum banyak petani yang berminat mengusahakan tanaman tersebut, sedangkan Tahun 2014-2017 mengalami kenaikan disebabkan harga jagung sudah lebih baik sehingga banyak petani yang berminat mengembangkan tanaman tersebut. Selain itu, peningkatan dari tahun ke tahun tersebut disebabkan adanya penambahan luas lahan dan penggunaan benih unggul.

Adapun kinerja produktivitas untuk tanaman pangan utama yaitu padi (sawah dan ladang) sebagai salah satu komoditas pertanian utama di Kabupaten Buol, dari Tahun 2012 sampai Tahun 2017 disajikan dalam Tabel 2.23.



**Tabel 2.23**  
**Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2012 – 2017**

Tahun	Luas Baku Tanam	Luas Tanam (Ha)		Luas panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang
2012	-	1.390	5	1.720	229,3	6.140	6,88	35.7	3
2013	5.307	4.028	566	4.733	211	27.404	738.5	57.9	3.5
2014	5.545	4.275	561	4.422	575	19.019	1.366	43.01	23.76
2015	5.409	3.304	486	3.411	299	15.516	864,1	45.49	28.9
2016	5.708	6.242	459	4.456	451	19.953	1.035	44.78	22.94
2017	5.826	5.681	264,5	6.225,3	426,5	25.834	1.181,4	41,57	27,78

**Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2018, (data diolah)**

Pada Tabel 2.23 terlihat bahwa Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi padi sawah pada Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan, sedangkan Tahun 2015 mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya kemarau panjang. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi padi ladang pada Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya minat petani pada penanaman padi ladang, sedangkan pada Tahun 2015-2017 mengalami penurunan karena sebagian petani sudah beralih menanam jagung karena secara ekonomi lebih menguntungkan.

Padi merupakan komoditi utama pangan yang sangat diperhatikan pengembangannya oleh pemerintah. Produksi padi tergantung atas ketersediaan lahan dan luas panen. Berikut ini disajikan potensi luas panen padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Buol yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.24.



**Tabel 2.24.**  
**Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan di**  
**Kabupaten Buol Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Total Luas Panen (Ha)
		Padi Sawah	Padi Ladang	
1.	Lakea	847,1	-	847,1
2.	Biau	167,0	15,0	182,0
3.	Karamat	150,0	138,5	288,5
4.	Momunu	1.270,0	-	1.270,0
5.	Tiloan	1.651,0	-	1.651,0
6.	Bokat	459,0	35,0	494,0
7.	Bukal	760,0	18,0	778,0
8.	Bunobogu	210,0	-	210,0
9.	Gadung	225,0	8,0	233,0
10.	Paleleh	486,0	117,0	603,0
11.	Paleleh Barat	0	95,0	95,0
<b>Buol</b>		<b>6.225,0</b>	<b>426,50</b>	<b>6.651,50</b>

**Sumber: BPS, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.**

Tabel 2.24. menunjukkan bahwa potensi pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buol terbesar di Kecamatan Tiloan dan terendah di Kecamatan Paleleh Barat.

Guna memudahkan menganalisis ketersediaan pangan di Kabupaten Buol setiap kecamatan, maka dilakukan estimasi produksi dengan menggunakan data dasar luas panen per kecamatan dan rata-rata produktivitas padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Buol. Hasil estimasi produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Buol per kecamatan pada Tahun 2017 selanjutnya disajikan pada Tabel 2.25.



**Tabel 2.25.**  
**Estimasi Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Per Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Estimasi Produksi (Produktivitas Padi sawah 4,157 ton/ha)	Estimasi Produksi (Produktivitas Padi ladang 2,778 ton/ha)	Total Produksi Padi (Ton per tahun 2017)
		Padi Sawah	Padi Ladang			
1.	Lakea	847,1	0	3.521,39	-	3.521,39
2.	Biau	167	15	694,22	41,67	735,89
3.	Karamat	150	138,5	623,55	384,75	1.008,30
4.	Momunu	1.270,00	0	5.279,39	-	5.279,39
5.	Tiloan	1.651,00	0	6.863,21	-	6.863,21
6.	Bokat	459	35	1.908,06	97,23	2.005,29
7.	Bukal	760	18	3.159,32	50,00	3.209,32
8.	Bunobogu	210	0	872,97	-	872,97
9.	Gadung	225	8	935,33	22,22	957,55
10.	Paleleh	486	117	2.020,30	325,03	2.345,33
11.	Paleleh Barat	0	95	-	263,91	263,91
Kabupaten Buol		6.225,0	426,5	25.877,74	1.184,82	27.062,56
<b>Produksi Padi menurut Data riil Tahun 2017*)</b>				<b>25.834</b>	<b>1.181,40</b>	<b>27.015,40</b>

Keterangan \*) = Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2018

## B. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali seratus persen. Persentase irigasi Kabupaten Buol dalam kondisi baik disajikan pada Tabel 2.26 berikut:



**Tabel 2.26**  
**Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2013 – 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	2.367	2.387	2.397	2.405	na
2.	Luas irigasi Kabupaten (Ha)	3.687	3.693	3.858	3.910	na
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Buol	64	65	62	62	na

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2016.

**Tabel 2.27**  
**Persebaran Luas Sawah (Ha) Menurut Sumber Pengairannya**  
**Di Kabupaten Buol Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Non Irigasi (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	Lakea	400	170	570
2.	Biau	75	108	183
3.	Karamat	75	-	75
4.	Momunu	506	1.165	1.671
5.	Tiloan	485	520	1.005
6.	Bokat	50	340	390
7.	Bukal	82	695	777
8.	Bunobogu	150	287	437
9.	Gadung	148	23	171
10.	Paleleh	175	68	243
11.	Paleleh Barat	20	-	20
<b>Buol</b>		<b>2.166</b>	<b>3.376</b>	<b>5.542</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017.



Luas sawah menurut sumber pengairannya dalam kategori irigasi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Tahun 2016 adalah sawah irigasi seluas 2.166 Ha dan sawah non irigasi seluas 3.376 Ha. Sementara luas lahan sawah aktual adalah sawah irigasi setengah teknis 1.045 Ha, sawah irigasi desa 614 Ha, sawah tadah hujan 2.531 Ha dan sawah pasang surut sebanyak 110 Ha. Daftar luas sawah menurut sumber pengairannya Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.24 dan luas panen dan hasil produksi tanaman padi pada Tabel 2.24 dan tabel 2.25 berikut, data Tahun 2016 tidak tersedia.

Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa pembangunan irigasi tidak signifikan menambah luas aliran irigasi sebab di beberapa wilayah terjadi rehabilitasi berat dan ringan termasuk perbaikan infrastruktur jaringan akibat bencana alam, seperti terjadi di Kecamatan Paleleh (Desa Talaki dan Desa Kwalabesar), Kecamatan Bukal (Desa Winangun dan Desa Mopu), Kecamatan Tiloan (Desa Air Terang dan Desa Boilan) serta Kecamatan Lakea (Desa Lakea I dan Lakuan Buol). Luas rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur lainnya mencapai 253 Ha, sedangkan penambahan jaringan yang baru mencapai 491,5Ha. Pertanian Kabupaten Buol berupa pembangunan jaringan irigasi pipanisasi, pompanisasi dan embung serta penambahan jaringan primer dan tersier.

Pada beberapa wilayah terjadi penambahan luas baku lahan sawah melalui program percontakan sawah baru, yaitu di Kecamatan Momunu seluas 29.99 Ha. Kecamatan Tiloan seluas 51 Ha, Kecamatan Bukal seluas 89,55 Ha dan Kecamatan Bokat seluas 61.32 Ha. Penambahan luas areal lahan baku sawah ini berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan panjang jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air sawah pasca cetak. Di samping terjadi penambahan baku lahan, juga terjadi pengurangan areal lahan baku sawah karena pemilik lahan tidak lagi menggarap sawahnya yang disebabkan lahan sawah yang pengelolaannya adalah sawah pasang surut yang secara spesifik membutuhkan benih khusus dan sulit diperoleh petani. Kondisi demikian



terjadi di Desa Busak Kecamatan Karamat dan Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea. Selain itu, juga terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal dan Kecamatan Tiloan (luas lahan sawah yang dialihfungsikan dalam proses pendataan).

Pada Tahun 2014, dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi teknis dengan penambahan jaringan tersier dan primer seluas 862,5 di Daerah Irigasi Talaki, Lonu, Winangun, Boilan, Pinamula, Lakea I dan Lakea II menggunakan APBD Kabupaten Buol dan APBN, di antaranya melalui program kegiatan WISMP (Loan) seluas 521 Ha. Selain itu juga, dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis berupa pipanisasi, pompanisasi dan embung seluas 124,5 Ha. Selanjutnya pada Tahun 2015 pembangunan jaringan irigasi teknis yang dilaksanakan seluas 653,5 Ha di Daerah Irigasi Talaki, Lonu, Winangun, Mopu, Lakea I dan Lakuan Buol menggunakan APBD Kabupaten Buol dan APBNserta jaringan irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis berupa pipanisasi, pompanisasi dan embung seluas 321 Ha. Pada tahun yang sama terdapat penambahan luas lahan baku sawah 140 Ha, tersebar di Kecamatan: Lakea seluas 21 Ha, Bunobogu seluas 18,5 Ha, Tiloan 46 Ha, Bokat 14 Ha dan Biau 36,5 Ha.

Penambahan luas baku lahan sawah ini mengakibatkan bertambahnya tingkat kebutuhan air yang wajib disediakan yaitu dengan pembangunan jaringan irigasi. Sampai dengan Tahun 2016, jaringan irigasi yang tersedia dapat mengairi sawah seluas 2.490 Ha dengan rincian jaringan irigasi teknis seluas 1.559 Ha dan jaringan irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis seluas 931 Ha. Luas baku lahan sawah Kabupaten Buol 5.233 Ha, yang terolah seluas 4.657 Ha. Dengan demikian, masih terdapat lahan sawah seluas 2.743 Ha (52,42 persen) yang belum terairi dengan jaringan irigasi teknis maupun jaringan irigasi  $\frac{1}{2}$ . Pembangunan Irigasi Modo yang ditargetkan mampu mengairi sawah seluas 1.200 Ha atau 43,75 persen dari yang belum dapat terairi.

### **C. Kondisi Tanaman Hortikultura**

Kondisi tanaman hortikultura pada Tahun 2013-2017 di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.28.



**Tabel 2.28**  
**Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas**  
**Tanaman Sayuran**

Tahun	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
	Cabe	Bawang Merah	Cabe	Bawang Merah	Cabe	Bawang Merah	Cabe	Bawang Merah
<b>2013</b>	54	9	47	78,00	21,50	9	3,66	193,5
<b>2014</b>	66	4	63	55,43	19,54	4	3,49	78,16
<b>2015</b>	70	0	67	103,0	0	0	6,90	0
<b>2016</b>	145	7	138	106,87	38,43	7	14,75	269,01
<b>2017</b>	157	6	163	3	475	0,9	30,25	3

**Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022.**

Pada Tabel 2.28 terlihat bahwa Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi cabe pada Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan disebabkan kebutuhan masyarakat pada komoditi ini sangat tinggi, dan untuk Kabupaten Buol pemasaran cabe sudah merambah ke pasar Sulawesi Utara apalagi menjelang pada hari-hari besar. Sedangkan untuk komoditi bawang merah dari tahun ke tahun berfluktuasi. Hal ini diakibatkan oleh petani sulit mendapatkan benih bawang merah.

#### **D. Perkebunan**

Kabupaten Buol memiliki potensi perkebunan yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari area perkebunan di Kabupaten Buol yang cukup luas serta jenis tanaman perkebunan yang beragam. Potensi perkebunan di Kabupaten Buol tercermin dari luas area perkebunan dan hasil produksi tanaman perkebunan. Hasil produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Buol Tahun 2016 adalah: Kelapa sebanyak 1.2766 Ha, Kelapa Sawit 24.111,01 Ha, Cengkeh 2.180 Ha, Kakao 11.525 Ha, Kopi 627 dan Pala 899 Ha. Daftar luas area perkebunan di Kabupaten Buol pada Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.29 berikut:



**Tabel 2.29**  
**Luas Area Perkebunan (Ha) di Kabupaten Buol Tahun 2016**

Kecamatan	Kelapa	Kelapa Sawit	Cengkeh	Kakao	Kopi	Pala
Lakea	1.324	116	300	794	12	67
Biau	777	-	209	103	10	123
Karamat	1.132	-	277	1.099	13	113
Momunu	1.157	778,95	237	799	60	112
Tiloan	407	12.463,86	43	1.661	62	62
Bokat	1.888	907,53	112	1.148	82	56
Bukal	995	9.844,67	64	1.818	35	52
Bunobogu	1.250	-	112	1.618	200	67
Gadung	1.736	-	354	1.562	69	77
Paleleh	1.395	-	217	445	54	93
Paleleh Barat	705	-	255	478	30	77
<b>Total</b>	<b>12.766</b>	<b>24.111,01</b>	<b>2.180</b>	<b>11.525</b>	<b>627</b>	<b>899</b>

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2016

Sedangkan luas produksi dan hasil produksi tanaman perkebunan dari Tahun 2012 – 2015 di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.30**  
**Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan**  
**Di Kabupaten Buol Tahun 2012-2015**

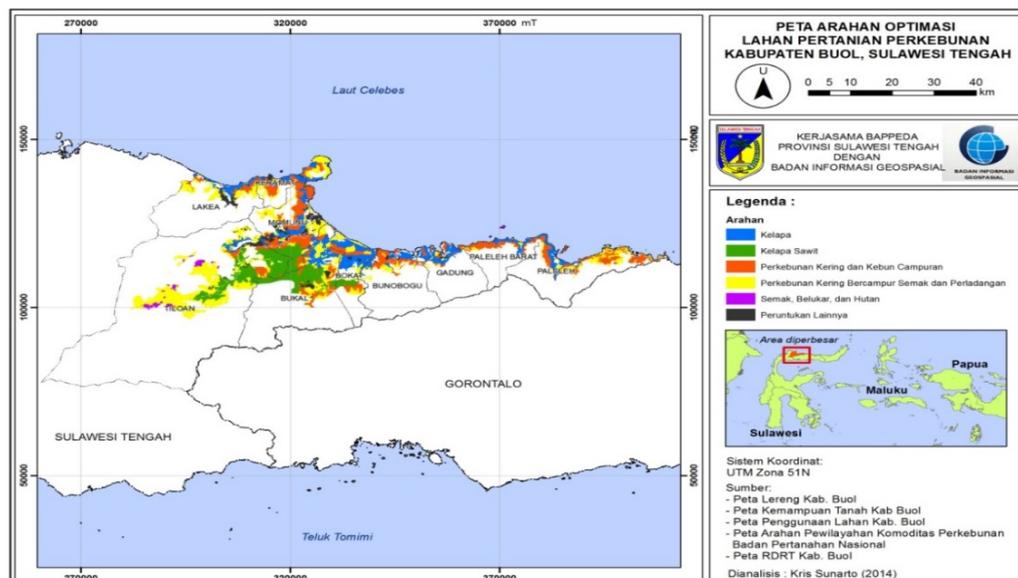
No.	Komoditi	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kelapa	8.771	11.430,51	13.722	11.858	12.775	1.191	12.766	10.161,97
2.	Kel. Sawit	15.089,15	117.514,90	20.344,53	209.528,76	21.322,33	23.073,02	24.111,01	224.474
3.	Cengkeh	1.295	352,45	2.938	358	2.000	340,15	2.180	7547.31.12
4.	Kakao	6.446	6.995,50	12.397	7.064	11.578	7.000	11.525	5.457
5.	Kopi	326	187,86	948	201	629	197,43	627	187,23
6.	Pala	133	10,33	145	8,94	436	10	899	10
7.	Lada	74	9,68	52	10	66	8,17	79	6,22

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2013-2016.



Melalui proses analisis data spasial, sebaran lokasi dan potensi perkebunan besar maupun perkebunan yang sering disebut sebagai kebun rakyat ataupun kebun campuran dapat diketahui. Perkebunan rakyat atau kebun campuran merupakan potensi daerah yang perlu dikembangkan dan kesempatan tumbuh yang seimbang serta proposional guna capaian hasil komoditas yang optimal. Hal tersebut penting mengingat keseimbangan ekosistem maupun sosio sistem yang ada dan yang harus berazas lestari dapat tercapai.

Data spasial penggunaan lahan menunjukkan bahwa areal yang berpotensi untuk komoditas kelapa cukup luas, sementara untuk kelapa sawit justru lebih sempit dibandingkan luasan perizinan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perizinannya melampaui batas ketidaksesuaian. Perkebunan kering dan Kebun campuran berarti kebun rakyat yang pada umumnya ada di sekitar permukiman. Perkebunan kering bercampur semak dan perladangan, berarti lahan masyarakat yang tingkat pengelolaannya masih sangat rendah. Semak belukar dan hutan merupakan kawasan konservasi. Arahan penggunaan lahan untuk pertanian perkebunan seperti pada Gambar 2.6 berikut:



Sumber: Badan Pertanahan Nasional, **Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009**

**Gambar 2.6**  
**Peta Arahan Penggunaan Lahan untuk Pertanian Perkebunan Kabupaten Buol**



Gambar 2.6 menunjukkan kawasan yang lebih sesuai untuk kelapa dapat dipisahkan terhadap peruntukan sawit. Luas untuk sawit 18.300 Ha dan Untuk kelapa 19.600 Ha. Untuk tanaman sawit pada umumnya dikhususkan tanaman sejenis, sementara untuk kelapa merupakan kebun rakyat yang dapat dikombinasi dengan tanaman keras lainnya seperti halnya cokelat, dan tanaman buah-buahan.

### E. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Buol tercermin dari populasi ternak yang dapat dikembangkan di wilayah ini seperti: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Buras, Itik dan lain-lain. Tingkat keberhasilan pembangunan peternakan di Kabupaten Buol dapat dilihat pada peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi dan menurunnya penularan penyakit ternak sebagaimana disajikan pada Tabel 2.31 dan Tabel 2.32.

**Tabel 2.31**  
**Populasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas**  
**Di Kabupaten Buol Tahun 2013-2017**

Tahun	Sapi (ekor)	Kambing (ekor)	Ayam Buras (ekor)	Ayam Petelur (ekor)	Ayam Pedaging (ekor)	Itik (ekor)
2013	14.228	17.778	68.698	14.000	16.000	12.644
2014	15.174	23.059	76.785	22.000	22.000	21.815
2015	16.250	27.387	81.148	32.000	32.000	11.684
2016	17.288	33.388	119.782	27.000	27.000	12.070
2017	18.623	40.295	146.798	164.735	164.735	24.036

Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022.

Pada Tabel 2.30 terlihat bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 populasi ternak sapi mengalami kenaikan rata-rata 667 ekor per tahun. Adapun populasi ternak besar dan unggas menurut kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.31.



**Tabel 2.32**  
**Populasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas**  
**Di Kabupaten Buol Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
1.	Lakea	1.465	3.028	87	17.915	1.766	-	215
2.	Biau	891	4.839	143	5.210	5.242	155.700	4.978
3.	Karamat	2.738	3.288	203	23.714	146	200	2.619
4.	Momunu	1.401	2.541	-	6.818	-	-	938
5.	Tiloan	1.356	2.696	178	8.755	-	250	8.389
6.	Bokat	2.756	3.250	247	23.329	-	200	3.377
7.	Bukal	3.343	1.386	388	17.976	-	-	5.525
8.	Bunobogu	1.170	5.930	9	6.063	-	2.500	513
9.	Gadung	1.244	3.605	9	10.449	-	3.000	172
10.	Paleleh	2.199	5.868	205	14.311	-	3.000	4.098
11.	Paleleh Barat	399	3.864	208	12.258	-	-	221
<b>Total</b>		<b>18.962</b>	<b>40.295</b>	<b>1.677</b>	<b>146.798</b>	<b>7.008</b>	<b>164.850</b>	<b>31.045</b>

**Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.**

Tabel 2.32 menyajikan data ternak besar populasinya terbanyak kecuali babi. Ini mengarah pada potensi wilayah dari sisi keberadaan jumlah hewan maupun dari sisi ketersediaan bahan pakan. Potensi jenis hewan maupun kapasitas masing-masing wilayah kecamatan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah setempat. Perlu disadari bahwa ketersediaan bahan pangan dan bahkan kemakmuran hasil pertanian tanaman pangan seiring dengan ketersediaan atau bahkan kelimpahan bahan pakan ternak. Secara sepintas tampak bahwa wilayah Kabupaten Buol tergolong potensial untuk memenuhi bahan pangan pokok dan ini perlu menjadi perhatian untuk dikembangkan.



Untuk produksi telur di Kabupaten Buol Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.33.

**Tabel 2.33**  
**Produksi Telur di Di Kabupaten Buol Tahun 2013-2017**

Tahun	Ayam Buras	Ayam Petelur	Itik
2013	41.219	158.508	91.037
2014	46.071	111.567	157.068
2015	48.689	313.710	84.125
2016	71.869	322.552	86.904
2017	70.223	300.199	97.867

**Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022.**

Pada Tabel 2.33 terlihat bahwa produksi telur itik pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi pemotongan ternak itik yang cukup tinggi. Pada Tahun 2017, produksi telur itik meningkat adanya peningkatan populasi. Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 43,26 persen dan pada Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 126,30 persen. Berdasarkan hasil validasi data Tahun 2013 angka pertumbuhan mengalami penurunan, jumlah yang dicapai 2,33 persen (324 ekor/tahun).

## **F. Perikanan**

Potensi kelautan di Kabupaten Buol potensial untuk dikembangkan mengingat luas wilayah lautnya yang cukup luas yaitu ±3.777 Km<sup>2</sup> dan banyaknya jenis ikan di wilayah ini seperti: Tuna, Tongkol, Kerapu, Napoleon serta berbagai jenis ikan lainnya. Tahun 2016, jumlah produksi perikanan laut sebanyak 19.255,90 ton dan menurun pada Tahun 2017 sebesar 11.346 ton. Perikanan darat terdiri dari perikanan tambak, kolam dan sawah juga potensial untuk dikembangkan berbagai jenis ikan seperti: Nila, Mas, Lele dan berbagai jenis ikan lainnya. Pada Tahun 2016



jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 123,3 ton yang terdiri dari 70,4 ton dari produksi tambak dan 52,9 ton produksi kolam ikan. Produksi perikanan budidaya menurut kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.34.

**Tabel 2.34**  
**Produksi (ton) Perikanan Budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Jaring Apung	Mina padi	Total (ton)
1.	Lakea	-	21,5	-	-	-	21,5
2.	Biau	-	7,1	8,8	-	-	15,9
3.	Karamat	-	-	-	-	-	-
4.	Momunu	-	-	8,7	-	-	8,7
5.	Tiloan	-	-	14,3	-	-	14,3
6.	Bokat	-	29,5	2,7	-	-	32,2
7.	Bukal	-	-	6,1	-	-	6,1
8.	Bunobogu	-	-	9,1	-	-	9,1
9.	Gadung	-	5,2	2,4	-	-	7,6
10.	Paleleh	-	-	0,5	-	-	0,5
11.	Paleleh Barat	-	7,1	0,3	-	-	7,4
<b>Total</b>		-	<b>70,4</b>	<b>52,9</b>	-	-	<b>123,3</b>

Sumber: Kabupaten Buol dalam Angka Tahun 2017.

### G. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Pangan Bersih

Ketersediaan pangan terutama unsur karbohidrat sebagai salah satu sumber energi diperoleh dari rasio antara jumlah konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih sereal dan umbi-umbian utama (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Konsumsi normatif sereal dan umbi-umbian utama adalah 300 gram/kapita/hari.



### 2.3.5.2. Aspek Akses dan Konsumsi Pangan Masyarakat

#### A. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan adalah persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) dikali dengan bobot masing – masing kelompok pangan. Skor PPH untuk Kabupaten Buol Tahun 2015 adalah 82,83, tetapi jika dibandingkan dengan saran PPH ideal pada Tahun 2015 sebesar 95,0, maka skor PPH Kabupaten Buol belum mencapai skor PPH yang ditargetkan. Namun, jika didasarkan pada skor PPH Kabupaten Buol sesuai dengan prediksi, skor PPH di Kabupaten Buol dipengaruhi oleh tipe agroekologi. Skor PPH tertinggi terdapat pada tipe agroekologi pertaniannya yaitu 83,53 diikuti oleh agroekologi perikanan 81,61 dan agroekologi kota sebesar 80,20. Data mengenai pencapaian skor pola pangan harapan tersaji pada Gambar 2.7 berikut:



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2016

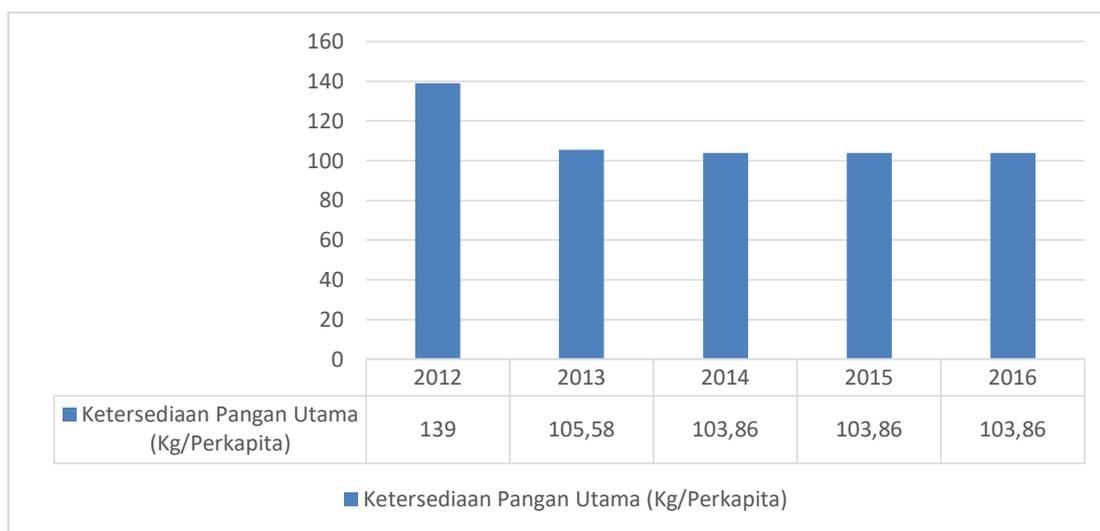
**Gambar 2.7**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan**

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa skor pola pangan harapan tercapai sebesar 75 persen pada Tahun 2012, Tahun 2013 sebesar 76 persen,



Tahun 2014 sebesar 77 persen, Tahun 2015 sebesar 78 persen dan Tahun 2016 sebesar 79 persen, setiap tahun naik sebesar 1 persen.

Adapun yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Buol dalam hal ketersediaan pangan utama dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya disajikan pada Gambar 2.8.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2016

**Gambar 2.8**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2012 – 2016**

Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama kg/perkapita mengalami penurunan. Tahun 2012 sebesar 139 kg/perkapita, Tahun 2013 menurun menjadi 105,58 kg/perkapita, Tahun 2014 hingga Tahun 2016 sebesar 103,86 kg/perkapita.

### 2.3.5.3. Persentase Daerah Berhutan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) mengkategorikan persentase daerah berhutan sebagai salah satu indikator penilaian kerawanan pangan dari kerawanan pangan transien. Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat. Indikator yang digunakan



meliputi data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, dan variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

Potensi hutan menurut kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.35.

**Tabel 2.35.**  
**Persentase Hutan terhadap Total Luas Wilayah**  
**Kabupaten Buol Tahun 2017**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas hutan (Ha)</b>	<b>Luas wilayah (Ha)</b>	<b>Persentase daerah berhutan (%)</b>
<b>Lakea</b>	8.088,60	20.855	38,78
<b>Biau</b>	0,00	21.780	0,00
<b>Karamat</b>	0,00	15.310	0,00
<b>Momunu</b>	0,00	40.040	0,00
<b>Tiloan</b>	84.086,30	143.770	58,49
<b>Bokat</b>	1.999,40	19.610	10,20
<b>Bukal</b>	20.398,20	35.552	57,38
<b>Bunobogu</b>	13.070,20	32.715	39,95
<b>Gadung</b>	13.125,70	16.038	81,84
<b>Paleleh</b>	14.335,00	38.619	37,12
<b>Paleleh Barat</b>	4.761,00	20.068	23,72
<b>Kabupaten Buol</b>	<b>159.864,4</b>	<b>404.357,0</b>	<b>39,54</b>

Sumber: Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2018.



#### 2.3.5.4. Daerah Rawan Bencana

##### 1) Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah terjadinya guncangan pada bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah atau berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Terjadinya dampak yang disebabkan oleh gempa bumi adalah patahan di permukaan, guncangan tanah, pelulukan atau pencairan tanah, tsunami, retakan tanah permukaan, longsor/gerakan tanah, dan amblesan.

Konteks perwilayahan menunjukkan dampak dari kejadian gempa bumi, sehingga perlu mengacu pada peta yang memperlihatkan daerah rawan terhadap guncangan gempa, yaitu Peta Bahaya Guncangan Gempa Bumi Indonesia, dapat juga disebut Peta Percepatan Gempa Bumi, adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai percepatan gempa bumi dalam periode ulang dan pada jenis "basement" batuan tertentu. Peta ini dibuat berdasarkan suatu metodologi probabilistik/keboleh jadian dengan mempertimbangkan rata-rata kejadian gempa di dalam daerah zona sumber gempa ataupun di sepanjang suatu patahan. Dengan banyaknya daerah patahan di Kabupaten Buol (lihat uraian pada bagian sebelumnya), maka risiko kegempaan di Kabupaten Buol menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data risiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Buol (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki risiko yang cukup tinggi yaitu antara IV-VII MMI.

Berdasarkan Peta frekuensi kejadian gempa bumi berfokus dangkal dan bersifat merusak (*Beca Carter Holling, 1979*), tampak bahwa gempa bumi berkekuatan  $\geq 6$  Ms berpeluang besar terjadi di kawasan Pulau Sumatera bagian barat, wilayah selatan Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan daratan P. Sulawesi. Sedangkan gempa bumi berkekuatan  $\geq 7$  Ms dapat terjadi pada dasar lautan di lantai Samudera Indonesia dari mulai barat laut Pulau Sumatera menerus hingga ke sebelah barat Aceh, sekitar Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, sekitar Pulau Enggano, Selat Sunda, sebelah selatan Jawa Timur, selatan



dan utara Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Laut Flores, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Sulawesi dan perairan sebelah timur Pulau Sulawesi sampai ke bagian barat Pulau Halmahera. Selanjutnya gempa bumi yang tergolong sangat besar berkekuatan  $\geq 8$  Ms dapat terjadi di kawasan Halmahera hingga Samudera Pasifik di utara Papua. Berdasarkan pada data tersebut terlihat bahwa potensi kegempaan di Kabupaten Buol masuk dalam kategori gempa besar, karena keberadaan Kabupaten Buol yang berada pada sekitar Laut Sulawesi yang memiliki risiko gempa  $\geq 7$  Ms.

Gempa bumi tektonik selalu terjadi secara tiba-tiba dan terkadang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Jika pusat gempanya di dasar laut dapat menimbulkan tsunami, yang juga dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar. Peristiwa tsunami adalah munculnya gelombang pasang beramplitudo besar dengan panjang-gelombang yang panjang. Naik-turunnya gelombang ini dapat memakan waktu sampai 1 jam. Kerusakan akibat tsunami bisa saja lebih besar dibandingkan akibat langsung dari getaran gempa itu sendiri.

Gempa juga dapat menimbulkan liquifaksi yang dapat menyebabkan miring atau ambruknya bangunan. Liquifaksi adalah peristiwa hilangnya air dalam pori-pori tanah pada saat terjadi gempa dan di atas tanah tersebut terdapat beban berat, misalnya gedung bertingkat tinggi. Ancaman gempa terbesar adalah apabila terjadi gempa di Provinsi Gorontalo yang memiliki pusat gempa dengan skala lebih dari VIII MMI yang memiliki daya rusak sangat dahsyat dan bukan tidak mungkin mampu merusak kawasan di Kabupaten Buol, baik kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

## **2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)**

Bencana alam tsunami pada dasarnya diawali oleh gempa bumi, yang menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya perubahan bentuk dasar laut. Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat;
- b. Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 Km/jam;
- c. Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas;
- d. Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai.

Wilayah Selat Makassar dan Laut Sulawesi memiliki frekuensi yang tinggi kejadian tsunami, kondisi ini dikarenakan potensi kegempaan yang besar berada pada perairan Laut Sulawesi. Selat ini memiliki aktivitas seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan *tsunamigenic* utama di Selat Makassar adalah zone patahan, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. Analisis seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

### **3) Kawasan Rawan Tanah Longsor**

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan gempa. Agen utamanya adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.

Berdasarkan pada data dari Dinas Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Sulteng, kawasan rawan longsor di Kabupaten Buol terdapat di Kecamatan Bukal, Bokat, dan Bunobogu. Lokasinya tepat berada pada lokasi sesar.

### **4) Kawasan Rawan Erosi**

Erosi senantiasa terjadi karena ketidakrataan permukaan bumi. Agen utamanya adalah air di samping angin. Pendangkalan sungai yang



intensif merupakan salah satu indikasi terjadinya erosi intensif. Indikasi menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami erosi intensif adalah Sungai Buol, Sungai Gindopo, dan Sungai Talau. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Buol sebaiknya dilakukan dengan tanpa mengubah jenis vegetasi mengingat kondisi vegetasi yang memang sudah tipis.

#### **5) Kawasan Rawan Abrasi**

Abrasi adalah pengikisan wilayah pantai sehingga wilayah darat berkurang. Abrasi dan sedimentasi di perairan dekat pantai merupakan 2 (dua) proses geologi yang terkait. Abrasi berpotensi terjadi pada wilayah pantai yang tersusun oleh formasi batuan aluvial atau batuan lepas. Agen utamanya adalah ombak dan arus susur pantai. Abrasi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia berupa pengambilan karang dari laut, pengambilan pasir di pantai dan pembabatan *mangrove*. Potensi abrasi pantai di wilayah Buol di sekitar pantai yang terdapat di Kabupaten Buol (Laut Sulawesi). Gambar dari citra satelit menggambarkan betapa Buol memiliki kerentanan terhadap abrasi yang sangat tinggi. Kerusakan daerah pantai akibat abrasi tidak terlepas dari ulah manusia yang banyak menebang hutan bakau yang kemudian dijadikan tempat bermukim sebagaimana banyak ditemui pada sepanjang pesisir Kabupaten Buol.

#### **6) Kawasan Rawan Sedimentasi**

Sedimentasi berkaitan erat dengan erosi, longsor dan abrasi. Sedimentasi di darat umumnya disebabkan oleh adanya erosi dan longsor. Umumnya terjadi di badan-badan sungai dan tempat-tempat rendah lainnya seperti drainase dan bahkan badan jalan. Di Kabupaten Buol, proses sedimentasi ini telah menyebabkan pendangkalan sungai dan muara. Kondisi lahan kering tanpa penutup vegetasi memudahkan pengikisan air sehingga menambah kuantitas sedimen. Sedimentasi akan menyebabkan pendangkalan laut dekat pantai yang dapat mengakibatkan pelayaran terganggu. Selain itu, juga dapat menutupi terumbu karang yang akan mengakibatkan potensi ikan berkurang. Kawasan rawan sedimentasi di Kabupaten Buol adalah sungai-sungai yang ada di Kota



Buol, daerah yang drainase atau badan jalannya rendah dan daerah pantai.

#### **2.3.5.5. Perkembangan Harga Beras, Harga Bahan Pokok Dan Kebutuhan Pokok Utama**

Kelompok Padi-padian masih menjadi penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein. Sementara, buah biji berminyak, daging, telur, ikan sebagai sumber protein hanya menyumbang kurang dari 20 persen dari total ketersediaan protein. Kelompok minyak dan lemak, buah biji berminyak dan padi-padian merupakan tiga kelompok penyumbang terbesar ketersediaan lemak yaitu berturut-turut sebesar 30-55 persen, 16-28 persen dan 15-20 persen. Keragaan ketersediaan energi, protein dan lemak menurut kelompok bahan makanan akan mempengaruhi harga bahan pangan tersebut.

Data harga pangan yang diamati secara periodik adalah harga dan pasokan pangan di Kabupaten Buol dari masing-masing kecamatan yang telah dipilih sebagai lokasi pelaksana panel dan responden (petani, penggilingan, dan pedagang) yang bersifat tetap. Data dan informasi baik harga maupun pasokan yang diperoleh dengan metode pengumpulan data panel yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Tujuan dari kegiatan Panel Harga Pangan adalah (1) menyediakan data/informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi pangan baik di daerah; dan (2) menyediakan hasil analisis tentang harga dan pasokan pangan secara periodik sebagai bahan perumusan kebijakan baik di Pusat dan Daerah. Komoditas yang dikumpulkan data harga disesuaikan dengan data sekunder yang tersedia dan dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) Panel Produsen sebanyak 5 (lima) komoditas yaitu: padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai merah keriting; serta (2) Panel Pedagang sebanyak 11 komoditas yaitu: beras (beras premium, beras medium, beras termurah), jagung pililan kering, kedelai biji kering, gula pasir lokal, bawang merah, cabai merah keriting, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, tepung terigu, dan daging sapi (daging sapi



murni dan sapi hidup). Perkembangan harga beras, bahan kebutuhan pokok dan pokok utama disajikan pada Tabel 2.36.

**Tabel 2.36.**  
**Perkembangan Harga Beras, Harga Kebutuhan Pokok dan Pokok Utama**

No	Jenis Kebutuhan	Rata-rata Harga Kebutuhan per Tahun (Rp per kg/butir)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Beras	7.823,2	8.900	9.662,4	10.500,0	9843,8
2	Jagung pipilan	4.304	4.800	4.119		
3	Kacang Tanah Wose	19.746	18.000	21.939		
4	Ubi kayu	5.000	5.000	5.000		
5	Sagu basah	4.138	5.800	6.208		
6	Bawang merah	44.417	23.000	31.928		
7	Cabe merah keriting	23.306	63.000	35.250		
8	Minyak goreng curah	7.122	7.000	6.938		11.197,9
9	Gula pasir	12.700	12.400	12.698		14.708,3
10	Daging sapi murni	82.833	92.000	100.181	103.750,0	100.000
11	Daging Ayam Kampung	46.917	40.000	37.969	64.166,7	66.666,7
12	Daging Ayam Ras	52.236	31.500	29.819	57.000,0	62.916,7
13	Telur Ayam Kampung	1.438	3.000	2.892	4.000,0	4.000,0
14	Telur Ayam Ras	1.355	1.500	1.506	24.583,3	25.000,0
15	Ikan Tuna/Cakalang	22.375	25.000	25.563		

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2018; Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2014-2019 (Diolah).

### 2.3.5.6. Penilaian Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Buol

Banyak faktor dapat mempengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menurut keterkaitannya dengan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu



ketersediaan pangan, akses pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Berdasarkan literatur yang ada, peta ini menetapkan sembilan indikator yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan kelengkapan ketersediaan dan kontinuitas data. Metodologi untuk menyusun peringkat dan pengelompokan kabupaten/kota ke dalam prioritas status ketahanan pangan, dimutakhirkan dengan menggunakan metode pembobotan yang diadopsi dari *Global Food Security Index (GFSI)* sebagai penyempurnaan metode yang digunakan pada atlas – atlas sebelumnya.

Bobot masing-masing indikator individu di dalam analisis komposit menggunakan rata-rata penilaian bobot ditetapkan oleh para ahli. Metode ini menghasilkan skor di masing-masing kabupaten/kota selanjutnya dikelompokkan ke dalam salah satu dari 6 kelompok prioritas. Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kabupaten/kota di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Kabupaten atau kota dipetakan dalam warna merah untuk kelompok prioritas I, 2, dan 3, dan warna hijau untuk Prioritas 4, 5 dan 6.

Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi dimanakah kabupaten atau kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi. Karena karakteristik kabupaten dan kota berbeda, maka pada penyusunan atlas 2018 ini analisis terhadap 416 kabupaten dan 98 kota dilakukan secara terpisah. Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 416 kabupaten dikelompokkan dalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: 26 kabupaten pada Prioritas 1 (6 persen), 21 kabupaten pada Prioritas 2 (11 persen), 34 kabupaten pada



Prioritas 3 (8 persen), 47 kabupaten pada Prioritas 4 (11 persen), 137 kabupaten pada Prioritas 5 (33 persen) dan 151 kabupaten pada Prioritas 6 (36 persen). Total kabupaten Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 81 kabupaten, sedangkan kabupaten prioritas 4-6 (tahan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 335 kabupaten. Kabupaten pada Prioritas 1 tersebar di Provinsi Papua (tujuh belas kabupaten), Papua Barat (enam kabupaten), Maluku (dua kabupaten) dan Nusa Tenggara Timur (satu kabupaten). Terkait dengan Kabupaten Buol, tingkat ketahanan pangan berada prioritas 4 atau kategori tahan terhadap kerawanan pangan. Hasil analisis kerentanan pangan di kabupaten disajikan pada Tabel 2.37.

**Tabel 2.37**  
**Hasil Analisis Kerentanan Pangan di Kabupaten Buol Tahun 2018**

No.	Indikator Ketahanan Pangan	Singkatan	Nilai Indikator
1.	Rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih sereal.	NCPR	1,52
2.	Persentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (%).	PROV	16,65
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran (%).	FOOD	43,08
4.	Persentase rumahtangga tanpa akses listrik (%).	ELEC	6,35
5.	Persentase rumahtangga tanpa akses ke air bersih (%).	WATER	40,02
6.	Angka harapan hidup pada saat lahir (tahun).	LIFE	67
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.	HEALTH	6,97
8.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun (tahun).	SCHOOL	8,69
9.	Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (%).	STUNTING	41,3
10.	PRIORITAS	PRIO	4

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2018.



Pola konsumsi kelompok pangan antar tipe agroekologi di Kabupaten Buol hampir sama. Dengan demikian, pengembangan pangan wilayah antar daerah agroekologi di Kabupaten Buol dapat diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan Penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan lokal sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras. Laporan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2018 menyatakan bahwa indikator kinerja persentase penanganan daerah rawan pangan, realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih di bawah target yang ditentukan daerah dan nasional. Penyebab utama terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan di Kabupaten Buol adalah ketersediaan pangan, akses terhadap listrik, akses terhadap air bersih, akses terhadap fasilitas Kesehatan dan berat badan balita. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Buol memiliki tingkat konsumsi normatif per kapita yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi bersih serealianya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan produksi pangan. Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Buol belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk mengatasi kerentanan terhadap rawan pangan. Hasil analisis kerentanan pangan berdasarkan ketersediaan pangan dan menurut kecamatan di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.38. berikut.



**Tabel 2.38.**  
**Hasil Analisis Kerentanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan Dan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2017 (jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kg)	Ketersediaan Pangan (Gram/Hari)	Ketersediaan Pangan (Gram/Kapita /Hari)	Konsumsi Normatif (300 gram : Ketersediaan Pangan)	Kategori
1.	Lakea	10.985	6.489.677,6	18.026.882,09	1641,05	0,18	Surplus tinggi
2.	Biau	39.178	1.346.449,5	3.740.137,42	95,47	3,14	Defisit tinggi
3.	Karamat	9.075	1.574.682,2	4.374.117,35	482,00	0,62	Surplus sedang
4.	Momunu	15.081	4.845.532,1	13.459.811,51	892,50	0,34	Surplus tinggi
5.	Tiloan	13.268	4.893.275,1	13.592.430,89	1 024,45	0,29	Surplus tinggi
6.	Bokat	13.420	2.263.138,6	6.286.496,05	468,44	0,64	Surplus sedang
7.	Bukal	15.045	9.995.377,6	27.764.937,66	1845,46	0,16	Surplus tinggi
8.	Bunobogu	9.416	2.238.442,1	6.217.894,61	660,35	0,45	Surplus tinggi
9.	Gadung	12.189	674.022,9	1.872.285,75	153,60	1,95	Defisit tinggi
10.	Paleleh	11.971	5.013.983,3	13.927.731,44	1163,46	0,26	Surplus tinggi
11.	Paleleh Barat	5.965	1.066.988,5	2.963.856,99	496,87	0,60	Surplus sedang
	<b>Total</b>	<b>155.593</b>	<b>40.401.569</b>	<b>112.226.582</b>	<b>721,28</b>	<b>0,42</b>	<b>Surplus tinggi</b>

Sumber: Data Sekunder Yang Telah Diolah Tahun 2018



### BAB III PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS DAN INTERVENSI

Penanggulangan kemiskinan efektif dilaksanakan dengan target mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Buol, maka diperlukan sebuah kebijakan yang lebih fokus dan tepat. Oleh karena itu, dari 11 kecamatan di Kabupaten Buol akan disusun ranking prioritas wilayah intervensi di masing-masing kecamatan berdasarkan pengamatan terhadap indikator kemiskinan utama dan indikator pendukungnya.

Dalam hal ini ada lima bidang yang akan diamati indikator utama dan pendukungnya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Ranking RTM Kabupaten Buol**

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1*)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
Lakea	102	187	298	307	894
Biau	153	309	522	681	1665
Karamat	164	216	322	339	1041
Momunu	384	379	490	516	1769
Tiloan	82	175	328	414	999
Bokat	181	296	474	519	1470
Bukal	271	341	488	404	1504
Bunobogu	197	215	264	259	935
Gadung	191	271	382	350	1194
Paleleh	132	246	362	481	1221
Paleleh Barat	112	129	233	235	709
<b>Jumlah</b>	<b>1.969</b>	<b>2.764</b>	<b>4.163</b>	<b>4.505</b>	<b>13.401</b>

Sumber: Data TNP2K Tahun 2015, data diolah kembali

Catatan: Desil 1\*), 2\*), 3\*) adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10%, 11%-20%, 21%-30% terendah di Indonesia

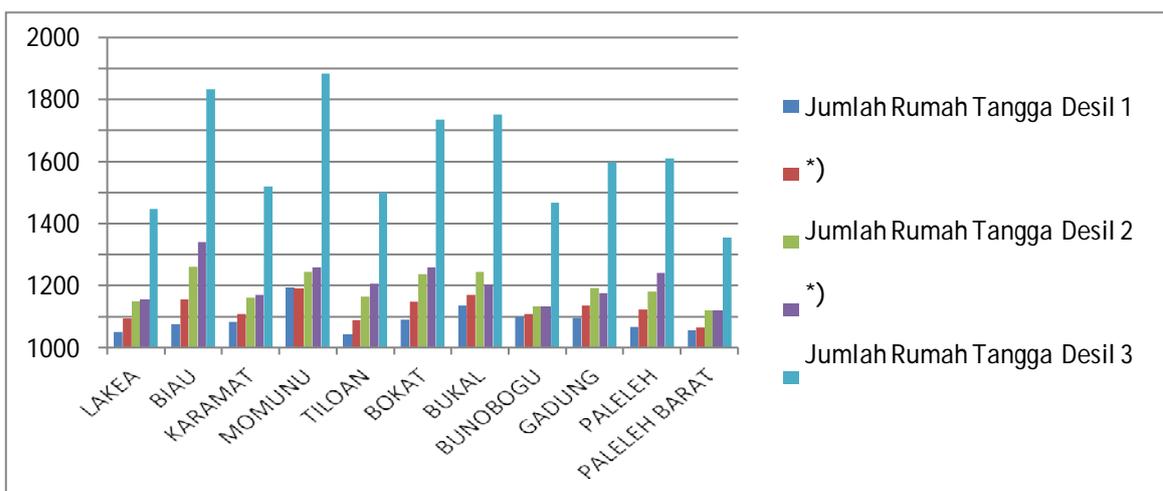
Tabel 3.1. menunjukkan bahwa Rumah Tangga Miskin (RTM) desil 1 atau RTM yang mampu menyelenggarakan hidupnya 10 persen dari total pengeluarannya terbanyak berada di Kecamatan Momunu yakni 384 RTM, sebaliknya tersedikit berada di Kecamatan Tiloan yakni 82 RTM.



RTM ini harus secepatnya ditangani karena bila tidak, mereka akan mengalami kelaparan.

Selanjutnya, RTM desil 4 atau RTM yang mengalami kemiskinan karena lemahnya akses infrastruktur terbanyak juga berada di Kecamatan Momunu yakni 1.769 RTM, sedangkan RTM desil 4 tersedikit berada di Kecamatan Paleleh Barat yakni 709 RTM.

**Grafik 3.1**  
**RTM Dikarenakan Lemahnya Infrastruktur**



Sumber: Data TNP2K Tahun 2015, data diolah kembali

**Tabel 3.2**  
**Individu Miskin Kabupaten Buol**

Kecamatan	Jumlah Individu				TOTAL
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	
Lakea	627	975	1358	1214	4174
Biau	964	1639	2420	2490	7513
Karamat	1034	1164	1496	1346	5040
Momunu	2484	1928	2146	1958	8516
Tiloan	529	862	1348	1388	4127
Bokat	1084	1482	2048	1850	6464
Bukal	1622	1557	1870	1296	6345
Bunobogu	1213	1113	1190	1058	4574
Gadung	1211	1460	1749	1459	5879
Paleleh	768	1197	1447	1519	4931
Paleleh Barat	695	676	1041	905	3317
<b>Jumlah</b>	<b>12.231</b>	<b>14.053</b>	<b>18.113</b>	<b>16.483</b>	<b>60.880</b>

Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali

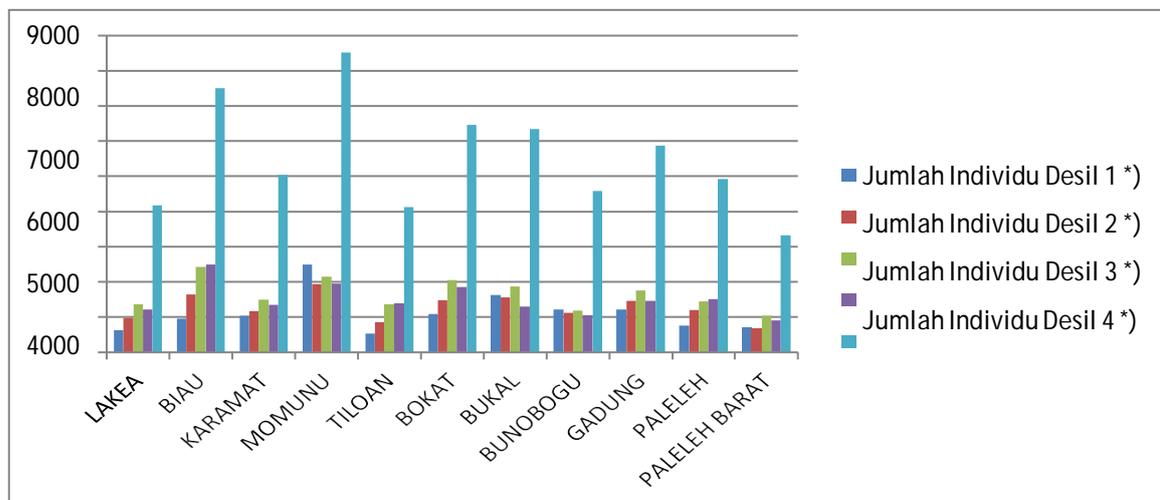
Catatan: Desil 1\*), 2\*), 3\*) adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10%, 11%-20%, 21%-30% terendah di Indonesia



Tabel 3.2. menunjukkan individu miskin di Kabupaten Buol sesuai Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K) Tahun 2015.

Data tersebut menunjukkan bahwa individu miskin terbanyak di Kecamatan Momunu mencapai 8.516 jiwa. Dari jumlah tersebut, individu terbanyak berada pada desil 1 mencapai 2.484 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penanganan RTM dan individu desil 1 sepatutnya berupa jaring pengaman sosial agar individu tidak terjerebab ke dasar kemiskinan. Sedangkan individu miskin tersedikit berada di Kecamatan Paleleh Barat mencapai 3.317 jiwa dengan individu terbanyak berada pada kategori desil 2 atau kategori penduduk yang hanya mampu menyelenggarakan hidupnya 20 persen dari total pengeluarannya.

**Grafik 3.2**  
**Individu Miskin di Kabupaten Buol**



Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali

Secara umum, individu miskin di Kabupaten Buol berada pada desil 3 dan desil 4. Kategori desil 3 adalah RTM atau individu yang hanya mampu menyelenggarakan hidupnya 30 persen dari pengeluarannya. Sedangkan, desil 4 adalah RTM atau individu yang miskin karena belum atau lemah akses pada infrastruktur. Individu yang berada pada kategori desil 3 mencapai 18.113 jiwa sedangkan desil 4 sebanyak 16.483 jiwa. Hal ini berarti strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol



ditekankan pada penguatan kelembagaan ekonomi dan perluasan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, jalan produksi, dan lain-lain.

### 3.1. Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Data BDT-TNP2K menunjukkan bahwa individu miskin yang bekerja mencapai 14.480 jiwa, sedangkan individu miskin yang tidak bekerja mencapai 17.837 jiwa. Data tabel 3.3 mengindikasikan bahwa penduduk miskin usia 5-14 tahun yang bekerja mencapai 302 orang atau proporsinya terhadap individu miskin keseluruhan mencapai 2,09 persen. Penduduk usia anak-anak seharusnya mereka masih duduk di bangku SD/MI dan/atau SMP/MTs ini atau kategori wajib belajar sembilan tahun. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bunobogu berjumlah 93 orang diikuti oleh Kecamatan Gadung 75 orang, sedangkan jumlah tersedikit berada di Kecamatan Biau dan Bokat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati perkotaan, semakin sedikit pekerja anak.

**Tabel 3.3**  
**Individu Miskin Bekerja dan Tidak Bekerja di Kabupaten Buol**

Kecamatan	Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun		Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun		Jumlah Individu Usia 60 tahun ke atas		Total	
	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja
Lakea	-	254	437	234	53	63	490	551
Biau	2	472	806	324	120	121	928	917
Karamat	13	1.055	1.295	1.118	159	153	1.467	2.326
Momunu	11	1.242	1.594	1.279	163	241	1.768	2.762
Tiloan	30	793	1.172	682	139	123	1.341	1.598
Bokat	1	928	1.324	1.168	172	198	1.497	2.294
Bukal	43	1.229	1.286	1.461	185	249	1.514	2.939
Bunobogu	93	498	1.004	350	186	122	1.283	970
Gadung	75	790	1.675	392	213	72	1.963	1.254
Paleleh	31	622	1.270	448	189	78	1.490	1.148
Paleleh Barat	3	498	661	490	75	90	739	1.078
<b>Jumlah</b>	<b>302</b>	<b>8.381</b>	<b>12.524</b>	<b>7.946</b>	<b>1.654</b>	<b>1.510</b>	<b>14.480</b>	<b>17.837</b>

Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali



Sementara penduduk miskin usia 15-59 tahun yang bekerja mencapai 12.524 jiwa atau proporsinya mencapai 86,49 persen dari penduduk miskin total bekerja. Jumlah penduduk miskin usia tersebut bekerja terbanyak di Kecamatan Gadung mencapai 1.675 jiwa, sedangkan jumlah tersedikit di Kecamatan Lakea sebanyak 437 jiwa, sedangkan tersedikit berada di Kecamatan Lakea mencapai 63 orang.

**Tabel 3.4**  
**Individu Miskin Bekerja Kabupaten Buol**

Kecamatan	Jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja																			
	Pertanian tanaman padi & palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Kehutanan/pertanian lainnya	Pertambangan/penggalan	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/konstruksi	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi & komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemas	Pemung	Lainnya	TOTAL
LAKEA	84	32	266	5	0	0	1	0	11	1	19	21	3	30	0	0	16	0	1	490
BIAJU	402	7	330	38	0	0	8	1	20	0	25	20	6	35	0	1	14	0	21	928
KARAMAT	441	3	116	405	46	2	7	10	50	1	62	135	4	67	0	2	86	0	30	1467
MOMUNU	445	19	453	158	74	4	17	7	30	3	108	107	3	135	2	4	180	0	19	1768
TILOAN	429	11	359	127	42	10	36	3	27	0	38	160	0	35	0	0	60	0	4	1341
BOKAT	930	3	30	327	38	5	5	6	29	0	22	23	0	18	1	0	43	0	17	1497
BUKAL	261	72	685	62	198	0	5	35	30	1	37	32	3	22	0	1	65	0	5	1514
BUNOBOGU	603	4	100	65	235	5	3	2	12	0	25	20	0	9	1	0	70	0	129	1283
GADUNG	1040	1	479	71	283	3	4	4	5	1	11	23	10	10	0	1	16	0	1	1963
PALELEH	997	0	21	106	248	11	0	1	10	1	24	24	0	16	0	0	23	0	8	1490
PALELEH BARAT	327	2	75	103	0	0	1	0	37	0	42	31	9	23	1	0	39	0	49	739
<b>Jumlah</b>	<b>5.959</b>	<b>154</b>	<b>2.914</b>	<b>1.467</b>	<b>1.164</b>	<b>40</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>261</b>	<b>8</b>	<b>413</b>	<b>596</b>	<b>38</b>	<b>400</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>612</b>	<b>-</b>	<b>284</b>	<b>14.480</b>

Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali

Penduduk miskin usia 18-60 tahun yang bekerja didominasi oleh Sedangkan penduduk miskin usia 60 tahun ke atas yang bekerja mencapai 1.654 jiwa, sebaliknya yang tidak bekerja mencapai 1.510 jiwa. Jumlah penduduk miskin usia 60 tahun ke atas yang bekerja berada di Kecamatan Bunobogu mencapai 189 orang, sebaliknya, jumlah terkecil berada di Kecamatan Lakea sebanyak 53 orang. Penduduk miskin usia 60 tahun ke atas yang tidak bekerja terbanyak berada di Kecamatan Bukal mencapai 249 orang penduduk miskin bekerja pada sub sektor



pertanian tanaman padi dan palawija mencapai 5.959 jiwa atau proporsinya mencapai 41,15 persen, diikuti oleh Tenaga Kerja Miskin (TKM) pekebun mencapai 2.914 jiwa atau proporsinya mencapai 20,12 persen, perikanan tangkap mencapai 1.467 jiwa atau proporsinya mencapai 10,13 persen.

### 3.2. Bidang Kesehatan

Indikator utama bidang kesehatan adalah angka individu yang memiliki penyakit kronis, pada masing-masing kecamatan. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk miskin menderita penyakit kronis di Kabupaten Buol mencapai 3.765 jiwa atau proporsinya mencapai 6,18 persen dari keseluruhan jumlah penduduk miskin yang mencapai 60.880 jiwa.

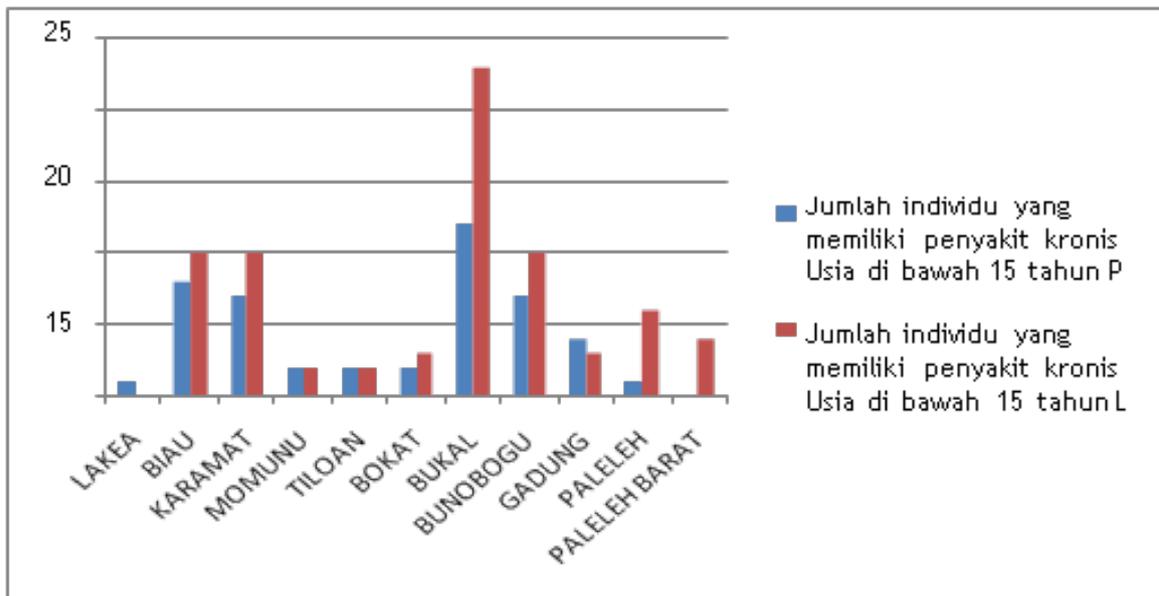
**Tabel 3.5.**  
**Jumlah Individu Memiliki Penyakit Kronis**  
**di Kabupaten Buol**

Kecamatan	Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis								
	Usia di bawah 15		Usia 15 - 44 tahun		Usia 45 - 59 tahun		Usia 60 tahun keatas		TOTAL
	P	L	P	L	P	L	P	L	
LAKEA	1	0	19	14	20	19	39	21	133
BIAU	8	10	54	59	67	48	79	71	396
KARAMAT	7	10	76	48	68	62	36	39	346
MOMUNU	2	2	39	23	63	40	47	50	266
TILOAN	2	2	17	15	39	14	50	50	189
BOKAT	2	3	42	29	101	52	118	74	421
BUKAL	12	23	202	158	164	146	153	149	1.007
BUNOBOGU	7	10	56	48	48	48	82	63	362
GADUNG	4	3	50	40	30	21	28	27	203
PALELEH	1	6	78	62	46	58	25	29	305
PALELEH BARAT	0	4	18	8	40	19	18	30	137
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>651</b>	<b>504</b>	<b>686</b>	<b>527</b>	<b>675</b>	<b>603</b>	<b>3.765</b>



Penduduk miskin yang menderita penyakit kronis terbanyak di Kecamatan Bukal mencapai 1.007 jiwa diikuti oleh penduduk miskin menderita penyakit kronis di Kecamatan Karamat mencapai 346 jiwa, sebaliknya, jumlah penduduk miskin menderita penyakit kronis tersedikit di Kecamatan Lakea mencapai 133 jiwa.

**Grafik 3.3**  
**Angka Penyakit Kronis di Umur 15 Tahun Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Buol Periode Tahun 2015, 2016-2018 data belum tersedia**

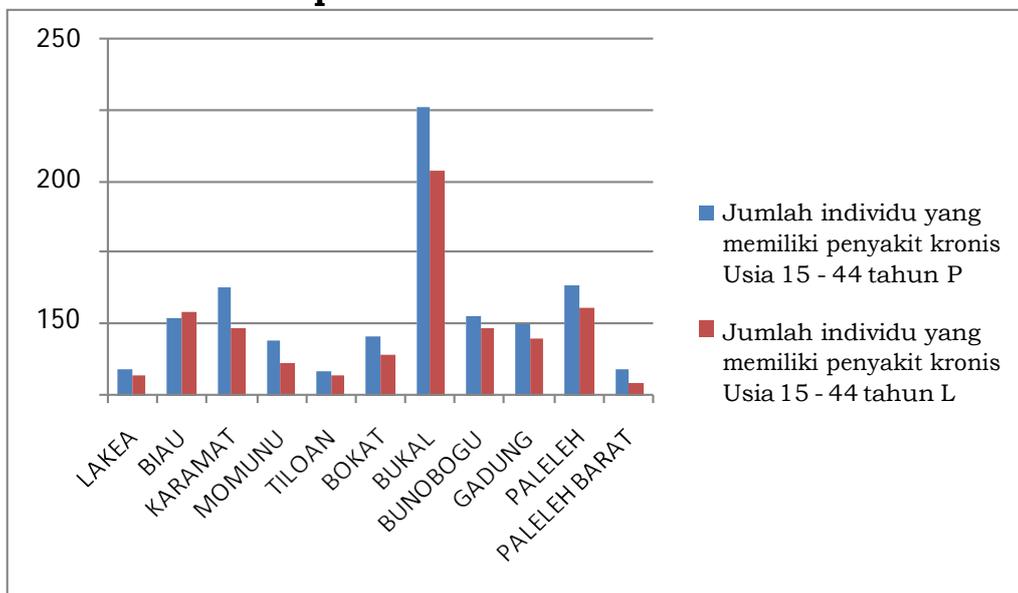


**Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali, data Periode 2016-2018 belum tersedia**

Grafik 3.3 menunjukkan bahwa sesuai Basis Data Terpadu TNP2K jumlah penduduk miskin laki-laki usia di bawah 15 tahun memiliki penyakit kronis terbanyak di Kecamatan Bukal lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan penduduk miskin perempuan usia di bawah 15 tahun lebih banyak di Kecamatan Gadung daripada perempuan. Sedangkan jumlah penduduk miskin usia di bawah 15 tahun laki-laki dan perempuan memiliki penyakit kronis di Momunu dan Tiloan sama jumlahnya. Di Kecamatan Paleleh Barat, penduduk usia di bawah 15 tahun yang memiliki penyakit kronis hanya berjenis kelamin laki-laki.



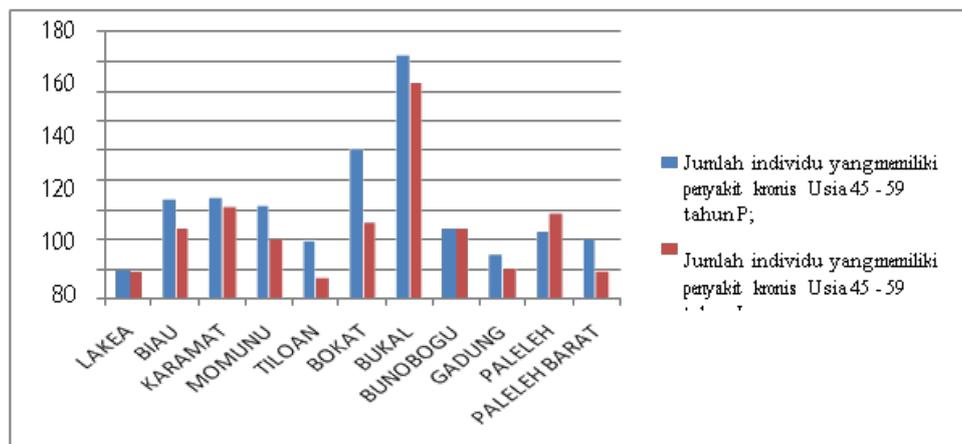
**Grafik 3.4**  
**Angka Penyakit Kronis di Umur 15-44 Tahun Laki-Laki dan Perempuan**  
**Kabupaten Buol Periode Tahun 2015**



Sumber: Data TNP2K Tahun 2015, data diolah kembali, data periode 2016-2018 belum tersedia

Grafik 3.4 menunjukkan Angka Penyakit Kronis pada usia 15-44 tahun baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Buol didominasi oleh jenis kelamin perempuan pada semua kecamatan. Konsentrasi penduduk menderita penyakit kronis usia 15-44 tahun tertinggi di Kecamatan Bukal, sedangkan tersedikit berada di Kecamatan Lakea dan Paleleh Barat.

**Grafik 3.5**  
**Angka Penyakit Kronis di Umur 45-59 Tahun Laki-Laki dan Perempuan**  
**Kabupaten Buol Periode Tahun 2015**

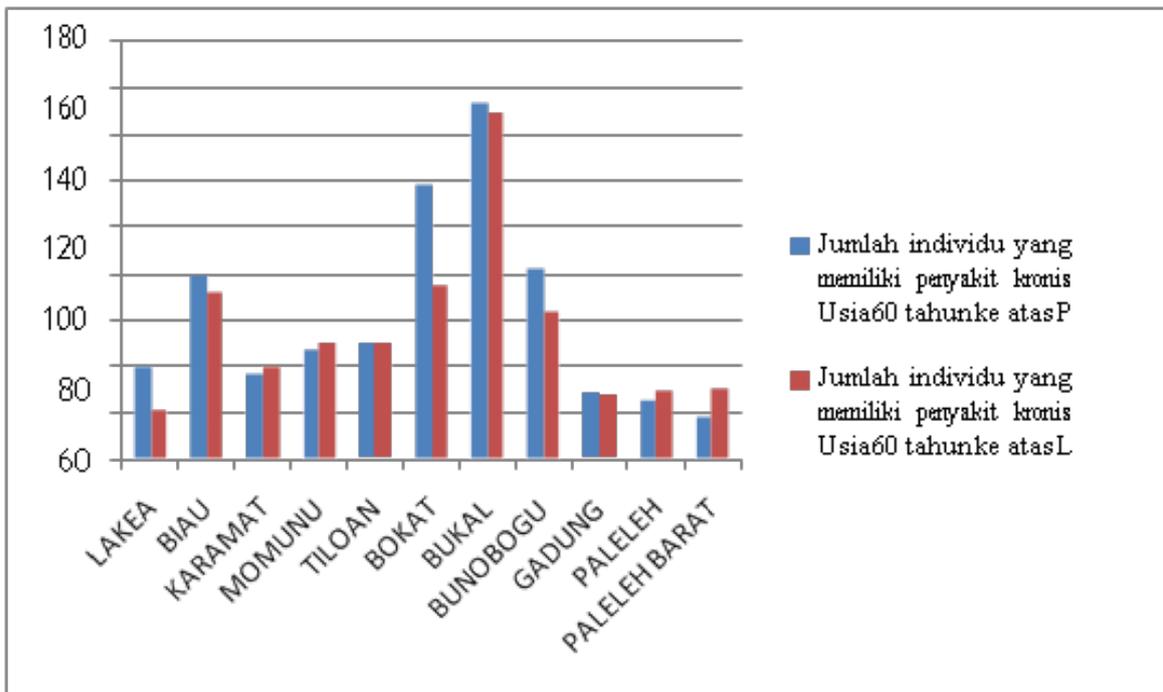


Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali



Basis Data Terpadu TNP2K menunjukkan penduduk usia 45-59 tahun memiliki penyakit kronis didominasi oleh jenis kelamin perempuan pada sepuluh kecamatan, sebaliknya, penduduk usia 45-59 tahun memiliki penyakit kronis di Kecamatan Paleleh didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

**Grafik 3.6**  
**Angka Penyakit Kronis di Umur 60 Tahun Keatas Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Buol Periode Tahun 2015**



Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali, data Periode 2016-2018 belum tersedia

Penduduk miskin berusia 60 tahun ke atas menderita penyakit kronis di Kabupaten Buol didominasi oleh jenis kelamin perempuan di kecamatan Lakea, Biau, Bokot, Bukal, dan Gadung. Sebaliknya, penduduk miskin berusia 60 tahun ke atas menderita penyakit kronis di Kabupaten Buol jenis kelamin laki-laki di Kecamatan Karamat, Momunu, Paleleh dan Paleleh Barat.

Penduduk miskin Kabupaten Buol yang menderita cacat terbanyak di Kecamatan Bukal mencapai 129 jiwa diikuti oleh Kecamatan Bokot 126 jiwa serta Kecamatan Bunobogu mencapai 98 jiwa. Sebaliknya,



jumlah penduduk miskin menderita cacat di Kecamatan Lakea mencapai 18 jiwa.

**Tabel 3.6.**  
**Jumlah Individu Rumah Tangga Miskin Menderita Cacat Tahun 2017**

Kecamatan	Jumlah Individu Yang Menderita Cacat								
	Usia di bawah 15 tahun		Usia 15 - 44 tahun		Usia 45 - 59 tahun		Usia 60 tahun ke atas		TOTAL
	P	L	P	L	P	L	P	L	
Lakea	3	1	2	5	2	0	2	3	18
Biau	3	4	8	8	10	7	17	17	74
Karamat	4	7	9	35	8	16	7	9	95
Momunu	4	4	8	16	2	9	9	8	60
Tiloan	3	5	8	5	3	4	9	7	44
Bokat	3	5	31	31	9	15	17	15	126
Bukal	6	7	17	16	16	11	34	22	129
Bunobogu	3	4	10	13	8	10	34	16	98
Gadung	3	6	11	14	6	8	12	14	74
Paleleh	1	3	9	12	1	9	7	8	50
Paleleh Barat	3	6	4	7	2	4	7	9	42

Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data periode 2016-20218 belum tersedia, data diolah kembali

### 3.3. Bidang Pendidikan

Dari sisi indikator pendidikan, secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada indikator kemiskinan pendidikan melalui APK menunjukkan bahwa Kabupaten Buol berada di atas capaian indikator kemiskinan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah maupun nasional. Namun, APK PAUD Kabupaten Buol Tahun 2018 lebih rendah dari APK PAUD Indonesia sebesar 88,85 poin, tetapi lebih tinggi dari APK PAUD Sulteng yang mencapai 34,14 poin.



**Tabel 3.7.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia, Sulteng dan Kabupaten Buol**  
**Tahun 2016-2018**

Uraian	2016				2017				2018			
	PAUD	SD-MI	SMP-MTS	SMA-MA	PAUD	SD-MI	SMP-MTS	SMA-MA	PAUD	SD-MI	SMP-MTS	SMA-MA
Indonesia	72,35	106,4	101,05	81,95	74,28	105,89	105,89	86,94	88,85	103,54	103,54	88,55
Sulawesi Tengah	90,51	108,92	108,92	81,98	91,89	106,44	106,44	91,69	34,14	104,08	104,08	91,62
Kabupaten Buol	92,39	117,1	108,39	92,39	92,39	114,39	114,39	95,63	37,23	104,92	104,92	95,63

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah

**Tabel 3.8.**  
**Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin,**  
**Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Buol,**  
**Tahun 2017**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
<b>Laki-Laki</b>			
7-12	0,00	100	0,00
13-15	0,00	88,87	11,03
16-18	0,00	61,90	38,10
19-24	0,00	12,50	87,50
7-24	0,00	70,01	29,99
Lainnya	6,44	2,77	90,79
<b>Perempuan</b>			
7-12	0,00	98,34	1,66
13-15	0,00	96,01	3,99
16-18	0,00	79,52	20,48
19-24	2,18	18,14	79,25
7-24	0,68	74,03	25,29
Lainnya	8,50	3,13	88,37
<b>Laki-Laki+Perempuan</b>			
7-12	0,00	99,25	0,75
13-15	0,00	92,62	7,38
16-18	0,00	69,87	30,13
19-24	1,28	15,27	83,44
7-24	0,32	71,92	27,76
Lainnya	7,46	2,95	89,59

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2017



Tabel 3.8 menunjukkan bahwa penduduk miskin laki-laki usia 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun, yang tidak sekolah lagi masing-masing mencapai 11,03 persen, 38,10 persen dan 87,50 persen. Sebaliknya, penduduk miskin perempuan usia 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun masing-masing mencapai 3,99 persen, 20,48 persen, 79,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin laki-laki yang tidak lagi sekolah lebih banyak daripada penduduk perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa titik kritis penduduk miskin tidak lagi bersekolah pada usia 19-24 tahun baik laki-laki maupun perempuan mencapai 83,44 persen.

**Tabel 3.9.**  
**Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Tahun 2015 (jiwa)**

Kecamatan	Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah			
	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun	TOTAL
Lakea	20	58	102	180
Biau	80	145	248	473
Karamat	46	86	153	285
Momunu	139	187	315	641
Tiloan	71	79	149	299
Bokat	53	115	197	365
Bukal	38	76	179	293
Bunobogu	36	63	141	240
Gadung	69	111	178	358
Paleleh	44	91	145	280
Paleleh Barat	19	47	97	163

**Sumber: Data TNP2K, Tahun 2015, data diolah kembali**

DT TNP2K Tahun 2015 menunjukkan bahwa anak yang tidak sekolah dari penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Momunu mencapai 641 jiwa. Dari jumlah tersebut, anak penduduk miskin yang tidak sekolah terbanyak berusia 16-18 tahun mencapai 315 jiwa.



Sedangkan anak tidak sekolah ter13sedikit di Kecamatan Paleleh Barat mencapai 163 jiwa.

### **3.4. Penentuan Wilayah Prioritas dan Intervensi Ketahanan Pangan**

#### **3.4.1. Kecamatan Prioritas**

Masalah kerawanan pangan masih menjadi isu global yang menjadi perhatian utama saat ini yang tidak hanya terjadi di negara miskin dan negara berkembang saja namun juga di negara maju. Pentingnya masalah kerawanan pangan ini menjadi poin utama yang dibahas pertemuan tingkat dunia yang tertuang dalam MDGs dan SDGs. Di negara berkembang, lebih dari setengah pendapatan rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan hal ini menyebabkan keadaan rawan jika terjadi fluktuasi harga secara tiba-tiba yang dapat mendorong orang masuk dalam kemiskinan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Kerawanan pangan menunjukkan ketidakteraturan akses terhadap jumlah dan kualitas pangan dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Flavio, Immink, & Coitinho, 2001; United Nations Human Rights & World Health Organization, 2008).

Hasil dari Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2009 dan 2015, terdapat tiga permasalahan utama yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional antara lain rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan pangan, banyaknya kasus kurang gizi dan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim (Dewan Ketahanan Pangan, 2015). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Metode pembobotan akan meningkatkan obyektifitas dan kepercayaan hasil analisis. Berikut ini disajikan pembobotan indikator dalam penentuan prioritas wilayah kecamatan yang perlu penanganan serius dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh berdasarkan keseluruhan indikator tabel 3.10.



**Tabel 3.10**  
**Bobot Indikator Kabupaten Berdasarkan Expert Judgment**

No.	Indikator Aspek	Bobot
<b>A.</b>	<b>Ketersediaan Pangan</b>	
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari.	0,30
<b>B.</b>	<b>Akses Pangan</b>	
2.	Persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan.	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.	0,075
<b>C.</b>	<b>Pemanfaatan Pangan</b>	
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	0,10
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.	0,05
8.	<i>Prevalence Balita Stunting.</i>	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir.	0,05
<b>D.</b>	<b>Transien</b>	
10.	Persentase Wilayah Berhutan.	0,10

**Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan Tahun 2018.**

Tabel berikut ini disajikan hasil analisis sementara untuk penentuan prioritas wilayah kecamatan yang memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan indikator ketersediaan pangan dan ketahanan pangan transien. Penentuan wilayah kecamatan prioritas secara keseluruhan dapat diperoleh dengan memasukkan seluruh (4) indikator aspek dalam menentukan kerentanan pangan.



**Tabel 3.11**  
**Analisis Prioritas Wilayah Yang Rentan Pangan Berdasarkan Indikator Ketersediaan Pangan dan Ketahanan Pangan Sementara Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol**

No.	Kecamatan	Rasio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan Pangan)		Harga Beras (Rp)		Ketahanan Pangan Sementara (Transien); Persentase Wilayah Berhutan (%)	
		Nilai	Prioritas	Nilai	Prioritas	Nilai	Prioritas
1.	Lakea	0,18	10	10.429	6	38,78	7
2.	Biau	3,14	1	10.429	6	0,00	1
3.	Karamat	0,62	4	10.286	9	0,00	1
4.	Momunu	0,34	7	10.400	8	0,00	1
5.	Tiloan	0,29	8	9.889	11	58,49	10
6.	Bokat	0,64	3	10.667	5	10,20	4
7.	Bukal	0,16	11	11.464	1	57,38	9
8.	Bunobogu	0,45	6	11.000	3	39,95	8
9.	Gadung	1,95	2	10.955	4	81,84	11
10.	Paleleh	0,26	9	10.250	10	37,12	6
11.	Paleleh Barat	0,60	5	11.286	2	23,72	5

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Tahun 2019

### 3.4.2. Intervensi Kebijakan

Identifikasi terhadap indikator utama pada wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan di suatu wilayah akan memudahkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menetapkan intervensi program yang akan dilaksanakan serta target kelompok masyarakat/lokasi pelaksanaan program. Ketepatan dalam pelaksanaan intervensi program berdampak positif terhadap efisiensi dalam penggunaan sumberdaya (manusia dan alam), anggaran, serta waktu



yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan. Alternatif intervensi yang dapat dilakukan di wilayah kabupaten adalah sebagai berikut

**Tabel 3.12**  
**Alternatif intervensi yang dapat dilakukan di wilayah Kecamatan Prioritas**

<b>Indikator</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Intervensi</b>
Rasio Konsumsi Normatif Terhadap ketersediaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran produksi tidak merata;</li> <li>• Keterbatasan akses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi;</li> <li>• Penganekaragaman konsumsi pangan.</li> </ul>
Proporsi pengeluaran pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya akses pangan rumah tangga;</li> <li>• Tingginya harga pangan;</li> <li>• Tingkat pendapatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan sumber pangan rumah tangga;</li> <li>• Pengendalian harga pangan;</li> <li>• Peningkatan pendapatan rumah Tangga.</li> </ul>
Presentase wilayah berhutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan hutan untuk pertanian dan pemukiman;</li> <li>• Pemanfaatan hutan untuk kebutuhan rumah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan hutan;</li> <li>• Reboisasi;</li> <li>• Optimalisasi tataruang wilayah.</li> </ul>

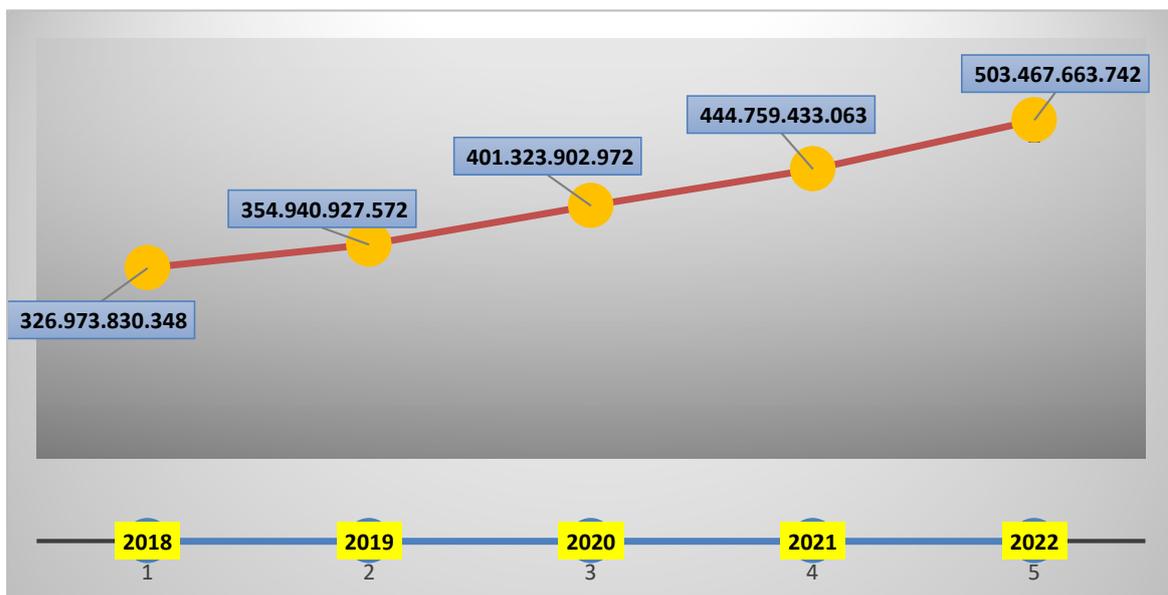
**Sumber: Data Sekunder yang Diolah Tahun 2019.**



## BAB IV ANALISIS ANGGARAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

### 4.1. Gambaran Umum Anggaran Berdasarkan Peranan Perangkat Daerah di Kabupaten Buol

Pemanfaatan anggaran yang melekat pada sejumlah Perangkat Daerah guna menunjang upaya penanggulangan kemiskinan harus tepat dan memberikan efek positif dalam rangka pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Buol. Gambaran umum anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol yang melekat pada program dan kegiatan yang pelaksanaannya direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol difokuskan pada Perangkat Daerah yang memberikan efek langsung bagi percepatan penanggulangan kemiskinan yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Buol



Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)

**Grafik 4.1**  
**Gambaran Umum Anggaran Berdasarkan Peranan Perangkat Daerah di Kabupaten Buol Periode 2018-2022**



Grafik 4.1 menunjukkan arah pergerakan anggaran ke arah positif. Rata-rata peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buol berdasarkan cakupan perencanaan pada program yang menyentuh aspek pengentasan kemiskinan mencapai 11,41 persen per tahun (kurun waktu 2018-2022). Peningkatan anggaran dari Tahun 2018 menuju Tahun 2019 mencapai 8,55 persen. Peningkatan anggaran Tahun 2020 mencapai 13,07 persen, selanjutnya pada Tahun 2021 mencapai 10,82 Persen, dan pada Tahun 2022 mencapai 13,20.

Peningkatan anggaran yang ditujukan sebagai bentuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022, menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Strategi Pengentasan Kemiskinan yang berbasis pada komitmen pelaksanaan sejumlah program yang dijabarkan hingga pada kegiatan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022.



## 4.2. Distribusi Anggaran

**Tabel 4.1**  
**Uraian Distribusi Anggaran Menurut Program, Indikator Program, Target dan Distribusi Anggaran Dan OPD Pelaksana, Kabupaten Buol Tahun 2018-2022**

Uraian Program	Indikator Program	Kondisi Awal Target	Target Indikator Program dan Distribusi Anggaran										
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>													
<b>Urusan Pendidikan</b>													
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol</b>													
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54%	57%	786,217,500.00	60%	1,214,723,611.09	63%	1,365,539,081.76	66%	1,504,653,286.51	69%	1,693,554,977.92	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs	97.44%	98%	14,651,275,500.00	98%	27,574,225,971.83	99%	30,997,737,155.96	99%	34,155,629,603.84	99%	38,443,697,998.72	
Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98.32%	98.32%	181,508,500.00	98.32%	388,711,555.55	98.32%	436,972,506.16	98.32%	481,489,051.68	98.32%	541,937,592.93	
Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase Peningkatan Pasrtisipasi Sekolah pada Berbagai Jenjang Pendidikan	100%	100%	19,578,000.00	100%	97,177,888.89	100%	109,243,126.54	100%	120,372,262.92	100%	135,484,398.23	
<b>Urusan Kesehatan</b>													
<b>Dinas Kesehatan,</b>													



Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol												
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	100%	100%	4,290,261,000.00	100%	4,630,432,965.21	100%	5,205,329,938.20	100%	5,735,622,585.63	100%	6,455,701,302.36
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	100%	100%	11,521,878,510.00	100%	12,529,406,847.05	100%	14,085,010,421.02	100%	15,519,919,937.58	100%	17,468,368,229.92
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemantauan Atas Peredaran Obat dan Makanan	100%	100%	26,295,000.00	100%	32,685,409.17	100%	36,743,505.45	100%	40,486,747.66	100%	45,569,656.25
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	306,890,000.00	100%	326,854,091.66	100%	367,435,054.46	100%	404,867,476.63	100%	455,696,562.52
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100%	100%	127,835,000.00	100%	152,531,909.44	100%	171,469,692.08	100%	188,938,155.76	100%	212,658,395.84
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Wilayah Lingkungan Bersih dan Sehat	100%	100%	121,630,000.00	100%	163,427,045.83	100%	183,717,527.23	100%	202,433,738.32	100%	227,848,281.26
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular	100%	100%	345,002,000.00	100%	381,329,773.61	100%	428,674,230.20	100%	472,345,389.40	100%	531,645,989.61
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Keterisian Database Kesehatan Daerah	100%	100%	176,352,583.00	100%	217,902,727.77	100%	244,956,702.97	100%	269,911,651.09	100%	303,797,708.35
Program Pengadaan,	Rasio Puskesmas,	0.57	0.39	7,711,574,200.00	0.39	8,716,109,110.99	0.39	9,798,268,118.97	0.39	10,796,466,043.53	0.39	12,151,908,333.86



Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk											
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0.0066	0.0067	39,327,919,000.00	0.0069	-	0.0070	-	0.0071	-	0.0073	-
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	90%	91%	86,448,000.00	92%	103,503,795.69	93%	116,354,433.91	94%	128,208,034.27	95%	144,303,911.46
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	36,940,000.00	100%	81,713,522.92	100%	91,858,763.62	100%	101,216,869.16	100%	113,924,140.63
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	305 Jiwa	303 Jiwa	284,270,000.00	302 Jiwa	326,854,091.66	300 Jiwa	367,435,054.46	299 Jiwa	404,867,476.63	297 Jiwa	455,696,562.52
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	70%	72%	7,111,146,069.00	74%	8,923,116,702.37	76%	10,030,976,986.80	78%	11,052,882,112.07	80%	12,440,516,156.79
Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	70%	72%	10,809,171,936.00	74%	11,603,320,254.00	76%	13,043,944,433.38	78%	14,372,795,420.45	80%	16,177,227,969.45
<b>BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol</b>												
Program Upaya	Cakupan	100%	100%	41,697,267,665.00	100%	43,833,021,185.49	100%	49,275,162,640.93	100%	54,295,066,616.14	100%	61,111,540,557.77



Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat											
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	7,499,467,000.00	100%	8,023,107,422.05	100%	9,019,225,972.00	100%	9,938,059,028.73	100%	11,185,732,613.49
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	816,629,576.00	100%	1,109,696,738.87	100%	1,247,472,471.92	100%	1,374,558,648.51	100%	1,547,127,609.06
<b>Rumah Sakit Pratama Kabupaten Buol</b>												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	-	-	-	100%	3,924,491,666.61	100%	4,411,741,648.76	100%	4,861,187,541.04	100%	5,471,485,313.27
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	-	100%	6,590,529,672.13	100%	7,408,784,808.83	100%	8,163,554,277.26	100%	9,188,447,669.42
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	-	100%	784,898,333.32	100%	882,348,329.75	100%	972,237,508.21	100%	1,094,297,062.65
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan</b>												



Ruang												
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol												
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0.66	0.76	47,760,500,000.00	0.77	48,125,480,665.99	0.78	54,100,557,590.00	0.79	59,612,048,360.43	0.80	67,096,042,755.89
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0.01	0.01	10,428,643,728.87	0.01	10,791,774,452.37	0.01	12,131,640,186.85	0.01	13,367,550,238.40	0.01	15,045,779,284.65
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	80%	85%	1,231,540,000.00	87.50%	1,458,347,898.97	87.50%	1,639,410,836.06	90%	1,806,425,707.89	90%	2,033,213,416.85
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	31.20%	53%	592,340,000.00	55%	729,173,949.48	58%	819,705,418.03	60%	903,212,853.95	63%	1,016,606,708.42
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	0.85%	4.85%	1,085,240,000.00	9.15%	1,312,513,109.07	14.85%	1,475,469,752.45	19.15%	1,625,783,137.10	25%	1,829,892,075.16
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62%	78%	43,024,640,000.00	80%	43,677,519,574.13	83%	49,100,354,540.01	85%	54,102,449,951.36	88%	60,894,741,834.51
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	1.5	1.4	2,212,100,000.00	1.3	2,625,026,218.14	1.2	2,950,939,504.91	1.1	3,251,566,274.21	1	3,659,784,150.32
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air	Persentase Penduduk	24.08%	33.02%	7,589,440,000.00	43.08%	7,656,326,469.59	54%	8,606,906,889.32	65%	9,483,734,966.43	75%	10,674,370,438.44



Minum dan Air Limbah	Berakses Air Minum											
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	100%	100%	1,593,818,000.00	100%	1,604,182,688.87	100%	1,803,351,919.67	100%	1,987,068,278.68	100%	2,236,534,758.53
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0%	0%	294,870,000.00	0%	364,586,974.74	0%	409,852,709.02	0%	451,606,426.97	0%	508,303,354.21
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	90%	92%	743,725,000.00	94%	875,008,739.38	96%	983,646,501.64	98%	1,083,855,424.74	100%	1,219,928,050.11
Program Bina Teknik, Perencanaan dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Bidang PUPR	100%	100%	453,295,000.00	100%	583,339,159.59	100%	655,764,334.42	100%	722,570,283.16	100%	813,285,366.74
Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas DPUPR Kabupaten Buol	100%	-	-	100%	29,166,957.98	100%	32,788,216.72	100%	36,128,514.16	100%	40,664,268.34
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>												
<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol</b>												
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0.16	0.25	1,360,224,000.00	0.25	1,675,129,343.41	0.25	1,883,107,041.42	0.25	2,074,948,448.25	0.25	2,335,447,843.67
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rasio Permukiman	0.95	0.96	805,184,202.02	0.97	979,950,665.90	0.98	1,101,617,619.23	0.99	1,213,844,842.23	1	1,366,236,988.55



	Layak Huni											
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pensertifikatan Lahan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	37,575,000.00	100%	39,414,808.08	100%	44,308,400.97	100%	48,822,316.43	100%	54,951,713.97
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	100%	40,910,000.00	100%	44,341,659.09	100%	49,846,951.10	100%	54,925,105.98	100%	61,820,678.21
<b>Urusan Sosial</b>												
<b>Dinas Sosial Kabupaten Buol</b>												
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	80%	85%	248,920,960.00	90%	373,761,111.11	95%	420,165,871.31	100%	462,970,242.00	100%	521,093,839.36
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	45.17%	52%	94,920,000.00	54%	149,504,444.44	56%	168,066,348.52	58%	185,188,096.80	60%	208,437,535.74
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Database Penduduk Miskin	100%	100%	131,980,000.00	100%	171,182,588.89	100%	192,435,969.06	100%	212,040,370.84	100%	238,660,978.43
Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat	100%	100%	67,091,000.00	100%	112,128,333.33	100%	126,049,761.39	100%	138,891,072.60	100%	156,328,151.81
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kesetiakawanan Sosial Kepada Masyarakat	100%	100%	98,613,200.00	100%	186,880,555.55	100%	210,082,935.66	100%	231,485,121.00	100%	260,546,919.68



<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>												
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>												
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol</b>												
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	100%	100%	231,587,650.00	100%	490,623,751.84	100%	651,817,321.69	100%	828,716,733.19	100%	1,057,125,702.11
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	25%	30%	39,656,250.00	35%	99,669,629.63	40%	132,415,910.96	45%	168,352,815.27	50%	214,753,824.71
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	100%	100%	26,100,000.00	100%	74,752,222.22	100%	99,311,933.22	100%	126,264,611.46	100%	161,065,368.53
Program Peningkatan Ekonomi dan SDM Masyarakat Daerah Tertinggal	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	100%	100%	81,455,000.00	100%	99,669,629.63	100%	132,415,910.96	100%	168,352,815.27	100%	214,753,824.71
<b>Urusan Pangan</b>												
<b>Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol</b>												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	100%	711,644,496.00	100%	764,511,363.63	100%	859,430,191.32	100%	946,984,585.92	100%	1,065,873,762.33
Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan	100%	100%	444,633,162.50	-	-	-	-	-	-	-	-



	Tugas DKP Kabupaten Buol											
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>												
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol</b>												
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan	100%	100%	236,951,000.00	100%	350,757,813.63	100%	394,306,571.78	100%	434,476,528.02	100%	489,022,882.15
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDES	100%	100%	84,546,000.00	100%	125,214,219.51	100%	140,760,341.50	100%	155,100,292.10	100%	174,572,357.71
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	60%	65%	89,938,000.00	70%	133,114,170.26	75%	149,641,120.14	80%	164,885,799.48	85%	185,586,386.58
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%	100%	872,895,600.00	100%	1,067,283,347.33	100%	1,199,793,194.75	100%	1,322,022,048.09	100%	1,487,995,301.33
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Peningkatan Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan	100%	100%	73,530,500.00	100%	109,019,320.45	100%	122,554,745.28	100%	135,040,001.95	100%	151,993,598.51



	Keuangan Desa											
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembangunan Perdesaan	100%	100%	23,261,500.00	100%	34,364,785.79	100%	38,631,387.10	100%	42,566,957.14	100%	47,911,025.62
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>												
<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol</b>												
Program Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	2%	2%	3,317,726,000.00	2%	3,444,208,638.84	2%	3,871,828,504.13	2%	4,266,270,780.07	2%	4,801,879,729.69
Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	97%	97%	16,150,000.00	98%	106,521,916.67	99%	119,747,273.32	99%	131,946,518.97	100%	148,511,744.22
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli KB	100%	100%	49,885,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesehatan Reproduksi	100%	100%	25,474,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Konseling KRR	100%	100%	26,803,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang	Persentase Ketersediaan	100%	100%	13,770,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-



Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Bahan Informasi Tentang Tumbuh Kembang Anak											
<b>Urusan Perhubungan</b>												
<b>Dinas Perhubungan Kabupaten Buol</b>												
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	6,731,300,000.00	100%	6,828,615,499.90	100%	7,676,430,468.85	100%	8,458,466,321.41	100%	9,520,384,445.09
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>												
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buol</b>												
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	6.12%	-	-	10%	163,520,486.11	15%	217,244,853.92	20%	276,203,837.56	25%	352,330,493.66
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase BPR/LKM Aktif	100%	-	-	100%	174,421,851.85	100%	231,727,844.18	100%	294,617,426.73	100%	375,819,193.23
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	47.01%	50%	91,417,500.00	55%	207,125,949.07	60%	275,176,814.96	65%	349,858,194.24	70%	446,285,291.97
<b>Urusan Pariwisata</b>												
<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Buol</b>												
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata	85.57%	87.28%	444,136,600.00	89.02%	210,240,625.00	90.80%	279,314,812.18	92.62%	355,119,219.72	94.47%	452,996,348.99
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Fasilitas Pariwisata Daerah Dalam Kondisi	100%	100%	2,025,789,963.00	100%	2,125,766,319.41	100%	2,824,183,100.91	100%	3,590,649,888.27	100%	4,580,296,417.55



	Baik											
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Pariwisata	100%	100%	28,630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Urusan Pertanian</b>												
<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol</b>												
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani	100%	-	-	100%	1,406,700,909.07	100%	1,581,351,552.02	100%	1,742,451,638.09	100%	1,961,207,722.68
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	48.06%	50%	-	50%	914,355,590.90	50%	1,027,878,508.82	50%	1,132,593,564.76	50%	1,274,785,019.74
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	35%	40%	4,440,289,470.00	45%	4,571,777,954.48	50%	5,139,392,544.08	55%	5,662,967,823.78	60%	6,373,925,098.71
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Bina Kelompok Petani	67.26%	70%	-	72%	703,350,454.54	75%	790,675,776.01	77%	871,225,819.04	80%	980,603,861.34
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Tani	100%	100%	638,016,590.00	100%	1,266,030,818.16	100%	1,423,216,396.82	100%	1,568,206,474.28	100%	1,765,086,950.41
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Pencegahan Penyakit Ternak	100%	-	-	100%	3,516,752,272.68	100%	3,953,378,880.06	100%	4,356,129,095.22	100%	4,903,019,306.70
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak Sapi Potong per Hektar Lahan	52%	57.52%	30,847,527,787.00	63.05%	50,641,232,726.56	73.62%	56,928,655,872.89	81.91%	62,728,258,971.16	97.18%	70,603,478,016.45
Program Peningkatan Penerapan Teknologi	Persentase Peningkatan Nilai	100%	-	-	100%	2,039,716,318.15	100%	2,292,959,750.44	100%	2,526,554,875.23	100%	2,843,751,197.88



Peternakan	Tambah Agribisnis Peternakan											
<b>Urusan Perdagangan</b>												
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol</b>												
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Daerah	35%	40%	55,755,000.00	45%	85,739,241.55	50%	113,908,718.40	55%	144,822,878.83	60%	184,738,622.17
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	75%	80%	2,129,810,000.00	85%	2,317,786,090.25	90%	3,079,290,629.37	95%	3,914,992,108.95	100%	4,994,033,082.96
<b>Urusan Perindustrian</b>												
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol</b>												
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	44%	50%	297,770,700.00	55%	376,875,787.03	60%	500,697,663.31	65%	636,584,082.76	70%	812,037,899.67
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Teknologi Industri	100%	100%	113,413,700.00	100%	188,437,893.52	100%	250,348,831.66	100%	318,292,041.38	100%	406,018,949.83
Program Pengembangan Sentra Dan Pertumbuhan Sentra Baru	Persentase Peningkatan Kapasitas Industri Skala Menengah Daerah	100%	100%	4,659,000,000.00	100%	4,710,947,337.90	100%	6,258,720,791.40	100%	7,957,301,034.44	100%	10,150,473,745.85



<b>Urusan Transmigrasi</b>												
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol</b>												
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Transmigran Swakarsa	30%	32%	273,838,000.00	34%	297,309,974.74	36%	334,222,852.18	38%	368,271,783.41	40%	414,506,463.13
<b>Total</b>				<b>326,973,830,348.39</b>		<b>354,940,927,571.63</b>		<b>401,323,902,971.77</b>		<b>444,759,433,062.81</b>		<b>503,467,663,742.06</b>

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)



Jurang anggaran penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk mengetahui berapa persen keberpihakkan anggaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. Tabel 4.2 menyajikan jurang akumulasi anggaran sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Jurang Akumulasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan**  
**di Kabupaten Buol Periode 2018 – 2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Total Anggaran Kemiskinan Per Kegiatan	326,973,830,348.39	354,940,927,571.63	401,323,902,971.77	444,759,433,062.81	503,467,663,742.06
Total Anggaran Belanja Langsung	522,475,968,234.99	566,304,713,796.73	636,614,956,531.73	701,470,063,642.37	789,536,120,241.18
Keberpihakkan Anggaran Berbasis Program/Kegiatan	62.58 %	62.68 %	63.04 %	63.40 %	63.77 %
Rata-Rata Keberpihakan Anggaran 2016-2021	63.09 %	63.22 %	63.40 %	63.59 %	63.77 %
Jurang Akumulasi Anggaran Berbasis Program/Kegiatan	37.42 %	37.32 %	36.96 %	36.60 %	36.23 %

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 menunjukkan komitmen keberpihakkan anggaran, yang ditunjukkan oleh semakin berkurangnya secara relatif jurang akumulasi anggaran. Jurang anggaran yang relatif semakin berkurang, yaitu dari 37,42 persen pada Tahun 2018 menjadi 36,23 persen pada Tahun 2022, memberikan arti bahwa arah pemanfaatan anggaran pada setiap Tahun (sejak 2018-2022) telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol berpihak pada Pengentasan Kemiskinan, walaupun masih membutuhkan penajaman prioritas dan target yang terkait dengan kelompok sasaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buol.



### 4.3. Analisis Gap Budgeting (Jurang Anggaran) Kemiskinan dan Kesejahteraan

**Tabel 4.3**  
**Gap Budgeting (Jurang Anggaran) Kemiskinan dan Kesejahteraan di Kabupaten Buol Periode 2018 – 2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Kesejahteraan	522,475,968,235	566,304,713,797	636,614,956,532	701,470,063,642	789,536,120,241
Pengentasan Kemiskinan	326,973,830,348	354,940,927,572	401,323,902,972	444,759,433,063	503,467,663,742
Gap / Jurang Absolut	195,502,137,887	211,363,786,225	235,291,053,560	256,710,630,580	286,068,456,499

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**

Data dalam Tabel 4.3. menunjukkan bahwa anggaran Kesejahteraan meningkat dari 522,476 milyar rupiah di Tahun 2018 menjadi 789,536 milyar rupiah di Tahun 2022, rata-rata meningkat sebesar 10,89 persen per tahun. Di lain pihak, anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan meningkat dari 326,974 milyar rupiah di Tahun 2018 menjadi 503,468 milyar rupiah di Tahun 2022, rata-rata meningkat sebesar 11,41 persen per tahun. Itulah sebabnya gap/jurang absolut meningkat dari 195,502 milyar rupiah di Tahun 2018 menjadi 286,068 milyar rupiah di Tahun 2022, rata-rata meningkat hanya 9,99 persen per tahun, 1,42 persen point lebih rendah daripada rata-rata peningkatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, secara relatif gap/jurang budgeting menjadi mengecil dari 37,42 persen pada Tahun 2018 menjadi 36,23 persen pada Tahun 2022.

### 4.4. Analisis Jurang Anggaran pada Urusan Kesehatan

Aspek kesehatan menjadi bagian penting dalam pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun regional. Urusan kesehatan menjadi bagian penting pada Urusan Wajib yang Terkait dengan Layanan Dasar, dengan syarat keberpihakkan anggaran untuk kesehatan minimal 10 persen wajib dari Anggaran Pendapatan dan



---

Belanja Daerah (APBD). Pertimbangan inilah yang menjadikan aspek kesehatan menjadi bagian sangat penting dalam program besar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buol. Alokasi dan Jurang Anggaran untuk urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.4**  
**Alokasi Anggaran Menurut Program, Indikator Target, pada Urusan Kesehatan**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Urusan/Program	Indikator Target	Kondisi Awal Target	Target dan Alokasi Anggaran Penanganan Kemiskinan									
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
II	Urusan Kesehatan												
2-a	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol												
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	100%	100%	4,290,261,000.00	100%	4,630,432,965.21	100%	5,205,329,938.20	100%	5,735,622,585.63	100%	6,455,701,302.36
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	100%	100%	11,521,878,510.00	100%	12,529,406,847.05	100%	14,085,010,421.02	100%	15,519,919,937.58	100%	17,468,368,229.92
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemantauan Atas Peredaran Obat dan Makanan	100%	100%	26,295,000.00	100%	32,685,409.17	100%	36,743,505.45	100%	40,486,747.66	100%	45,569,656.25
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	306,890,000.00	100%	326,854,091.66	100%	367,435,054.46	100%	404,867,476.63	100%	455,696,562.52
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100%	100%	127,835,000.00	100%	152,531,909.44	100%	171,469,692.08	100%	188,938,155.76	100%	212,658,395.84
	Program Pengembangan	Cakupan Wilayah	100%	100%		100%		100%		100%		100%	



	Lingkungan Sehat	Lingkungan Bersih dan Sehat			121,630,000.00		163,427,045.83		183,717,527.23		202,433,738.32		227,848,281.26
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular	100%	100%	345,002,000.00	100%	381,329,773.61	100%	428,674,230.20	100%	472,345,389.40	100%	531,645,989.61
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Keterisian Database Kesehatan Daerah	100%	100%	176,352,583.00	100%	217,902,727.77	100%	244,956,702.97	100%	269,911,651.09	100%	303,797,708.35
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0.57	0.39	7,711,574,200.00	0.39	8,716,109,110.99	0.39	9,798,268,118.97	0.39	10,796,466,043.53	0.39	12,151,908,333.86
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0.0066	0.0067	39,327,919,000.00	0.0069	-	0.0070	-	0.0071	-	0.0073	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	90%	91%	86,448,000.00	92%	103,503,795.69	93%	116,354,433.91	94%	128,208,034.27	95%	144,303,911.46
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	36,940,000.00	100%	81,713,522.92	100%	91,858,763.62	100%	101,216,869.16	100%	113,924,140.63
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	305 Jiwa	303 Jiwa	284,270,000.00	302 Jiwa	326,854,091.66	300 Jiwa	367,435,054.46	299 Jiwa	404,867,476.63	297 Jiwa	455,696,562.52
	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	70%	72%	7,111,146,069.00	74%	8,923,116,702.37	76%	10,030,976,986.80	78%	11,052,882,112.07	80%	12,440,516,156.79
	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	70%	72%	10,809,171,936.00	74%	11,603,320,254.00	76%	13,043,944,433.38	78%	14,372,795,420.45	80%	16,177,227,969.45



<b>2-b</b>	<b>BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol</b>												
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	100%	100%	41,697,267,665.00	100%	43,833,021,185.49	100%	49,275,162,640.93	100%	54,295,066,616.14	100%	61,111,540,557.77
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	7,499,467,000.00	100%	8,023,107,422.05	100%	9,019,225,972.00	100%	9,938,059,028.73	100%	11,185,732,613.49
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	816,629,576.00	100%	1,109,696,738.87	100%	1,247,472,471.92	100%	1,374,558,648.51	100%	1,547,127,609.06
<b>2-c</b>	<b>Rumah Sakit Pratama Kabupaten Buol</b>												
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	-	-	-	100%	3,924,491,666.61	100%	4,411,741,648.76	100%	4,861,187,541.04	100%	5,471,485,313.27
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	-	100%	6,590,529,672.13	100%	7,408,784,808.83	100%	8,163,554,277.26	100%	9,188,447,669.42
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	-	100%	784,898,333.32	100%	882,348,329.75	100%	972,237,508.21	100%	1,094,297,062.65



**Tabel 4.5**  
**Jurang Anggaran pada Urusan Kesehatan**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun Alokasi dan Jurang Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Total Anggaran Program Inti Kesehatan	132,296,977,539	112,454,933,266	126,416,910,735	139,295,625,258	156,783,494,026
Total Anggaran (Urusan Wajib dan Rutin)	143,817,023,348	123,042,157,776	138,318,604,836	152,409,803,668	171,544,091,917
Jurang Anggaran Urusan Kesehatan	8,01%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**

Jurang anggaran pada Urusan Kesehatan adalah selisih antara Total Anggaran (Urusan Wajib dan Rutin) Urusan Kesehatan dengan Total Anggaran Program Inti Kesehatan. Total anggaran program inti kesehatan mencerminkan alokasi anggaran yang berbasis pada pemanfaatan anggaran pada urusan kesehatan yang didasarkan pada program inti yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan yang diarahkan untuk penanganan masalah kemiskinan. Jurang anggaran yang relatif semakin mengecil merupakan akibat dari alokasi anggaran yang pemanfaatannya berkaitan dengan sejumlah program dan kegiatan untuk mencapai target indikator pada Urusan Kesehatan secara langsung. Tabel 4.5. menunjukkan bahwa jurang anggaran relatif sangat kecil, yaitu 8,01 persen pada Tahun 2018 untuk kemudian meningkat sedikit menjadi 8,60 persen pada Tahun 2019 yang tetap bertahan sampai dengan Tahun 2022.



#### 4.5. Analisis Jurang Anggaran Pendidikan

Aspek pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan diyakini akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. Alokasi dan Jurang Anggaran untuk Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan 4.7 berikut.



**Tabel 4.6**  
**Alokasi Anggaran Menurut Program, Target, pada Urusan Pendidikan**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Urusan/Program	Indikator Target	Kondisi Awal Target	Target dan Alokasi Anggaran Penanganan Kemiskinan									
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
I	Urusan Pendidikan												
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol												
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54%	57%	786,217,500.00	60%	1,214,723,611.09	63%	1,365,539,081.76	66%	1,504,653,286.51	69%	1,693,554,977.92
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs	97.44%	98%	14,651,275,500.00	98%	27,574,225,971.83	99%	30,997,737,155.96	99%	34,155,629,603.84	99%	38,443,697,998.72
	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98.32%	98.32%	181,508,500.00	98.32%	388,711,555.55	98.32%	436,972,506.16	98.32%	481,489,051.68	98.32%	541,937,592.93
	Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Berbagai Jenjang Pendidikan	100%	100%	19,578,000.00	100%	97,177,888.89	100%	109,243,126.54	100%	120,372,262.92	100%	135,484,398.23

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**



**Tabel 4.7**  
**Jurang Anggaran pada Urusan Pendidikan**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Kabupaten Buol**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun Alokasi dan Jurang Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Total Anggaran (Urusan Wajib dan Rutin)	29,296,365,147	47,325,631,888	53,201,402,625	58,621,292,043	65,980,901,940
Total Anggaran Program Inti Pendidikan	15,638,579,500	29,274,839,027	32,909,491,870	36,262,144,205	40,814,674,968
Jurang Anggaran Urusan Pendidikan	46,62 %	38,14 %	38,14 %	38,14 %	38,14 %

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**

Jurang anggaran pendidikan Tahun 2018 sebesar 46,62 persen, kemudian menurun menjadi 38,14 persen pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022. Walaupun jurang anggaran pendidikan mengalami penurunan namun jurang anggaran tersebut tetap masih relatif besar, terutama bila melihat bahwa target angka partisipasi kasar pada jenjang PAUD belum maksimal, yaitu 57 persen pada Tahun 2018 dan meningkat secara konsisten menjadi 69 persen pada Tahun 2022. Alasan dari masih relatif besarnya jurang anggaran pendidikan adalah untuk menutupi kebutuhan sejumlah anggaran yang melekat pada belanja untuk program dan kegiatan non urusan (pembiayaan rutin) demi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi pelayanan pada aspek pendidikan sebagaimana terjabarkan pada Urusan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar. Peluang untuk meningkatkan kemanfaatan anggaran pendidikan terletak pada angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan PAUD. Bila nantinya capaian angka partisipasi kasar PAUD diakhir periode, Tahun



---

2022, jauh melampaui 69 persen, maka berarti kemanfaatan anggaran pendidikan menjadi lebih besar dari pada yang direncanakan. Untuk itu, koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan membangun PAUD perlu diwujudkan secara baik.



#### 4.6. Analisis Jurang Anggaran Infrastruktur Dasar

**Tabel 4.8.**  
**Alokasi Anggaran Menurut Program, Target pada Urusan Infrastruktur Dasar dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022**

No.	Urusan/Program	Indikator Target	Kondisi Awal Target	Target dan Alokasi Anggaran Penanganan Kemiskinan									
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
III	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol												
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0.66	0.76	47,760,500,000.00	0.77	48,125,480,665.99	0.78	54,100,557,590.00	0.79	59,612,048,360.43	0.80	67,096,042,755.89
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0.01	0.01	10,428,643,728.87	0.01	10,791,774,452.37	0.01	12,131,640,186.85	0.01	13,367,550,238.40	0.01	15,045,779,284.65
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	80%	85%	1,231,540,000.00	87.50%	1,458,347,898.97	87.50%	1,639,410,836.06	90%	1,806,425,707.89	90%	2,033,213,416.85
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	31.20%	53%	592,340,000.00	55%	729,173,949.48	58%	819,705,418.03	60%	903,212,853.95	63%	1,016,606,708.42
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	0.85%	4.85%	1,085,240,000.00	9.15%	1,312,513,109.07	14.85%	1,475,469,752.45	19.15%	1,625,783,137.10	25%	1,829,892,075.16



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62%	78%	43,024,640,000.00	80%	43,677,519,574.13	83%	49,100,354,540.01	85%	54,102,449,951.36	88%	60,894,741,834.51
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	1.5	1.4	2,212,100,000.00	1.3	2,625,026,218.14	1.2	2,950,939,504.91	1.1	3,251,566,274.21	1	3,659,784,150.32
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	24.08%	33.02 %	7,589,440,000.00	43.08%	7,656,326,469.59	54%	8,606,906,889.32	65%	9,483,734,966.43	75%	10,674,370,438.44
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	100%	100%	1,593,818,000.00	100%	1,604,182,688.87	100%	1,803,351,919.67	100%	1,987,068,278.68	100%	2,236,534,758.53
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0%	0%	294,870,000.00	0%	364,586,974.74	0%	409,852,709.02	0%	451,606,426.97	0%	508,303,354.21
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	90%	92%	743,725,000.00	94%	875,008,739.38	96%	983,646,501.64	98%	1,083,855,424.74	100%	1,219,928,050.11
Program Bina Teknik, Perencanaan dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Bidang PUPR	100%	100%	453,295,000.00	100%	583,339,159.59	100%	655,764,334.42	100%	722,570,283.16	100%	813,285,366.74
Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas DPUPR Kabupaten Buol	100%	-	-	100%	29,166,957.98	100%	32,788,216.72	100%	36,128,514.16	100%	40,664,268.34

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**



**Tabel 4.9**  
**Jurang Anggaran pada Urusan Infrastruktur Dasar**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Total Anggaran (Urusan Wajib dan Rutin)	142,359,499,585	145,834,789,897	163,941,083,606	180,642,570,789	203,321,341,685
Total Anggaran Program Inti Kesehatan	117,010,151,729	119,832,446,858	134,710,388,399	148,434,000,417	167,069,146,462
Jurang Anggaran Urusan Pendidikan	17,81 %	17,83 %	17,83 %	17,83 %	17,83 %

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**

Jurang anggaran pada urusan Infrastruktur Dasar dalam rangka penanganan kemiskinan Kabupaten Buol pada periode Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin, yaitu dari 17,81 persen pada Tahun 2018 menjadi 17,83 persen pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022. Namun demikian, angka tersebut masih dapat dibenarkan mengingat pembangunan infrastruktur harus didukung oleh kegiatan-kegiatan studi lapang, penyiapan masyarakat, dan tugas-tugas layanan administratif lainnya. Peluang untuk meningkatkan kemanfaatan anggaran pada urusan Infrastruktur Dasar akan terwujud dengan cara meningkatkan capaian target yang diberikan selama periode perencanaan di mana tujuh dari tigabelas program yang termasuk di dalamnya target akhirnya masih di bawah 80 persen. Alokasi anggaran yang cukup besar pada infrastruktur dasar masih diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penata ruang di Kabupaten Buol, secara khusus diprioritaskan pada peningkatan



---

jalan dan jembatan, serta pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya guna menunjang aktivitas sektor-sektor ekonomi yang memberikan sumbangan dalam percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buol, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan.



#### 4.7. Analisis Jurang Anggaran Urusan Pangan

**Tabel 4.10**  
**Alokasi Anggaran Menurut Program, dan Target pada Urusan Pangan**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol Tahun 2018-2022**

No.	Urusan/Program	Indikator Target	Kondisi Awal Target	Target dan Alokasi Anggaran Penanganan Kemiskinan									
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
VI	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
VII	Urusan Pangan												
7a	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol												
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	100%	711,644,496.00	100%	764,511,363.63	100%	859,430,191.32	100%	946,984,585.92	100%	1,065,873,762.33
7b	Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas DKP Kabupaten Buol	100%	100%	444,633,162.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol												
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	48.06%	50%	-	50%	914,355,590.90	50%	1,027,878,508.82	50%	1,132,593,564.76	50%	1,274,785,019.74
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	35%	40%	4,440,289,470.00	45%	4,571,777,954.48	50%	5,139,392,544.08	55%	5,662,967,823.78	60%	6,373,925,098.71
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Bina Kelompok Petani	67.26%	70%	-	72%	703,350,454.54	75%	790,675,776.01	77%	871,225,819.04	80%	980,603,861.34



Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Tani	100%	100%	638,016,590.00	100%	1,266,030,818.16	100%	1,423,216,396.82	100%	1,568,206,474.28	100%	1,765,086,950.41
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Pencegahan Penyakit Ternak	100%	-	-	100%	3,516,752,272.68	100%	3,953,378,880.06	100%	4,356,129,095.22	100%	4,903,019,306.70
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak Sapi Potong per Hektar Lahan	52%	57.52%	30,847,527,787.00	63.05%	50,641,232,726.56	73.62%	56,928,655,872.89	81.91%	62,728,258,971.16	97.18%	70,603,478,016.45
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis Peternakan	100%	-	-	100%	2,039,716,318.15	100%	2,292,959,750.44	100%	2,526,554,875.23	100%	2,843,751,197.88

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)



**Tabel 4.11**  
**Jurang Anggaran pada Urusan Pangan**  
**dalam Rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Buol**  
**Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Total Anggaran (Urusan Wajib dan Rutin)	40,645,047,433	71,099,556,817	79,927,007,793	88,069,566,490	99,126,259,896
Total Anggaran Program Inti Ketahanan Pangan	37,082,111,506	64,910,072,817	72,969,060,964	80,402,779,283	90,496,945,916
<b>Jurang Anggaran Urusan Pangan</b>	<b>8,77%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,71%</b>

**Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali)**

Jurang anggaran yang tercipta pada bidang ketahanan pangan yang dikelompokkan pada urusan pangan; pertanian dan ketahanan pangan Tahun 2018 sebesar 8,77 persen kemudian sedikit menurun menjadi 8,71 persen pada setiap tahun dalam periode 2019 – 2022. Sedikit penurunan persentase jurang anggaran pada Urusan Pangan yaitu Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi lebih berarti bila dibandingkan dengan rata-rata kenaikan Total Anggaran (Urusan Wajib dan Rutin) yang sebesar rata-rata 27,36 persen per tahun selama periode 2019-2022. Lompatan terbesar Total Anggaran terjadi pada Tahun 2019 yang meningkat dari 40,645 milyar rupiah pada Tahun 2018 menjadi 71,099 milyar rupiah pada Tahun 2019, meningkat sebesar 74,28 persen. Alokasi anggaran pada Tahun 2019-2023 tidak lagi ditunjukkan pada pembiayaan program dan kegiatan yang masuk dalam kelompok non urusan (urusan yang terkait dengan pembiayaan rutin), namun lebih ditujukan pada program yang berkaitan langsung dengan program inti



---

dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Buol, sehingga jurang anggaran dalam alokasi pembiayaan berkisar 8,77 menjadi 8,71 persen.



## BAB V TARGET DAN PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Target dan Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buol dikaji melalui data-data pada Bab III dan dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.

### 5.1. Target dan Prioritas RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Target dan Capaian Prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dapat dikaji melalui Bab VII dokumen RPJMD dan diukur keberhasilannya melalui indikator kinerja program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Tabel 5.1 di bawah ini lebih fokus pada program dan kegiatan parsial artinya masing-masing OPD tanpa program dan kegiatan bersama lintas OPD

**Tabel 5.1  
Target Capaian Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
Berdasarkan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja  
Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol Periode 2018-2022				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
			Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>							
<b>Urusan Pendidikan</b>							
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol</b>							
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54%	57%	60%	63%	66%	69%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs	97.44%	98%	98%	99%	99%	99%
Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98.32%	98.32%	98.32%	98.32%	98.32%	98.32%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	64.27%	68.45%	68.93%	69%	69.25%	69.76%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Keterisian Database Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase Peningkatan Pasrtisipasi Sekolah pada Berbagai Jenjang Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Kepengawasan Pendidikan	Persentase Pengawasan Tenaga Pendidik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas	100%	-	100%	100%	100%	100%



Disdikbud Kabupaten Buol							
<b>Urusan Kesehatan</b>							
<b>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol</b>							
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemantauan Atas Peredaran Obat dan Makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Wilayah Lingkungan Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Keterisian Database Kesehatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0.57	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0.0066	0.0067	0.0069	0.0070	0.0071	0.0073
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	90%	91%	92%	93%	94%	95%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	305 Jiwa	303 Jiwa	302 Jiwa	300 Jiwa	299 Jiwa	297 Jiwa
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	70%	72%	74%	76%	78%	80%
Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	70%	72%	74%	76%	78%	80%
<b>BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol</b>							
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rumah Sakit Pratama Kabupaten Buol</b>							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	100%



<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol</b>							
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0.66	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	80%	85%	87.50%	87.50%	90%	90%
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	31.20%	53%	55%	58%	60%	63%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	0.85%	4.85%	9.15%	14.85%	19.15%	25%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62%	78%	80%	83%	85%	88%
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	24.08%	33.02%	43.08%	54%	65%	75%
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	90%	92%	94%	96%	98%	100%
Program Bina Teknik, Perencanaan dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Bidang PUPR	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							
<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol</b>							
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0.16	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rasio Permukiman Layak Huni	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pensertifikatan Lahan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Sosial</b>							
<b>Dinas Sosial Kabupaten Buol</b>							
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	45.17%	52%	54%	56%	58%	60%
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Database Penduduk Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penerapan Nilai Kesetiakawanan Sosial Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>							
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol</b>							
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kesempatan	Besaran Pencari Kerja yang	25%	30%	35%	40%	45%	50%



Kerja	Terdaftar yang Ditempatkan							
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Ekonomi dan SDM Masyarakat Daerah Tertinggal	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol</b>								
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak	Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase Angkatan Kerja Perempuan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Anak	Persentase Peningkatan Pengetahuan Tentang Kualitas Hidup Perempuan	100%	100%	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase Penyediaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	100%	100%	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keluarga Sejahtera	100%	100%	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Keterisian Database Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Penyediaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak	100%	100%	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Layanan Perlindungan Anak	100%	100%	-	-	-	-	-
<b>Urusan Pangan</b>								
<b>Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol</b>								
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas DKP Kabupaten Buol	100%	100%	-	-	-	-	-
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>								
<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol</b>								
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP dan Akta Kelahiran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol</b>								
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	60%	65%	70%	75%	80%	85%	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Buol**



Program Pendayagunaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Persentase Penyediaan Profil Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Peningkatan Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembangunan Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol</b>							
Program Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	97%	97%	98%	99%	99%	100%
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli KB	100%	100%	-	-	-	-
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesehatan Reproduksi	100%	100%	-	-	-	-
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Konseling KRR	100%	100%	-	-	-	-
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase Ketersediaan Bahan Informasi Tentang Tumbuh Kembang Anak	100%	100%	-	-	-	-
Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	100%	100%	-	-	-	-
<b>Urusan Perhubungan</b>							
<b>Dinas Perhubungan Kabupaten Buol</b>							
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dalam Kondisi Baik	100%	-	100%	100%	100%	100%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	60%	65%	70%	75%	80%	85%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	418 Unit	450 Unit	500 Unit	550 Unit	600 Unit	650 Unit
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buol</b>							
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	6.12%	-	10%	15%	20%	25%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase BPR/LKM Aktif	100%	-	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	47.01%	50%	55%	60%	65%	70%
Program Pameran Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas Diskop-UKM Kabupaten Buol	100%	100%	-	-	-	-
Program Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	100%	100%	-	-	-	-
<b>Urusan Pilihan</b>							
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>							
<b>Dinas Perikanan Kabupaten Buol</b>							
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan	73.29%	75%	80%	85%	90%	95%
Program Pengembangan Perikanan	Produksi Perikanan	15%	20%	25%	30%	35%	40%



Tangkap	Kelompok Nelayan						
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	24.62%	30%	35%	40%	45%	50%
<b>Urusan Pariwisata</b>							
<b>Dinas Pariwisata Kabupaten Buol</b>							
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata	85.57%	87.28%	89.02%	90.80%	92.62%	94.47%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Fasilitas Pariwisata Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Pariwisata	100%	100%	-	-	-	-
<b>Urusan Pertanian</b>							
<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol</b>							
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani	100%	-	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	48.06%	50%	50%	50%	50%	50%
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	35%	40%	45%	50%	55%	60%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Bina Kelompok Petani	67.26%	70%	72%	75%	77%	80%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Tani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Pencegahan Penyakit Ternak	100%	-	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak Sapi Potong per Hektar Lahan	52%	57.52%	63.05%	73.62%	81.91%	97.18%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis Peternakan	100%	-	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Perdagangan</b>							
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol</b>							
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Daerah	35%	40%	45%	50%	55%	60%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	75%	80%	85%	90%	95%	100%
<b>Urusan Perindustrian</b>							
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol</b>							
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	44%	50%	55%	60%	65%	70%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Teknologi Industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Sentra Dan Pertumbuhan Sentra Baru	Persentase Peningkatan Kapasitas Industri Skala Menengah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Urusan Transmigrasi</b>							
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol</b>							
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Transmigran Swakarsa	30%	32%	34%	36%	38%	40%

**Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Buol Periode 2018-2022**

Target capaian sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.1 di atas pada umumnya dibuat dengan analisa trend/kecenderungan laju perubahan pada masa lima tahun sebelumnya (2012-2017). Dengan bantuan



dokumen-dokumen perencanaan yang lebih baik seperti RPJMD dengan turunannya (Renstra, RKPD, Renja) yang satu sama lain konsisten, dan SPKD yang secara spesifik ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan, serta kemauan yang semakin kuat untuk saling mengintegrasikan program dan kegiatan di antara Perangkat Daerah, maka target-target atas sasaran yang berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat bukan saja dapat dicapai bahkan dalam beberapa hal berpotensi untuk dapat dilampaui.

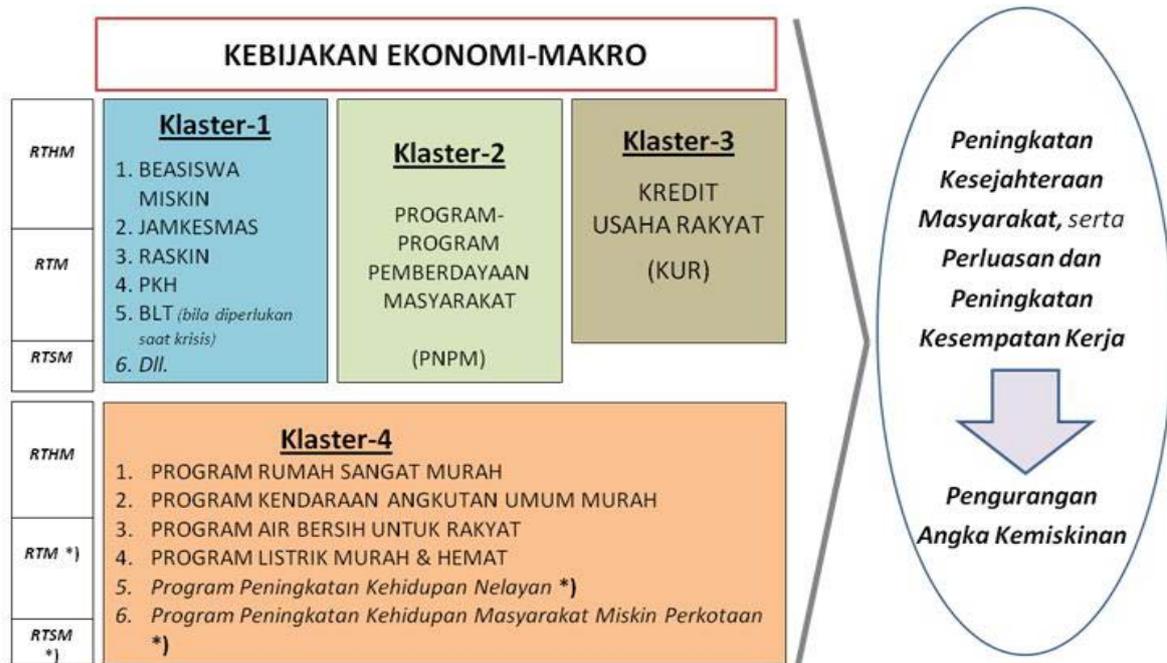
## **5.2. Target dan Prioritas dalam APBD Kabupaten Buol (2017-2022)**

Untuk mempercepat proses pencapaian penurunan angka kemiskinan dan dengan memperhatikan kondisi kemiskinan, wilayah prioritas intervensi dan ketersediaan anggaran serta potensi yang dimiliki Kabupaten Buol, maka perlu disusun sebuah target yang ingin dicapai dan prioritas masing-masing bidang yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA di masing-masing SKPD.

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan menekankan pada 4 (empat) strategi, yaitu:

- a) Strategi kategori intervensi klaster 1 (satu); dengan upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) Strategi kategori intervensi klaster 2 (dua); dengan upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) Strategi kategori intervensi klaster 3 (tiga); dengan upaya mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d) Strategi kategori intervensi klaster 4 (empat); dengan upaya mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Keempat strategi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dijelaskan melalui skema berikut ini :



Sumber : Dokumen SPKD Kota Palu Tahun 2013

**Gambar 5.1**  
**Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat**

Dalam bab ini akan dijelaskan target dan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buol berdasarkan 5 bidang indikator utama yang akan diuraikan pada sub bab berikut

### 5.2.1 Target dan Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Upaya mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di bidang ketenagakerjaan sesuai Rencana Strategis Dinas Nakertrans Kabupaten Buol dilakukan pada penduduk usia 15-59 tahun berjumlah 7.946 jiwa yang menganggur yang dominan berdomisili di Kecamatan Bukal mencapai 1.461 jiwa, diikuti di Kecamatan Momunu sebanyak 1.279 jiwa, di Kecamatan Bokat sebanyak 1.168 jiwa serta di Kecamatan Karamat sebanyak 1.118 jiwa. Sedangkan penduduk usia 60 tahun ke atas yang menganggur mencapai 1.510 jiwa dengan jumlah terbesar berturut-turut berada di Kecamatan Bukal sebesar 249 jiwa, Kecamatan Momunu sebesar 241 jiwa dan Kecamatan Bokat mencapai 198 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penganggur di Kabupaten Buol mencapai 17.837 jiwa yang didominasi oleh penganggur di Kecamatan Bokat mencapai



2.939 jiwa atau proporsinya mencapai 16,48 persen, Kecamatan Momunu sebesar 2.762 jiwa atau proporsinya mencapai 15,48 persen, Kecamatan Karamat sebesar 2.326 jiwa atau proporsinya sebesar 13,04 persen. Hal ini bukan berarti para penganggur di kecamatan lain belum menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

### **1. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Pelayanan dan Peran Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Kebijakan yang diambil untuk mendukung strategi di atas dengan cara meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi ; menciptakan koordinasi dan mekanisme kerja sesuai prosedur; Mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan fasilitasi dan rapat-rapat koordinasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

### **2. Meningkatkan kualitas Penempatan dan Pemberdayaan TK dan Kewirausahaan serta Penciptaan Lapangan Kerja Baru**

Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan strategis ini melalui peningkatan akses angkatan kerja kepada lapangan kerja melalui lapangan-lapangan kerja baru yang muncul dari kegiatan Perangkat Daerah lainnya dan atau dari Dunia Usaha. Akses tersebut difasilitasi melalui penyelenggaraan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja; Perluasan Kesempatan Kerja di dalam dan di luar hubungan kerja; Pembinaan Lembaga Penempatan.

### **3. Meningkatkan Kualitas Perangkat Hubungan Industrial dan Perbaiki Iklim Ketenagakerjaan**

Adapun kebijakan yang diambil untuk mendukung tujuan strategis melalui peningkatan kapasitas Serikat Pekerja dan pengusaha melalui Pelatihan,



Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan; Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penerapan TK.

### **5.2.2. Target dan Prioritas Bidang Kesehatan**

Adapun penduduk miskin yang menderita penyakit kronis yang menjadi target penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Buol mencapai 3.765 jiwa dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Bukal mencapai 1.007 jiwa, di Kecamatan Biau sebanyak 396 jiwa, serta di Kecamatan Bunobogu mencapai 362 jiwa. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu yang berpotensi menurun lebih rendah dari pada yang tertera dalam RPJMD, yaitu dari 297 menjadi 275 kematian dari 100.000 kelahiran pada Tahun 2022;
2. Menurunnya kematian bayi;
3. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan anak Balita, yang berpotensi meningkat lebih cepat dari target RPJMD yaitu dari 90 persen menjadi 95 persen pada Tahun 2022;
4. Menurunnya prevalensi Gizi buruk dan Gizi Kurang;
5. Terkendalnya faktor resiko penyakit tidak menular;
6. Meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas dan jaringannya;
7. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, yang berpotensi meningkat lebih cepat dari target RPJMD yaitu dari 80 persen menjadi 90 persen pada Tahun 2022;
8. Menurunnya Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR);
9. Menurunnya Unmet need (Kebutuhan Ber-KB tidak terlayani);
10. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi Modern (CPR);
11. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR);
12. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
13. Menurunnya angka Stunting.



### 5.2.3. Target dan Prioritas Bidang Kesehatan

Di Kabupaten Buol, sesuai BDT-TNP2K Tahun 2015, anak tidak bersekolah mencapai 3.577 jiwa yang didominasi anak putus sekolah di Kecamatan Momunu mencapai 641 jiwa atau proporsinya mencapai 17,02 persen, diikuti Kecamatan Biau sebesar 473 jiwa atau proporsinya mencapai 13,22 persen. Adapun sasaran yang dilakukan sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol sebagai berikut:

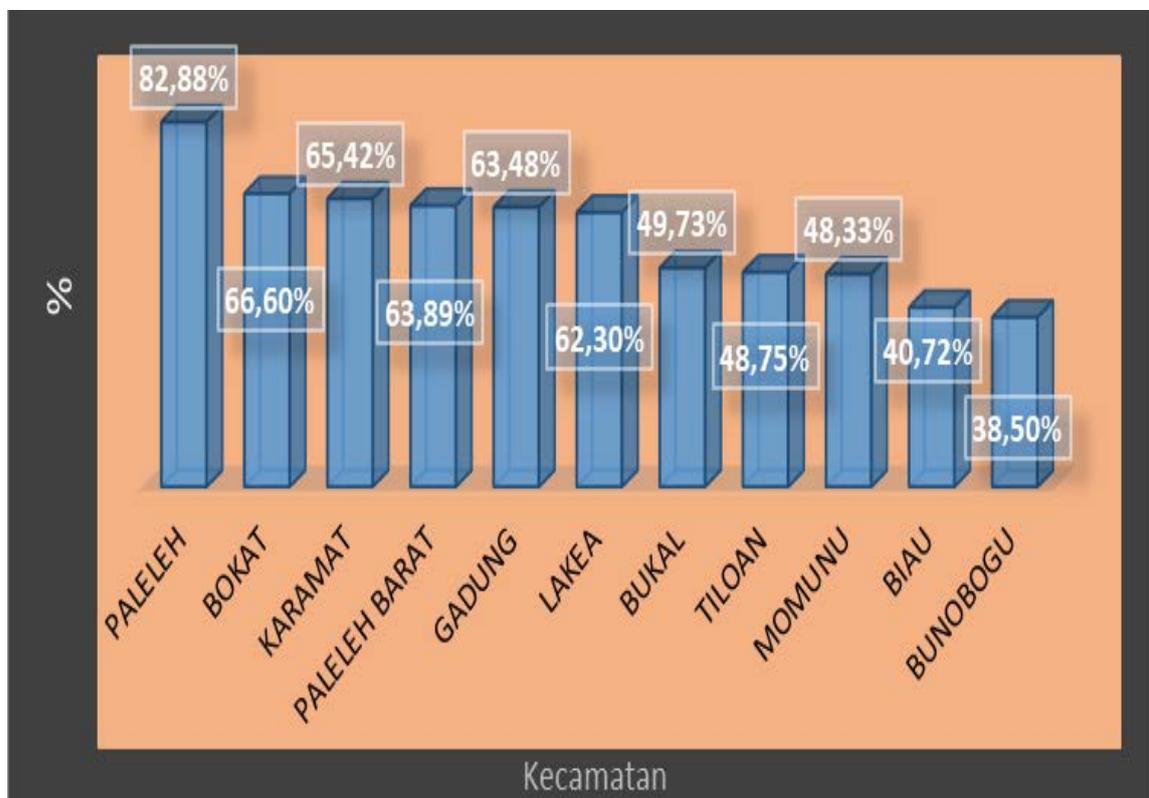
1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD yang berpotensi meningkat lebih cepat dari target RPJMD yaitu dari 69 persen menjadi 80 persen pada Tahun 2022, antara lain melalui kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Desa (APBDes);
2. Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau;
3. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan formal yang bermutu;
4. Meningkatnya layanan mutu pendidikan dasar;
5. Meningkatnya APM tingkat SLTP (SMP dan M.Ts);
6. Meningkatnya Angka Melanjutkan Studi ke jenjang yang lebih tinggi;
7. Meningkatnya APM tingkat SLTA (SMA dan SMK);
8. Menurunnya Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan formal;
9. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan S1/D.IV, yang berpotensi lebih besar proporsinya dari target RPJMD yaitu dari 69,76 persen menjadi 75 persen pada Tahun 2022;
10. Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar;
11. Meningkatnya layanan Pendidikan Formal;
12. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan formal yang bermutu;
13. Meningkatnya kapasitas layanan pendidikan nonformal dan menurunkan buta aksara;
14. Penyebaran tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal secara lebih merata;



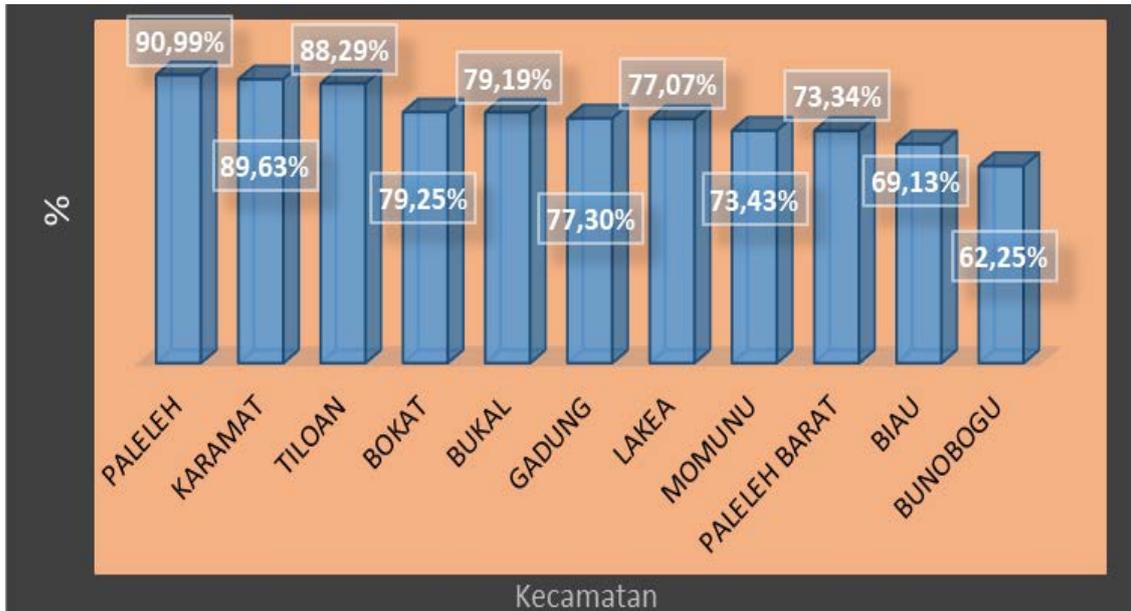
15. Meningkatnya Pembinaan Seni Budaya;
16. Terlaksananya pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
17. Meningkatnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

#### 5.2.4. Target dan Prioritas Bidang Kesehatan

Di bidang infrastruktur dasar, prioritas yang perlu ditangani adalah akses sanitasi layak, di mana terdapat 7.568 (56,47 persen) RTM yang tidak memiliki jamban. Jumlah terbesar berada di Kecamatan Paleleh sebanyak 1.012 (82,88 persen) dari total rumah tangga miskin di Kecamatan Paleleh. Selanjutnya, sebanyak 77,95 persen atau sebesar 10.446 RTM tidak memiliki tangkiseptik. Kecamatan terbanyak yaitu kecamatan Paleleh sebesar 90,99 persen atau sebesar 1.111 RTM di kecamatan Paleleh.

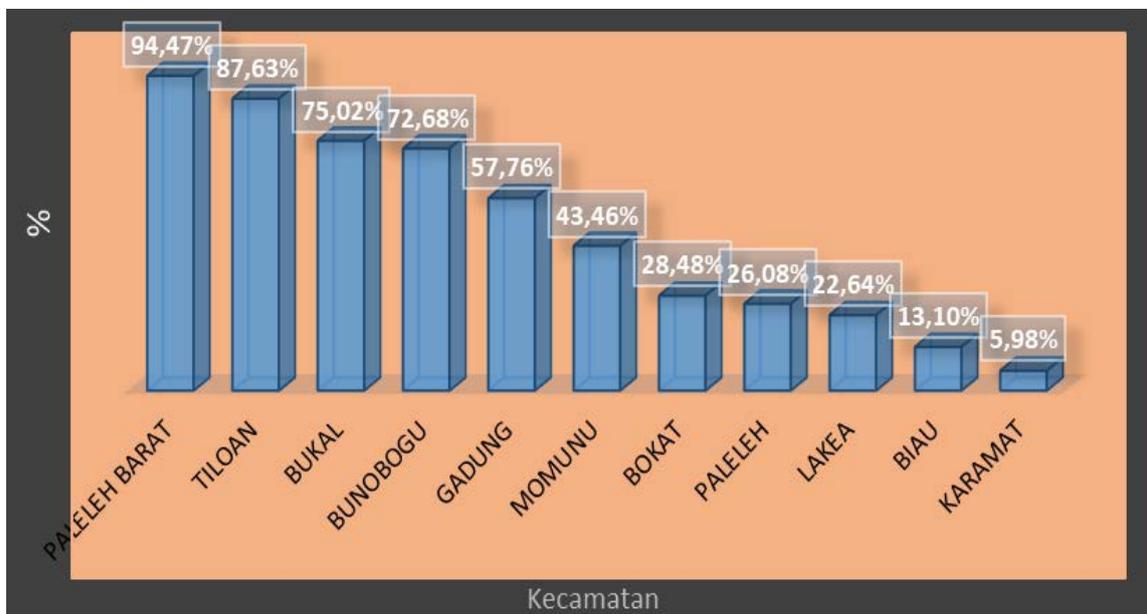


**Grafik 5.2.**  
**Rangking Prioritas Penangan RTM Tidak Memiliki Jamban**



**Grafik 5.3**  
**Rangking Prioritas Penangan RTM Tidak Memiliki Septick**

Kegiatan penanganan sanitasi bagi rumah tangga miskin ini dapat diatasi dengan program sanitasi bagi rumah tangga miskin yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa ataupun dari sumber lainnya.



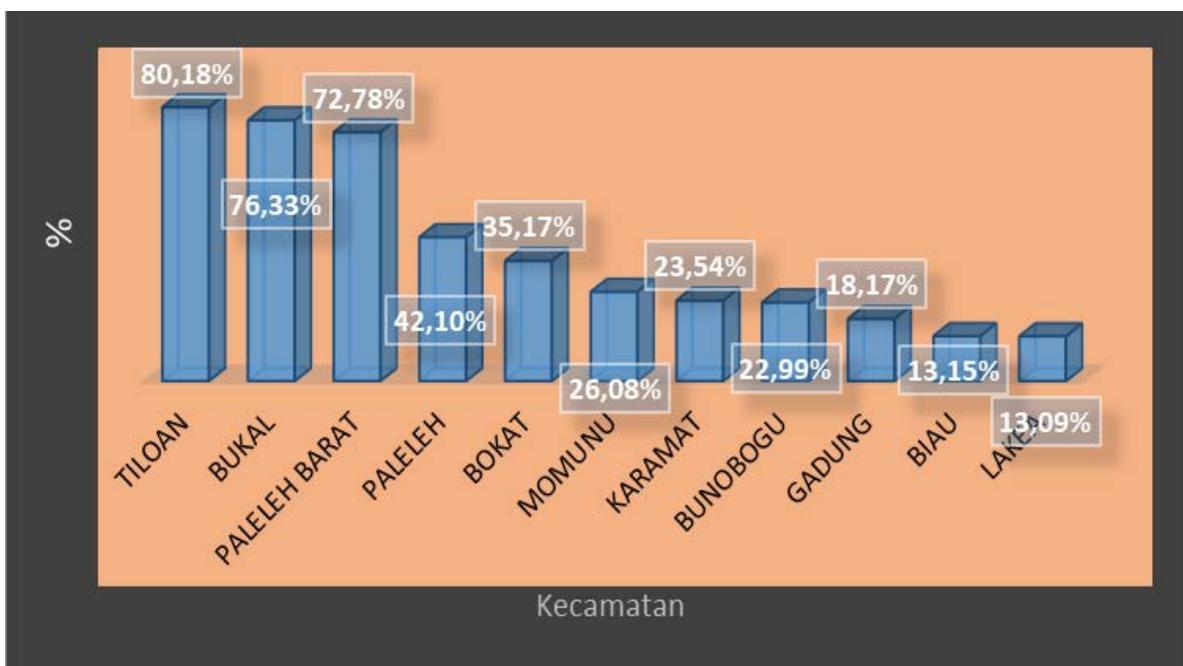
**Grafik 5.4**  
**Rangking Prioritas Penyediaan Sumber Air Minum**

Prioritas selanjutnya adalah akses air bersih layak bagi rumah tangga yang saat ini baru mencapai 62,10 persen RTM yang mampu



mengakses air bersih layak, sementara 37,90 persen RTM mengkonsumsi sumber air bersih yang tidak layak.

Kecamatan Paleleh Barat merupakan daerah yang paling banyak mengkonsumsi air minum dari sumber yang tidak terlindungi, sehingga prioritas penyiapan air minum layak dapat dimulai dari kecamatan Paleleh Barat. Dengan menggunakan sumber mata air atau sungai yang ada dengan mengalirkan menggunakan perpipaan (sistem gravitasi) dapat dijangkau dengan sumber dana dari menggunakan alokasi dana desa maupun sumber lainnya.



**Grafik 5.5**  
**Rangking Prioritas Penyediaan Sambungan Listrik PLN**

Prioritas selanjutnya adalah peningkatan rasio elektrifikasi, yakni rasio ketersediaan listrik. Sebanyak 4.937 (37,20 persen) RTM di Kabupaten Buol belum menikmati listrik. Olehnya pada bidang ini ditargetkan adanya penyambungan baru bagi RTM sampai dengan Tahun 2022 dengan jumlah sambungan baru 6.000 RTM. Target tersebut dapat dicapai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi RTM dapat meningkat, sehingga secara alamiah RTM berusaha menyediakan sendiri biaya untuk penyambungan. Selain itu, adanya program dari pemerintah provinsi dengan kebijakan bantuan biaya penyambungan baru bagi RTM sebanyak



4.000 sambungan di seluruh wilayah provinsi yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol. Sisanya dapat dicapai dengan bantuan stimulan untuk biaya penyambungan baru listrik bagi RTM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Untuk penyambungan listrik bagi rumah tangga miskin, dapat melihat kecamatan prioritas penanganan yakni kecamatan Tiloan, Bukal dan Paleleh Barat.

#### **5.2.5. Target dan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas ekonomi sehingga upaya pemenuhan kecukupan pangan menjadi kerangka pembangunan yang mampu mendorong pembangunan sektor lainnya. Ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Tersedianya pangan secara fisik di daerah bisa diperoleh dari hasil produksi daerah sendiri, impor, maupun bantuan pangan. Analisis mengenai ketersediaan pangan dan akses pangan menjadi tahapan pembangunan yang strategis karena dibutuhkan untuk menelaah kinerja ketahanan pangan di Sulawesi Tengah. Kemandirian pangan akan mampu menjamin masyarakat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan tanpa ketergantungan dari pihak luar. Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memerlukan upaya peningkatan ketahanan pangan. Mengingat kondisi geografis wilayah yang bergunung-gunung sehingga pengembangan komoditas tanaman pangan terutama padi terbatas pada wilayah tertentu misalnya hanya pada Kecamatan Tiloan dan Momunu, serta pengembangan pada komoditi pangan tertentu pula seperti jagung dan sagu.

Upaya meningkatkan target tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten Buol dapat tercapai menurut perkembangan pada luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi komoditas tanaman padi, jagung dan kedelai. Namun tidak semua daerah di Kabupaten Buol cocok untuk



pengembangan jagung dan kedelai. Dalam hal ini perlu dilihat kembali jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan di daerah tersebut sehingga terdapat komoditas pertanian lain yang mampu meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Dalam rangka mengejar target produksi beberapa komoditas unggulan nasional diantaranya padi yang ditargetkan akan mencapai 84 juta ton beras pada Tahun 2019. Sejalan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Buol juga telah mencanangkan program pencapaian target produksi padi sebesar 50 ribu ton yang secara bertahap akan dicapai sampai Tahun 2022 nanti. Upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pencapaian target tersebut terkendala beberapa permasalahan diantaranya usahatani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Untuk meningkatkan partisipasi keikutsertaan petani dalam mengikuti program asuransi pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol melaksanakan sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), kegiatan sosialisasi atas kerjasama PT. Jasindo Kantor Cabang Tolitoli ini dilaksanakan di Aula Gedung B Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Kebutuhan konsumsi daging di di Provinsi Kabupaten Buol dapat dipenuhi secara lokal. Produksi daging Kabupaten Buol didominasi oleh daging sapi, kambing dan babi dengan nilai produksi cenderung berfluktuatif. Di Sulawesi Tengah, guna memenuhi target 1 juta ekor sapi pada tahun 2021, peningkatan populasi ternak diprioritaskan pada daerah padat ternak. Daerah sebaran ternak sapi



terdapat di Kabupaten Donggala, Banggai, Parigi Moutong, dan Sigi. Di Kabupaten Buol, untuk meningkatkan target produksi daging dan juga populasi ternak, pemerintah Kabupaten Buol melakukan beberapa program terutama pengembangan kawasan ternak sapi (Mini Ranch) dan program peningkatan produktivitas tenak melalui inseminasi buatan dan pola intensifikasi kawin alam. Selain itu juga digunakan sistem penggemukan yang dilakukan kelompok-kelompok peternak yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Buol. Kawasan Pengembangan Agribisnis Peternakan (Mini Ranch) Desa Monggonit Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol merupakan salah satu kawasan pengembangan peternakan yang merupakan asset Pemerintah Daerah serta telah menjadi icon pembangunan pertanian Kabupaten Buol sebagaimana visinya menjadikan kawasan Mini Ranch sebagai pusat pembibitan ternak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan. Keberadaan Mini Ranch dan peternakan rakyat ditargetkan dapat menyumbangkan 50 ribu ekor atau berkontribusi sebesar 5,46 persen.

Tabel berikut disajikan tentang indikator kinerja yang ditargetkan oleh OPD yang terkait dengan Ketahanan Pangan di Kabupaten Buol.

**Tabel 5.2.**  
**Target Indikator Kinerja OPD Terkait Ketahanan Pangan**  
**di Kabupaten Buol 2018-2021**

No	Indikator	Satuan	Target Indikator pada Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketersediaan pangan utama	Kg/kapita	100	100	100	100	100
2.	Ketersediaan energi	Kkl/kapita	2400	2400	2400	2400	2400
3.	Ketersediaan protein	gram	63	63	63	63	63
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100
5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya	Ton/Ha	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
6.	Produksi ternak sapi	Ekor	18.650	38.205	46.217	54.614	65.933
7.	Produksi perikanan	%	100	100	100	100	100
8.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	80	85	90	95	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022; Rencana Pengelolaan Peternakan Sapi Terpadu Kabupaten Buol, 2017.



## **BAB VI**

### **RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Arah Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*, agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. Pemerintah Kabupaten Buol menetapkan strategi umum/dasar untuk mencapai visi misi kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan adalah:

1. Strategi pertama adalah membangun sinergi dan kemitraan antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa), Masyarakat, Dunia Usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Ini didasari oleh fakta keterbatasan sumber daya finansial pemerintah di satu sisi, sedangkan di sisi lain kita memiliki potensi sumber daya alam yang harus dikelola bersama secara berkelanjutan. Mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah, maka strategi sinergi dan kemitraan ini menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Strategi kedua adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan adaptif, sebagai perwujudan konsep “negara hadir” dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,



dan memenuhi aspirasi masyarakat. Strategi ini salah satunya bertujuan agar proses reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekedar merupakan kesibukan dan kebutuhan Pemerintah semata;

3. Strategi ketiga adalah pementasan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan. Rasionalitas strategi ini adalah apabila masyarakat meningkat kapasitasnya, masyarakat dapat menjadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban;
4. Strategi keempat adalah penyebaran pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya di perkotaan saja, tetapi juga dengan menciptakan pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Kawasan ini akan mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat maupun beban perkotaan;
5. Strategi kelima adalah tetap menjaga prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan. Prinsip ini menyangkut keberlanjutan sumber daya maupun meningkatkan derajat penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). Strategi ini sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Dengan lima strategi ini, upaya percepatan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan tidak akan merusak sumber daya alam yang tersedia, justru dapat memperkuat.



## 6.1. Rencana Aksi Daerah Bidang Kesehatan

**Tabel 6.1**  
**Identifikasi Masalah Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buol**  
**Periode 2017-2022**

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	PRIORITAS MASALAH	STRATEGIS PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	PHBS rendah;	PHBS rendah;	Mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat;	Peningkatan pemahaman tentang kesehatan kepada masyarakat;	Sosialisasi/ penyuluhan kesehatan terpadu;
2	Apakah warga tersebut kategori BDT yang bisa dilayani dalam jaminan kesehatan (rekomendasi dinsos) kaitannya update dengan data	Seharusnya data BDT sebagai acuan untuk program apapun untuk kemiskinan	Kerjasama terpadu lintas sektor dalam penanganan kemiskinan	Validasi dan Update data kemiskinan didesa	Verivali data secara periodik
3	Masalah kesehatan multi dimensi/penyebabnya	Masalah kesehatan multi dimensi/ penyebabnya	Perlu kejujuran dari pejabat didesa dalam penentuan kemiskinan	Peningkatan kerjasama lintas sektor	Monitoring dan Evaluasi secara Periodik
4	Seharusnya data BDT sebagai acuan untuk program apapun untuk kemiskinan	Belum semua OPD menjadikan BDT sebagai acuan sasaran program pemberantasan kemiskinan	Bagaimana menetapkan standar kemiskinan bersama	Perbaikan gizi buruk dan penurunan angka stanting	Sosialisasi dan Peragaan Penyediaan Makanan Sehat.
5	Belum semua OPD menjadikan BDT sebagai acuan sasaran program	SDM yang ada di Dinas Kesehatan rasionya (tenaga medis dengan	Update data Kemiskinan didesa	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Penambahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan



	pemberantasan kemiskinan	jumlah pasien) masih belum memadai dalam pelayanan masyarakat khusus di desa yang sulit			
6	SDM yang ada di Dinas Kesehatan rasionya (tenaga medis dengan jumlah pasien) masih belum memadai dalam pelayanan masyarakat khusus di desa yang sulit			peningkatan jumlah medis dan paramedis	
7	Bantuan dimasyarakat terlalu banyak dari berbagai sektor, namun faktanya kemiskinan meningkat				

Sumber : Hasil FGD SPKD Kabupaten Buol Tahun 2019



## 6.2. Rencana Aksi Daerah Bidang Pendidikan

**Tabel 6.2**  
**Identifikasi Masalah Kemiskinan Bidang Pendidikan di Kabupaten Buol Periode 2017-2022**

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	PRIORITAS MASALAH	STRATEGIS PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM
1	Belum semua target penerima Bansos terlayani	Belum semua target penerima Bansos terlayani	peningkatan penanganan sasaran Bansos	adanya peningkatan kebijakan alokasi APBD penanganan Bansos
2	alokasi APBD dalam penanganan Bansos belum mencapai 5 %	alokasi APBD dalam penanganan Bansos belum mencapai 5 %		
3	belum terbentuknya Pokja dalam sekretariat TKPKD untuk pengelolaan data kemiskinan	belum terbentuknya Pokja dalam sekretariat TKPKD untuk pengelolaan data kemiskinan	pembentukan pokja pengelolaan data terpadu	
4	kurangnya dukungan sarana dan prasaran dasar untuk pelayanan dasar	kurangnya dukungan sarana dan prasaran dasar untuk pelayanan dasar	peningkatan saran dan prasarana perbaikan sistem jaringan data dasar pelayanan dukcapil	Penyediaan sarana pelayanan dasar mobile
5	budaya minat baca masyarakat masih rendah	budaya minat baca masyarakat masih rendah	peningkatan bahan pustaka	
6	sarana perputakaan pada sekolah banyak yang belum memadai		peningkatan sarana prasarana perpustakaan	
7	SDM pengelola pendukung pengelolaan perpustakaan belum		peningkatan SDM pengelola perpustakaan	



	memadai			
8	kurangnya sarana dan prasaran pendukung dalam meningkatkan minat baca masyarakat	kurangnya sarana dan prasaran pendukung dalam meningkatkan minat baca masyarakat	Penyediaan sarana mobile pelayanan mint baca masyarakat	
9	masih banyak usia dini yang belum terakses		peningkatan sarana pendidikan PAUD	
10	masih kurangnya SDM tenaga pendidik		Peningkatan SDM pendidik	
11	kurangnya pembiayaan untuk mendukung kelembagaan pendidikan		penambahan anggaran pembiayaan	

**Sumber : Hasil Diskusi Kelompok Terarah SPKD Kabupaten Buol Periode 2017-2022, Tahun 2019**

### 6.3. Rencana Aksi Daerah Bidang Ketenagakerjaan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, yang diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu: Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja; Meningkatnya kesempatan kerja dengan target kinerja adalah persentasi penempatan terhadap pencari kerja terdaftar.

Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja adalah rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, dan rasio pelayanan kepesertaan Jamsostek bagi pekerja/buruh; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi dengan target kinerja adalah jumlah penempatan



transmigran merupakan dasar pertimbangan disusunnya kebijakan urusan ketenagakerjaan.

Keseimbangan antara dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja yang dicirikan dengan meningkatnya upah minimum. Meningkatnya upah riil akan menyebabkan daya beli pekerja meningkat pula, dan pada tahap selanjutnya akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan mengembangkan dunia usaha. Kondisi ketenagakerjaan saat ini perubahannya sangat dinamis, dengan tingginya penetapan Upah Minimum setiap tahun, di sisi lain diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi sisi lainnya biaya operasional perusahaan semakin berat, berdampak terhadap kelangsungan perusahaan, lebih utama diindikasikan perusahaan akan melakukan rasionalisasi tenaga kerja, penghentian sementara penyerapan tenaga kerja, dan dikhawatirkan apabila beban perusahaan makin tinggi akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang kembali akan menjadi beban Pemerintah. Urusan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal acuan kinerjanya tercantum dalam Misi

RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017–2022, dengan arah kebijakan dan untuk menunjang program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

### **1. Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Lapangan Kerja yang tersedia sebagian besar pada pertanian yang kurang diminati oleh para pencari kerja sehingga menimbulkan urbanisasi dari desa ke kota yang membuat masalah baru di perkotaan;
- b. Sarana dan Prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK (Balai Latihan Kerja) belum ada;
- c. Kurangnya jejaringan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi;

### **2. Urusan Ketransmigrasian**

- a. Bimbingan dan Penyuluhan masih belum optimal
- b. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk local masih rendah.



Tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidaklah mudah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan pekerja se-Kabupaten Buol, maka perlu upaya yang serius dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; dan meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 8 (delapan) program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan, terdiri dari : 3 (tiga) program sekretariat dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan; urusan wajib Ketenagakerjaan 3 (tiga) program dengan 20 (duapuluh) kegiatan; urusan pilihan Ketransmigrasian dan Desa tertinggal, terdiri dari 2 (program) program dengan 14 (empat belas) kegiatan, rinciannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kemasyarakatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
  - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor;
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Gedung Kantor;
  - Pengadaan Meubeleur;
  - Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi;
  - Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor;



- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya;
  - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosial);
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah;
  - Pembangunan Balai Latihan Kerja;
  - Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja;
  - Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan Instruktur BLK;
  - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja/MHMMD;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
  - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis Kewirausahaan;
  - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berbasis Kompetensi;
  - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keahlian dan Instruktur Lembaga Pelatihan serta Keterampilan.
  - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
    - 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
    - 2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
    - 3) Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;



- 4) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;
  - 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
  - 6) Sosialisasi Perluasan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  - 7) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya Produktif Pedesaan.
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
    - 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    - 2) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;
    - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - Program Peningkatan Ekonomi dan SDM Masyarakat Daerah Tertinggal
    - 1) Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi;
    - 2) Identifikasi Potensi produk Unggulan, Kemitraan Usaha dan Industri Distribusi serta Pemasaran;
    - 3) Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    - 4) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal;
    - 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.
  - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
    - 1) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi;
    - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi;
    - 3) Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
    - 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Pertanahan Kawasan Transmigrasi;
    - 5) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian;



- 6) Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- 7) Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 8) Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- 9) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota.



**Tabel 6.3**  
**Ketenagakerjaan di Kabupaten Buol Tahun 2013-2018**

Uraian		2013		2014		2015		2017		2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Angkatan Kerja	Bekerja	57.893	65,51	61.153	63,031983	65.075	65,4585873	64.487	61,72068	68.303	63,956515
	Pengangguran	1.016	1,15	1.243	1,28	2.418	2,43	2.966	2,84	3.274	3,07
	<b>Total</b>	<b>58.909</b>	<b>66,66</b>	<b>62.396</b>	<b>64,31</b>	<b>67.493</b>	<b>67,89</b>	<b>67.453</b>	<b>64,56</b>	<b>71.577</b>	<b>67,02</b>
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah					8.477	8,53	10.405	9,958653	11.036	10,33372
	Mengurus RT	29.464	33,34	34.623	35,686824	19.934	20,05	21.321	20,40639	20.144	18,86213
	Lain-lain					3.510	3,53	5.303	5,075515	4.039	3,7819769
	<b>TOTAL</b>	<b>29.464</b>	<b>33,34</b>	<b>34.623</b>	<b>35,68682</b>	<b>31.921</b>	<b>32,11</b>	<b>37.029</b>	<b>35,44</b>	<b>35.219</b>	<b>32,97783</b>
Total Penduduk 15 tahun Ke atas		88.373	61,98	97.019	66,50	99.414	66,72	104.482	67,15	106.796	67,256124
TPAK		<b>58.909</b>	<b>66,66</b>	<b>62.396</b>	<b>64,31</b>	<b>67.493</b>	<b>67,89</b>	<b>67.453</b>	<b>64,56</b>	<b>71.577</b>	<b>67,02</b>
Tingkat Pengangguran		1.016	1,72	1.243	1,99	2.418	3,58	2.966	4,40	3.274	4,57
Total Penduduk		142.585		145.889		149.004		155.593		158.790	

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah



**Tabel 6.4**  
**Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**  
**Kabupaten Buol, Sulteng dan Indonesia**  
**Tahun 2013-2018**

TAHUN	NILAI TPAK					
	KAB. BUOL		SULAWESI TENGAH		INDONESIA	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
2013	58.909	66,66	1.228.337	65,92	120.172.003	66,77
2014	62.396	64,31	1.342.615	66,76	121.872.931	66,60
2015	67.493	67,89	1.384.235	67,51	122.380.021	65,76
2016	-	-	1.509.505	72,28	125.443.748	66,34
2017	67.453	64,56	1.428.583	67,14	128.062.746	66,67
2018	71.577	67,02	1.502.972	69,52	131.005.641	67,26

Sumber : BPS Tahun 2019, data diolah

#### 6.4. Rencana Aksi Daerah Bidang Perumahan dan Lingkungan

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Buol di bidang infrastruktur, berbagai sumber daya kunci yang tersedia dapat diakses, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulteng, bahkan program atau kebijakan sendiri yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol. Misalnya program-program dari kementerian di antaranya program hibah air minum, program hibah sanitasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau program dari Pemerintah Provinsi Sulteng misalnya sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, atau penyediaan air minum dengan sumber air tanah, penyediaan sanitasi dari Dinas Cipta Karya bidang Penataan Lingkungan Permukiman (PLP).



**Tabel 6.5**  
**Rencana Aksi Daerah Bidang Infrastruktur**

No	Bidang Kegiatan	Program	Kegiatan	Sumber Pendanaan	Kecamatan Prioritas
1	Rumah Tidak Layak Huni.	Rehab Rumah Tidak Layak.	Pembangunan/rehab rumah tidak layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>Alokasi Dana Desa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukal;</li> <li>Momunu;</li> <li>Biau;</li> </ul>
2	Sanitasi	Sanitasi berbasis Masyarakat	Pembangunan jamban bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya Karya Provinsi Sulteng;</li> <li>Dinas Perumahan Kabupaten;</li> <li>Alokasi Dana Desa untuk Kesejahteran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paleleh;</li> <li>Karamat;</li> <li>Bokat.</li> </ul>
3	Air Minum	Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Penyediaan air minum sistem gravitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Cipta Karya Karya Provinsi;</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;</li> <li>Alokasi Dana Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paleleh Barat;</li> <li>Tiloan;</li> <li>Bukal.</li> </ul>
4	Elektrifikasi	Penyediaan sambungan listrik untuk Masyarakat Miskin	Penyambungan system jaringan listrik untuk masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Energi Sumber Daya</li> <li>Mineral Propinsi Sulawesi Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiloan;</li> <li>Bukal;</li> <li>Paleleh Barat.</li> </ul>

Sumber : Hasil Diskusi Kelompok Terarah SPKD Kabupaten Buol Tahun 2019



## 6.5. Rencana Aksi Daerah Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Buol

Secara substansial, rencana aksi daerah (RAD) dalam penanggulangan kemiskinan di bidang ketahanan pangan merupakan *review* terhadap strategi penanggulangan kemiskinan di daerah secara menyeluruh dan disusun dengan memperhitungkan kemungkinan perubahan ekonomi masyarakat setempat. Penurunan kemiskinan dalam bidang ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan maupun penajaman strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terealisasi dalam perubahan sasaran dan alokasi anggaran masing-masing kegiatan. Dengan demikian, RAD dalam bidang ketahanan pangan ini dapat menjadi rujukan dalam proses perencanaan tahunan baik dalam RKP maupun Renja K/L dan OPD, serta proses penganggarannya melalui APBN dan APBD.

Penjabaran Rencana Aksi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut berikut:

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian dan Maritim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat serta Kewilayahan;
2. Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi melalui Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal;
3. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif;
4. Pembangunan Perdesaan yang Maju dan Mandiri;
5. Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan.

Adapun Program **Prioritas Percepatan Lintas Bidang** dalam penanggulangan kemiskinan ketahanan pangan:

1. Program Pengembangan Kawasan Peternakan;
2. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan;
3. Program Bersahabat dengan Air;
4. Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan;



5. Program Pengembangan Wisata Bahari dan Agrowisata;
6. Program Tanah Untuk Rakyat/TAURA (Land Reforma Agraria);
7. Program Bank Sampah.

RAD dalam program penanggulangan kemiskinan dengan misi Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;
- 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;
- 10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- 11) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

RAD dalam program penanggulangan kemiskinan dengan misi Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan pembangunan Desa-Kota (Balancing Linkages), yakni :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
- 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
- 6) Program Penanggulangan Kemiskinan;
- 7) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.



RAD dalam program penanggulangan kemiskinan dengan misi Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan melalui program:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
6. Program Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

RAD penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan terkait dengan masalah, strategi penanggulangan melalui program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut.



**Tabel 6.6**  
**Masalah Kemiskinan, Strategi Pemecahan Masalah melalui Program dan Kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Buol**

No.	IDENTIFIKASI MASALAH	PRIORITAS MASALAH	STRATEGIS PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN
1.	<b>Ketahanan Pangan</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang tersedianya pangan</li> </ul>	Prioritas 1	Peningkatan produksi pangan (padi, jagung, ternak, ikan)	Peningkatan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan daerah rawan pangan</li> <li>Pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>Pemantauan dan analisis harga pangan pokok</li> <li>Pengembangan cadangan pangan daerah</li> <li>Pengembangan lumbung pangan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat ketersediaan pangan pokok (kg beras atau setara beras per kapita per tahun).</li> <li>Meningkatnya jumlah desa mandiri pangan.</li> <li>Tersedianya data harga pangan pokok mingguan; bulanan; dan tahunan.</li> <li>Tersedianya cadangan pangan daerah dalam tingkatan aman.</li> <li>Ada dan berkembangnya lumbung pangan desa kerjasama Bumdes dsan Bulog.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya peran kelembagaan pangan</li> </ul>	Prioritas 2	Peningkatan peran kelembagaan pangan	Peningkatan ketahanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan lumbung pangan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada dan berkembangnya lumbung pangan desa kerjasama Bumdes dan</li> </ul>



						Bulog.
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi Pasar yang Efektif (tepat waktu, volume, mutu komoditi, dan harga)</li> </ul>	Tingkat harga pangan pokok stabil.
<b>2. Perikanan dan kelautan</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya harga pakan ikan menyebabkan biaya operasional usaha perikanan meningkat</li> </ul>	Prioritas 3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi pengolahan pakan berbasis sumberdaya local	Peningkatan teknologi Pengolahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan pakan ikan</li> </ul>		Biaya operasional Usaha perikanan Budidaya menurun
			Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan pengolahan pakan ikan</li> </ul>		Peningkatan keterampilan pembudidaya
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya mutu produk hasil perikanan menyebabkan rendahnya harga ikan</li> </ul>	Prioritas 4	Meningkatkan pemanfaatan teknologi penanganan hasil perikanan	Peningkatan teknologi Pengolahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan ikan</li> </ul>		Peningkatan pendapatan usaha perikanan
		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku perikanan	Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan pengolahan pakan ikan</li> </ul>		Peningkatan keterampilan pembudidaya
<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktivitas perikanan rendah akibat penggunaan teknologi yang</li> </ul>	Prioritas 5	Meningkatkan pemanfaatan teknologi penangkapan ikan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan</li> </ul>		Meningkatnya produksi ikan dan produktivitas usaha nelayan



sederhana		Meningkatkan pemanfaatan teknologi pembudidaya perikanan	Program Pengembangan Perikanan budidaya	perikanan tangkap	
			Peningkatan produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan areal dan optimalisasi lahan tambak</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan budidaya perikanan</li> </ul>	Meningkatnya produksi perikanan budidaya
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan optimalisasi pertambakan</li> </ul>	Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan</li> </ul>	Prioritas 7	Meningkatkan Pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar	Pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan manajemen usaha perikanan bagi kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan</li> </ul>	Meningkatnya produktivitas usaha perikanan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya akses permodalan dari lembaga keuangan</li> </ul>	Prioritas 6	Meningkatkan akses permodalan masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan	Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan permodalan bagi pelaku usaha perikanan</li> </ul>	Kapasitas usaha meningkat



3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya saprodi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan standar</li> </ul>	Prioritas 1	Meningkatkan ketersediaan sarana produksi perikanan	Peningkatan sarana perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan induk dan benih ikan</li> </ul>	Tersedianya benih ikan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan pupuk dan obat-obatan</li> </ul>	Tersedianya sarana produksi perikanan budidaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya data sistem informasi sumberdaya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat</li> </ul>	Prioritas 8	Meningkatkan akses pelaku perikanan terhadap informasi sumberdaya perikanan	Pengembangan Sistem Informasi Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan alat komunikasi dan informasi untuk kegiatan perikanan</li> </ul>	Tersedianya informasi perikanan yang akurat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan pasar dalam dan luar negeri</li> </ul>	Prioritas 2	Meningkatkan aksesibilitas dan fasilitasi pasar dalam dan luar negeri	Pengembangan sistem informasi pasar produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi dan fasilitasi pasar perikanan</li> </ul>	Peningkatan harga ikan
				Pengembangan pasar tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi pasar tradisional</li> </ul>	Tersedianya pasar produk dan input pertanian
	<b>Pertanian dan Peternakan</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas pertanian rendah</li> </ul>	Prioritas 1	Intensifikasi pertanian tanaman pangan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian tanaman pangan</li> </ul>	Tersedianya saprodi pertanian	



		Intensifikasi pertanian tanaman perkebunan	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana produksi tanaman perkebunan</li> </ul>	Tersedianya saprodi pertanian
		Intensifikasi pertanian tanaman hortikultura	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana produksi tanaman hortikultura</li> </ul>	Tersedianya saprodi pertanian
		Ekstensifikasi pertanian tanaman pangan	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan areal lahan sawah</li> </ul>	Meningkatnya luas tanam padi
		Meningkatkan ketersediaan pengairan	Pengembangan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi</li> </ul>	Tersedianya air irigasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas peternakan rendah</li> </ul>	Prioritas 2	Intensifikasi peternakan	Peningkatan produktivitas hasil ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sumber bibit ternak sapi dan unggas</li> </ul>	Tersedianya bibit ternak
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inseminasi buatan</li> </ul>	Meningkatnya produksi ternak
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pakan alami dan buatan bagi ternak</li> </ul>	Tersedianya pakan dalam jumlah yang cukup
			Pengembangan prasarana peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Mini Ranch</li> </ul>	Tersedianya prasarana pembelajaran peternak



				Pengembangan Sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan Pemberdayaan peternak</li> </ul>	Meningkatnya SDM peternak
<b>4. Lingkungan Hidup</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat pengelolaan Akhir sampah belum ada</li> </ul>	Prioritas 1	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan bank sampah</li> </ul>	Meningkatnya kualitas lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketaatan dalam melaporkan upaya pengelolaan lingkungan setiap usaha yang telah memiliki izin lingkungan</li> </ul>	Prioritas 3				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan prasarana pengolahan sampah</li> </ul>	Meningkatnya kualitas lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya pengukuran kualitas air, udara dan tutupan lahan</li> </ul>	Prioritas 4	Upaya peningkatan kesadaran pengelola usaha	Evaluasi kegiatan usaha yang telah memiliki izin		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan tentang pentingnya lingkungan yang baik</li> </ul>	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah/jangkauan pelayanan sampah terbatas</li> </ul>	Prioritas 2	Optimalisasi pemanfaatan peralatan dan sumberdaya manusia	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan alat pengukur kualitas lingkungan</li> </ul>	Terkendalnya kualitas lingkungan



			Meningkatkan prasarana dan sarana persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan armada dan prasarana persampahan</li></ul>	Menurunnya timbunan sampah
--	--	--	---	--	--	----------------------------

Sumber : Hasil FGD Tahun 2019, data diolah



## **BAB VII**

### **PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BUOL**

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut, diupayakan untuk melakukan penajaman di beberapa aspek, yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, pengawasan dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Buol.

Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buol Nomor 188.04/41.07/Bappeda/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buol Tahun 2019.

Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buol yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan itu, diperlukan rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Buol dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mensosialisasikan arah kebijakan serta strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, mendalami prakarsa dan pengalaman dalam melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan monitoring dan evaluasi TKPKD Kabupaten Buol.

#### **7.1. Monitoring dan Evaluasi Sebagai Sebuah Strategi**

Monitoring dan evaluasi menjadi sebuah strategi yang sangat penting agar dalam menilai program penanggulangan kemiskinan di



Kabupaten Buol dapat berjalan dengan obyektif berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat, sehingga menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat pula terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses tentang informasi dan hasil monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol.

Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara aktif sehingga hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan perencanaan awal dari program penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu, maka manfaat yang diharapkan nantinya adalah program tersebut dapat dipergunakan oleh semua pihak dalam upaya memperoleh mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

#### **A. Prosedur Monitoring dan Evaluasi.**

Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus memperhatikan:

##### **1. Pelaku**

Adalah semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkepentingan dalam masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan/program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol adalah pemantau (monitoring) bagi dirinya sendiri dan pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

##### **2. Obyek**

Obyek yang dipantau (monitoring) dan dievaluasi adalah semua kegiatan dari program kebijakan publik, yang terkait dengan usaha penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol. Dalam hal ini pemantauan dilaksanakan sejak awal proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program terkait, yang dilakukan oleh



seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buol, baik yang dilakukan di tingkat kelurahan/desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

### **3. Sarana**

Sarana pemantauan (monitoring) kegiatan/program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri, untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama.

### **4. Metode**

Metode pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, ditentukan oleh pemantau sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing. Misalnya kalangan jurnalistik melaksanakan pemantauan dengan mempergunakan kaidah jurnalistik, kalangan perguruan tinggi mempergunakan metode penelitian akademik, pemerintah menggunakan mekanisme pelaporan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan hendaknya menyajikan data yang senyatanya agar dapat diambil tindakan yang tepat, terarah, dan terpadu.

## **B. Mekanisme Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk dapat memberikan umpan, baik dalam pelaksanaan program apa bila indikator tidak dapat dipenuhi. Hubungan antara bagian situasi kemiskinan dengan bagian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, pada sistem evaluasi adalah apabila pada bagian kebijakan dan program dalam penanggulangan kemiskinan dari hasil evaluasi yang menyatakan indikator telah dipenuhi, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap bagian kondisi kemiskinan, apakah indikator tersebut telah tercapai atau situasi dari kondisi kemiskinan telah menjadi lebih baik, maka perlu dilakukan



peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan dan program penanggulangan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi yang dimengerti pada umumnya adalah kegiatan tahap akhir suatu program/kegiatan untuk menilai apakah sebuah program/kegiatan dinilai berhasil atau gagal. Namun sebenarnya evaluasi dapat dibagi ke dalam tingkatan:

1. Evaluasi pra program/kegiatan;
2. Evaluasi pada saat program/kegiatan berjalan;
3. Evaluasi summatif (akhir); dan
4. Evaluasi dampak.

Dari keempat tingkatan evaluasi tersebut, digunakan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas suatu program. Jadi, evaluasi bukan merupakan kegiatan sekali saja pada saat akhir program/kegiatan. Tetapi, evaluasi lebih sebagai kegiatan berkelanjutan selama program/kegiatan berjalan. Dalam rangka mendorong partisipasi menyeluruh terhadap pihak yang terlibat pada atau bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagai penerima manfaat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka dipilih menggunakan pendekatan partisipatif.

Pelaku evaluasi dapat berupa individu atau tim. Tim evaluasi dapat ditunjuk secara khusus, atau bahkan oleh tim dari masyarakat itu sendiri. Pelaku evaluasi yang lain dapat juga oleh lembaga donor, tim evaluator dari luar, atau kombinasi dari pelaku-pelaku di atas. Berikut ini merupakan masukan tentang siapa yang dapat dilibatkan sebagai pelaku dalam evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buol.



<b>Pelaku</b>	<b>Bagaimana Keterlibatan Mereka</b>
Tim Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bertanggungjawab secara penuh terhadap evaluasi</li> </ul>
Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan masukan dalam tahap penyusunan;</li> <li>➤ Membantu menyusun kerangka evaluasi;</li> <li>➤ Membantu dalam melakukan monitoring aktivitas;</li> <li>➤ Diwawancarai untuk memperoleh masukannya tentang program/kegiatan;</li> <li>➤ Berpartisipasi dalam lokakarya dan pertemuan-pertemuan evaluasi;</li> <li>➤ Diinformasikan tentang kemajuan program/kegiatan Ikut serta merayakan kesuksesan dari upaya mereka.</li> </ul>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diwawancarai untuk memperoleh masukannya tentang program/kegiatan;</li> <li>➤ Diinformasikan tentang kemajuan program/kegiatan;</li> <li>➤ Diundang untuk menghadiri acara evaluasi.</li> </ul>
Komunitas di wilayah program	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diwawancarai untuk memperoleh pandangannya dan apa dampak dari program/kegiatan ke mereka.</li> </ul>
Perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membantu dalam menyusun evaluasi;</li> <li>➤ Membantu dalam melakukan evaluasi;</li> <li>➤ Melakukan wawancara bila dibutuhkan pihak independen untuk melakukannya.</li> </ul>
Pihak yang tidak atau kurang menyukai adanya Program Penanggulangan kemiskinan di	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diwawancarai untuk memperoleh pandangannya, misalnya dengan menggunakan pihak yang independen;</li> <li>➤ Diinformasikan tentang hasil pemantauan dan evaluasi.</li> </ul>
Pemerintah Pusat Dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan dukungan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi;</li> <li>➤ Memberikan masukan tentang berbagai hal yang perlu dipantau dan dievaluasi.</li> </ul>
Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diberikan siaran pers tentang hasil yang telah dicapai dalam program penanggulangan kemiskinan</li> <li>➤ Memberikan kesempatan melakukan pelaporan secara berkala;</li> </ul>
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membantu dalam menyiapkan evaluasi.</li> <li>➤ Datang pada acara-acara evaluasi</li> </ul>



Setelah menemukan siapa saja yang melakukan evaluasi untuk penguatan kelembagaan, maka yang harus dievaluasi adalah:

- a. Apakah tujuan program/kegiatan telah tercapai?
- b. Apakah hasil yang diharapkan telah seimbang dengan segala daya upaya yang dikeluarkan?
- c. Bagaimana program/kegiatan dapat diperbaiki?
- d. Komponen apa saja yang perlu diganti atau diperbaiki?
- e. Apa saja yang telah berjalan dengan baik dan benar, dan apa saja yang salah?
- f. Apa saja dampak langsung dan tidak langsung dari program/kegiatan?

Dengan demikian, beberapa topik yang dapat dievaluasi meliputi: tujuan, kerjasama, kinerja, dampak, kepemimpinan. Beberapa alasan mengapa evaluasi perlu dilakukan adalah:

- a. Untuk memperbaiki fokus dan prosedur dari program/kegiatan selama perjalanannya;
- b. Untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dari orang-orang yang terlibat dalam program/kegiatan;
- c. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan;
- d. Untuk menyediakan informasi bagi perencanaan dari program/kegiatan lainnya;
- e. Untuk menunjukkan manfaat dan upaya yang dilakukan;
- f. Untuk memperoleh alasan dalam pengembangan program/kegiatan secara lebih luas;
- g. Untuk akuntabilitas;
- h. Untuk menyediakan informasi terhadap evaluasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Secara ideal, proses evaluasi dilakukan selama program/kegiatan berlangsung, termasuk dalam hal ini adalah monitoring secara rutin, penilaian (*review*) terhadap perkembangan secara berkala, evaluasi pada jangka menengah (*mid-term*), dan evaluasi pada masa akhir. Namun, dengan berbagai macam alasan, proses evaluasi yang ideal



seringkali sulit untuk diwujudkan. Kadangkala pada masa akhir program/kegiatan kita baru merasa membutuhkan suatu evaluasi.

Di tengah perjalanan, sewaktu kita mengetahui atau setidaknya merasakan adanya perkembangan yang tidak begitu menggembirakan, maka kita melakukan evaluasi. Tetapi kapan pun evaluasi dilakukan, tetap saja merupakan suatu yang berguna, terutama terhadap kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan, disarankan untuk dilakukan secara berkala, yaitu:

1. Setiap bulannya untuk melihat pencapaian keluaran dan masing-masing hasil;
2. Setiap tiga bulan, untuk melihat pencapaian hasil dari masing-masing tujuan, sedangkan evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan, disarankan untuk dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran (Desember/Januari)

### **C. Menyusun Evaluasi**

Ini menjadi tahapan yang terpenting dan tersulit, sehingga yang pertama dilakukan adalah memikirkan secara seksama tentang siapa yang akan dilibatkan dalam tahap penyusunan. Dukungan terhadap suatu evaluasi sangatlah dibutuhkan setiap pihak.

Oleh karena itu, dengan semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan suatu evaluasi, maka dukungan terhadap evaluasi akan semakin banyak dan pada akhirnya, mereka akan lebih tertarik untuk mengetahui hasil dan evaluasi tersebut. Perlu diingat, bahwa keterlibatan bukan berarti harus masuk dalam keanggotaan Tim evaluasi. Melalui serangkaian pertemuan dan diskusi baik formal maupun nonformal, berbagai pihak dapat diajak untuk membantu menyusun beberapa hal yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan lingkup dari suatu evaluasi, seperti:
  - a. Menentukan alasan mengapa mengevaluasi Program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan;
  - b. Menentukan sumber daya apa yang tersedia, dari mulai pembiayaan sampai dengan waktu para pihak yang ingin terlibat;



- c. Pada umumnya, dari dana program/kegiatan disisihkan sebesar 5 persen untuk monitoring dan evaluasi;
  - d. Menentukan siapa yang akan dilibatkan dan melalui mekanisme apa. Siapa pelaku yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh perencanaan penanggulangan kemiskinan;
  - e. Menentukan seberapa besar cakupan dari evaluasi yang akan dilakukan;
  - f. Akan lebih baik bila menyelesaikan suatu evaluasi yang terfokus, dibandingkan dengan memiliki rencana evaluasi yang komplit tetapi tidak pernah dilakukan;
  - g. Menentukan keahlian macam apa yang dibutuhkan dari pihak luar;
  - h. Menggunakan fasilitator yang independen dapat menjadi ide yang baik;
  - i. Menentukan waktu serta batas akhirnya;
  - j. Menentukan siapa yang akan menggunakan hasil evaluasi dan untuk apa;
2. Memperjelas tujuan dan sasaran dari program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, seperti:
- a. Memahami, mengapa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan;
  - b. Memperhatikan, apakah program penanggulangan kemiskinan memiliki tujuan dan sasaran yang layak untuk dievaluasi. Jangan kita sampai terjebak untuk melakukan evaluasi pada suatu program/kegiatan yang kita pun tidak begitu yakin apakah tujuan beserta sasarannya layak;
  - c. Bila dibutuhkan, perjelas tujuan dan sasaran dari Program penanggulangan kemiskinan. Meskipun program penanggulangan kemiskinan telah memiliki tujuan dan



- sasarannya, tetapi akan lebih baik bila tujuan dan sasaran tersebut disesuaikan dengan kondisi lokal;
- d. Identifikasi indikator-indikator dan pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi, seperti menentukan indikator apa yang akan digunakan untuk memantau dan menilai kinerja;
  - e. Indikator Partisipasi:
    - Adanya kontribusi dari pelaku non Pemerintah;
    - Terorganisirnya partisipasi;
    - Memberdayakan masyarakat untuk mandiri dan menentukan solusi atas permasalahannya;
    - Tuliskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan memandu proses evaluasi;
    - Tingkat dan kualitas partisipasi;
    - Biaya dan manfaat dari partisipasi untuk masing-masing pelaku;
    - Dampak dari partisipasi;
    - Keberlanjutan partisipasi;
  - f. Menentukan metode analisis yang sesuai;
  - g. Menentukan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan ke pelaku yang mana;
  - h. Menentukan informasi tambahan apalagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan evaluasi.
3. Merencanakan suatu aktifitas evaluasi, seperti:
- a. Menyusun suatu sistem untuk memantau (memonitor) indikator- indikator secara berkala;
  - b. Menentukan evaluasi apa lagi yang dibutuhkan selama program/kegiatan berlangsung untuk memperoleh dan menganalisis informasi sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi dapat terjawab.

#### **D. Pengumpulan Data**

Data (informasi) yang dikumpulkan adalah indikator ekonomi, sosial, dan budaya yang mencerminkan kondisi masyarakat miskin



dalam pemenuhan hak-hak dasar, dan indikator kinerja kebijakan dan program yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Informasi tersebut berasal dari monitoring dan indikator-indikator yang telah dibuat dan disepakati. Apa yang akan dimonitor sangat ditentukan oleh indikator-indikator yang telah dipilih. Agar lebih efektif, maka dari awal perlu diperjelas:

- a. sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring;
- b. siapa yang akan melakukannya;
- c. bagaimana informasi dikumpulkan;
- d. seberapa sering monitoring dilakukan; dan
- e. siapa yang akan menggunakan informasi tersebut?

Data dari informasi yang diperlukan TKPKD untuk monitoring dan evaluasi antara lain dikumpulkan dari:

1. Hasil laporan rutin dinas/instansi pelaksana kebijakan program;
2. Hasil pendataan oleh kantor Statistik;
3. Hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan pihak lainnya;
4. Hasil pemberitaan media massa; dan
5. Hasil laporan dari kelompok masyarakat

#### **E. Menganalisis Data (Informasi)**

Setelah data-data, baik yang bersifat primer maupun sekunder atas situasi dan kondisi kemiskinan daerah tersebut didapatkan, tahapan selanjutnya adalah melakukan kompilasi data-data tersebut untuk dikaji, dianalisis dengan metode analisis yang telah ditetapkan, dan menghubungkannya dengan kinerja pelaku terkait penanggulangan kemiskinan dari rencana strategis, program, kegiatan, dan penganggaran untuk dinas, dan laporan-laporan sekunder seperti kliping berita media massa dan kertas posisi lembaga swadaya masyarakat.

Kebutuhan melakukan kompilasi data tersebut untuk mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dari situasi kemiskinan



di daerah. Hasil analisis data kemudian akan menjadi rujukan bagi penyusunan indikator kinerja semua pelaku yang terlibat dalam tahapan strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang dikoordinasikan oleh TKPKD.

#### **F. Menyimpulkan dan Pelaporan**

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Konsolidasi laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya masyarakat media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Selanjutnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buol menggabungkan berbagai hasil laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah, menjadi sebuah laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah. Laporan tersebut disertai dengan rekomendasi kebijakan untuk merespon kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, dan dinas/instansi terkait serta didiseminasikan kepada masyarakat luas.

Pelaporan hasil monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan, disusun dalam bentuk populer yang sederhana, menarik dan mudah dipahami serta mudah diakses oleh publik, dan kemudian didiseminasikan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui berbagai media yang ada. Hasil temuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan:

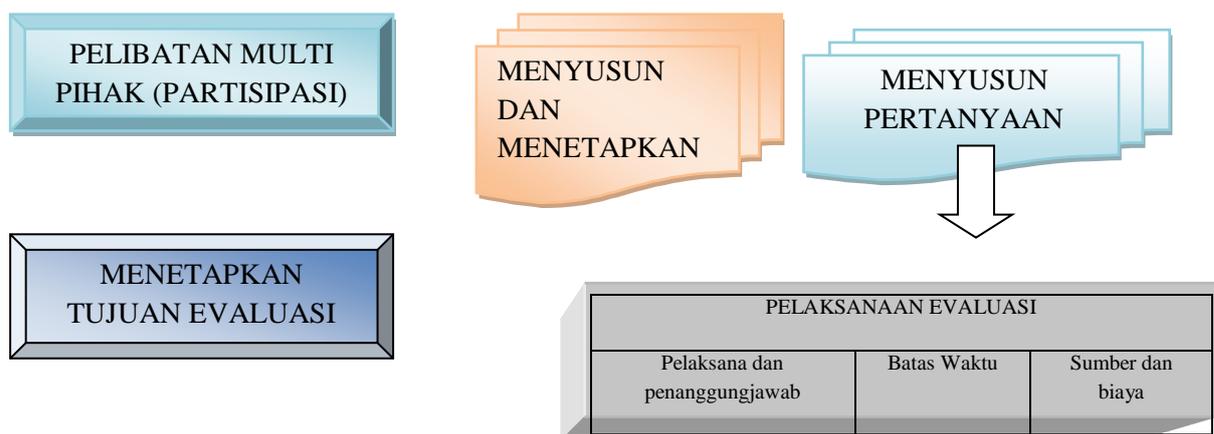
1. Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program;



3. Meningkatkan keterbukaan, dan;
4. Pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program, dan meningkatkan studi kebijakan bagi para akademisi dan peneliti.

Tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dirumuskan dalam pembahasan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pertemuan/dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menanggapi laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Buol dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan untuk meneruskan, menghentikan sementara ataupun membatalkan suatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keputusan yang disusun dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat miskin, administrasi penganggaran dan pertimbangan lain yang mendesak.



**Gambar 7.1.**  
**Proses Penyusunan Evaluasi**

Dengan demikian, tahapan aktivitas monitoring dan evaluasi sebagai pengembangan dari proses monitoring dan evaluasi konvensional yang selama ini dipergunakan sebagai berikut:



## **Langkah Pertama:**

### **Menentukan Aktivitas Monitoring Dan Evaluasi**

Beberapa aktivitas dalam monitoring dan evaluasi partisipatif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisir suatu lokakarya untuk merencanakan evaluasi;
2. Melakukan monitoring secara berkala dan indikator-indikator yang dipilih;
3. Mengambil foto dari aktifitas program/kegiatan;
4. Melakukan pertemuan secara berkala untuk menilai perkembangan dari program/kegiatan;
5. Melakukan survey ke para pengguna program/kegiatan;
6. Melakukan survei, wawancara, diskusi kelompok terfokus dengan mereka yang terlibat atau terkena dampak dari program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
7. Menunjukkan hasil dari pemantauan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ke publik.

Untuk memonitor dan bahkan mengevaluasi beberapa hal pada strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, akan lebih baik juga melibatkan komunitas di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan. Kalau ini disepakati, maka:

1. Memperjelas apa yang akan dipantau dan mengapa;
2. Melakukan sesederhana mungkin;
3. Menjadikan proses tersebut cepat dan mudah;
4. Menyediakan masukan secara berkala kekomunitas tentang hasilnya;
5. Menyebarkan hasil monitoring di tempat-tempat publik.

Bila lokakarya dan pertemuan merupakan salah satu aktivitas evaluasi partisipatif, maka sangat penting untuk memperhatikan beberapa langkah persiapan berikut ini:

1. Memperjelas tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari lokakarya untuk peserta, pengelola program/kegiatan, tim evaluasi, dan masyarakat luas;



2. Merencanakan dengan matang dengan berbagai macam skenario serta urutan aktifitasnya;
3. Memiliki ketentuan yang jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang fokus untuk setiap sesi. Akan lebih baik, bila hal-hal ini tertulis untuk dapat dijadikan panduan bagi fasilitator;
4. Melakukan dengan sesederhana mungkin;
5. Menggunakan waktu dengan arif, jangan terlalu ambisius dalam menentukan apa yang harus dicapai;
6. Menghindari fasilitasi yang menyebabkan peserta merasa dimanipulasi terhadap hasil yang mereka belum sepakatinnya;
7. Menggunakan aktifitas untuk menciptakan suasana yang cair sesama peserta;
8. Semaksimal mungkin, menempelkan seluruh materi dan hasilnya di tempat yang dapat dilihat peserta dan fasilitator agar tidak terjadi pengulangan dan kebingungan;
9. Meminta bantuan kepada panitia untuk menuliskan hasil-hasil diskusi kelompok (bila ada) bukan peserta yang menjadi notulen;
10. Melakukan secara bergantian antara diskusi kelompok dengan pleno, tetapi jangan terlalu berlebihan;
11. Frustrasi dan konflik adalah suatu hal yang wajar dalam suatu lokakarya. Ketahui bagaimana mengelolanya dan jangan terlalu khawatir;
12. Jangan terlalu khawatir bahwa lokakarya tidak mencapai sesempurna yang diharapkan. Orang senang untuk berbicara bersama dan menyampaikan ide-ide mereka; dan bila mereka memiliki kesempatan ini, maka kemungkinan besar lokakarya tersebut berhasil;

Dan agar lokakarya tersebut dapat menjadi lebih efektif, produktif, dan bermanfaat, hendaknya:

- Menjelaskan tujuan, lingkup, serta hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya tersebut;
- Mintalah kepada para peserta untuk saling memperkenalkan diri, dan bila dibutuhkan lakukan “icebraket” untuk mencairkan suasana;



- Menjelaskan agenda dan proses dari lokakarya tersebut, serta peran dari fasilitator;
- Mintalah kepada para peserta untuk mengutarakan apa yang mereka ingin capai dari lokakarya ini. Misalnya gunakan pertanyaan: apa yang akan menjadikan lokakarya ini bermanfaat bagi anda? Bila dibutuhkan dan layak, sempurnakan agenda sesuai dengan kebutuhan peserta;
- Menjelaskan hasil dan lokakarya dan sepakati langkah tindak lanjutnya;
- Bila diperlukan, mintalah peserta untuk menuliskan evaluasi mereka terhadap lokakarya yang baru mereka ikuti;
- Tutuplah lokakarya dengan meminta peserta untuk mengatakan manfaat apa yang telah mereka peroleh dari lokakarya tersebut;
- Mendokumentasikan lokakarya dan sediakan laporan tertulis untuk dibagikan kepada para peserta dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**Langkah kedua:**

**Membuat Daftar Aktivitas Untuk Monitoring Dan Evaluasi Partisipatif Partisipasi:**

1. Mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi partisipatif;
2. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku;
3. Mengintegrasikan keterlibatan pengelola program/kegiatan dan para pelaku dalam proses monitoring dan evaluasi partisipatif;
4. Kelompok-kelompok tersebut bukan hanya dikonsultasikan, tetapi memiliki peran yang penting dalam setiap tahap monitoring dan evaluasi partisipatif;

**Menentukan:**

1. Mengapa kita melakukan evaluasi?
2. Untuk siapa kita lakukan evaluasi?
3. Apa yang perlu dinilai?
4. Bagaimana mengelolanya?



5. Kapan harus selesai?
6. Sumberdaya apa yang dibutuhkan?
7. Untuk apa dan bagaimana hasil digunakan?

**Menyusun:**

1. Lingkup serta fokus dari evaluasi;
2. Metode dan alat yang akan digunakan;
3. Ukuran serta indikator yang akan digunakan;
4. Metode untuk mengumpulkan, menyebarluaskan, dan melaporkan hasil-hasil temuan.

**Aksi:**

1. Informasi kualitatif dan kuantitatif apa saja yang akan dikumpulkan?
2. Bagaimana data akan dikumpulkan?
3. Bagaimana data akan dianalisis dan dirumuskan?
4. Bagaimana data akan dikonfirmasi dan disepakati?
5. Bagaimana format dan laporan akhir serta pemaparannya?

**Menggunakan Hasil:**

1. Menyetujui rekomendasi yang diusulkan;
2. Memperbaiki rekomendasi bila ada masukan;
3. Menindaklanjuti dan mengawal rekomendasi;
4. Menggunakan berbagai masukan untuk memperbaiki evaluasi dimasa mendatang



**Gambar 7.2.**  
**Mekanisme dan Prosedur Monitoring dan evaluasi Penanggulangan kemiskinan**



Sistem evaluasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat penting sebagai masukan bagi penyusunan rencana dan anggaran. Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran diperlukan agar masalah penanggulangan kemiskinan mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Oleh sebab itu, siklus monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus menyesuaikan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hasil sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan harus selesai sebelum proses perencanaan dan penganggaran dimulai. Hal ini diperlukan agar terjadi optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil monitoring dan evaluasi dalam proses penanggulangan kemiskinan.

Upaya yang perlu ditempuh untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi secara reguler dan terpilah dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
3. Mengembangkan standarisasi tentang indikator, variabel dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
4. Memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data, informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
5. Melakukan survei secara reguler tentang tingkat kepuasan penerima layanan;
6. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan yang diperoleh dan kegiatan monitoring.



## 7.2. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten Buol

Tatanan kelembagaan Monitoring dan Evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan di pusat, di mana TKPKD menjadi Penanggung jawab utamanya.

TKPKD memfasilitasi Forum Konsultasi Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang merupakan institusi tertinggi untuk pengkajian dan pengambilan kebijakan atas hasil-hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara internal oleh lembaga pemerintah maupun secara independen oleh lembaga non pemerintah di daerah.

Forum Monev Daerah adalah sebuah forum lintas pelaku yang unsur-unsurnya melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah. Sedangkan untuk melakukan kegiatan teknis operasional konsolidasi hasil-hasil monev di daerah, TKPKD membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Pokja Monev Daerah). Pokja monev Daerah dikoordinasi oleh lembaga dengan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah, didukung oleh kantor statistik dan lembaga lain sesuai kebutuhan daerah. Hasil konsolidasi monev oleh Pokja Monev Daerah disampaikan kepada Forum Monev Daerah.

Seperti yang telah diatur dalam pedoman penyusunan dokumen SPKD tentang intensitas jumlah pertemuan dalam setahun yang difasilitasi oleh TKPKD, kemungkinan untuk membuka kesempatan bagi upaya pengawasan pelaksanaan SPKD tentu saja dapat berjalan secara simultan dengan capaian-capaian hasil dari program dan kegiatan SPKD. Inisiatif para pihak (*stakeholder*) selain tim koordinasi SPKD sebagai pelaku program/kegiatan menjadi kata kunci bagi semakin komprehensifnya pelaksanaan program/kegiatan SPKD itu sendiri. Unsur partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) tentu akan jauh lebih diharapkan berperan dalam kelembagaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan.



## BAB VIII KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN

### 8.1. Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD

Arah kebijakan yang tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2017-2022 Kabupaten Buol memiliki keterkaitan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol. Keterkaitan ini dimulai pada Tahun 2018 hingga pada Tahun 2022 sebagaimana pada uraian arah kebijakan pada Tabel 8.1 berikut.

**Tabel 8.1**  
**Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kemiskinan**

Arah Kebijakan				
Tahun ke 1 (2018)	Tahun ke 2 (2019)	Tahun ke 3 (2020)	Tahun ke 4 (2021)	Tahun ke 5 (2022)
Pemanfaatan Kualitas Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Ditunjang Pemantapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Keterkaitan Desa – Kota dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Penetapan Pengembangan Wilayah Daerah	Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kabupaten Pintar untuk Pemantapan Perekonomian Masyarakat dan Daerah Kabupaten Buol	Pemantapan Upaya Pencapaian Pembangunan untuk Kemandirian dan Kedaulatan Masyarakat Kabupaten Buol
Relevansi Kebijakan terhadap Penanggulangan Kemiskinan				
Kondisi Terkini (t)*	Ekspektasi (t+1)	Ekspektasi (t+2)	Ekspektasi (t+3)	Ekspektasi (t+4)
Meningkatnya pemanfaatan lahan dan	Munculnya sentra-sentra produksi,	Meningkatnya efektivitas konservasi	Meningkatnya pemanfaatan cakupan	Akumulasi yang berkesinambungan dari upaya



<p>produktivitas khususnya di sektor pertanian (tanaman jagung) melalui program P3T, dan perikanan tangkap. Penurunan angka kemiskinan secara sangat signifikan terjadi di Kecamatan Palele dan Palele Barat (2 kecamatan yang sangat berhasil dalam peningkatan produksi dan produktivitas jagung).</p>	<p>khususnya produksi tanaman pangan, di perdesaan yang dihubungkan dengan kota sebagai pusat perdagangan dengan moda transportasi yang semakin lancar dan ekonomis karena meningkatnya skala produksi dan usaha baik di perdesaan maupun perkotaan. Karena perdesaan Buol merupakan lokasi sebagian besar keluarga miskin maka hal ini selain strategis terhadap penurunan angka kemiskinan, juga merupakan basis bagi Pengembangan Wilayah Daerah.</p>	<p>hutan, lahan, dan air yang menyertai semakin beragam dan terintegrasinya unit usaha pertanian, peternakan, dan perikanan, dan semakin meluasnya penggunaan pupuk organik, meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, merupakan strategi dalam pemantapan upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.</p>	<p>teknologi informatika merupakan strategi bukan saja dalam rangka peningkatan pelayanan public tapi juga untuk pemantapan perekonomian masyarakat, yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dan masyarakat dan daerah Kabupaten Buol pada umumnya.</p>	<p>pemanfaatan lahan, teknologi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat, pelayanan public merupakan strategi dalam upaya pencapaian pembangunan untuk kemandirian dan kedaulatan masyarakat Kabupaten Buol, sehingga dapat mewujudkan tingkat kemiskinan pada kisaran satu digit, kurang dari 10 (sepuluh) persen di tahun 2022.</p>
--	--	---	---	--

**Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Buol Periode 2018-2022; serta Berbagai Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Buol Periode 2018-2022; dan Hasil Fokus Grup Diskusi (FGD) terkait Isu Kemiskinan di Kabupaten Buol 2018-2019, (Data Diolah Kembali).**

## 8.2. Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Renstra

Kaji ulang dan integrasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam renstra diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tujuan, kebijakan maupun arah kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang melekat pada masing-masing



Perangkat Daerah di Kabupaten Buol yang terhimpun dalam urusan wajib, pilihan maupun penunjang. Wujud dari komitmen setiap Perangkat Daerah dalam pengentasan kemiskinan harus termaktub dalam Renstra Perangkat Daerah yang secara tegas memiliki tujuan, kebijakan maupun arah kebijakan yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buol.

**Tabel 8.2**  
**Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Renstra**

Aspek Urusan	Dinas/Badan	Tujuan	Arah Kebijakan
1.	2	3	4
Pendidikan (Wajib Layanan Dasar)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia dini yang bermutu;</li> <li>b. Tercapainya peningkatan dan Perluasan untuk Memperoleh Pendidikan Dasar yang Bermutu;</li> <li>c. Tercapainya peningkatan layanan satuan Pendidikan Nonformal yang bermutu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK bermutu;</li> <li>b. penyediaan akses dan pengembangan PAUD untuk mempersiapkan karakter anak sebagai pembekalan pada tahap jenjang selanjutnya;</li> <li>c. Meningkatkan Akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</li> </ul>
Kesehatan (Wajib Layanan Dasar)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol	Terwujudnya kualitas dan akses, pelayanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular;</li> <li>b. Peningkatan sistem perencanaan kebutuhan obat dan vaksin;</li> <li>c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyedia air minum, tempat pengolahan makanan dan tempat-tempat umum;</li> <li>d. Peningkatan kesadaran pelayanan ibu hamil dan bayi yang bermuara pada produsen kesehatan(rumah tangga) secara berjenjang;</li> <li>e. Peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan;</li> <li>f. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan ibu hamil dan bayi di Puskesmas dan jaringannya;</li> <li>g. Peningkatan metode pelayanan dengan pendekatan keluarga/rumah tangga sebagai basis penanganan masalah kesehatan.</li> </ul>



	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol	Mewujudkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit yang terstandarisasi dengan klasifikasi yang inovasi pelayanan unggulan	a. Pembangunan dan pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; b. Pelayanan kesehatan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin.
	Rumah Sakit Pratama Kabupaten Buol	-	-
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Wajib Layanan Dasar)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Meningkatnya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada b. Meningkatnya Jaringan dan Ruas jalan dan Jembatan yang menghubungkan Pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota dan jalan yang memudahkan c. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.	a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat; b. Peningkatan sektor ekonomi dengan adanya pembangunan di bidang jalan dan jemabatan untuk mobilitas ekonomi Masyarakat; c. Mengurangi angka kemiskinan dengan program hiba sanitasi air bersih.air minum.
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Meningkatnya status Rumah Tinggal menjadi Layak Huni pada 500 Keluarga Miskin. b. Berubahnya Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Kawasan Permukiman Bersih dalam Kota Buol.	a. Meningkatkan kualitas Rumah Tinggal Keluarga Miskin. b. Meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman.-
Sosial (Wajib Layanan Dasar)	Dinas Sosial Kabupaten Buol	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	a. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; c. Meningkatkan peran kelembagaan sosial; d. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
Tenaga Kerja (Wajib Non Layanan Dasar)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol	Meningkatkan Tenaga Kerja Profesional	a. Penyelenggaraan Penataan Persebaran Penduduk; b. Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal yang ditetapkan dalam Peraturan



			<p>Pemerintah Daerah; c. Perumusan Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Daerah Tertinggal.</p>
Pangan (Wajib Layanan Dasar)	<p>a. Dinas Pertanian dan Peternakan. b. Dinas Perikanan</p>	<p>Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan</p>	<p>a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah; b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Peningkatan Produksi Tanaman Komoditas Perkebunan; d. Mewujudkan Swasembada Daging Sapi; e. Peningkatan produksi perikanan.</p>
Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan (Wajib Non Layanan Dasar)	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol</p>	<p>a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi perdesaan b. Mewujudkan kompetensi lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa; b. Pengembangan lembaga ekonomi dan potensi desa.</p>
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Wajib Non Layanan Dasar)	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol</p>	<p>a. Terwujudnya kualitas dan akses, pelayanan kesehatan masyarakat b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga</p>	<p>a. Peningkatan kesadaran pelayanan ibu hamil dan bayi yang bermuara pada produsen kesehatan (rumah tangga) secara berjenjang; b. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan ibu hamil dan bayi di Puskesmas dan jaringannya; c. Peningkatan metode pelayanan dengan pendekatan keluarga/ rumah tangga sebagai basis penanganan masalah kesehatan; d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyedia air minum, tempat pengolahan makanan dan tempat-tempat umum; e. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional mandiri.</p>
Perhubungan (Wajib Non Layanan Dasar)	<p>Dinas Perhubungan Kabupaten Buol</p>	<p>a. Meningkatnya kelancaran mobilitas angkutan orang dan barang. b. Terhubungkannya kantong-kantong produksi dan kawasan terisolir oleh moda transportasi umum.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan; b. Pembangunan jalan ke kantong-kantong produksi dan kawasan terpencil.</p>
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Wajib Non Layanan Dasar)	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol</p>	<p>a. Meningkatnya peran koperasi dalam fasilitasi pengembangan UMKM terutama di perdesaan. b. Berkembangnya industri kecil baik di perkotaan maupun di perdesaan, terutama input pertanian dan pengolahan pasca panen.</p>	<p>a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi; b. Meningkatkan kapasitas usaha UMKM Perdagangan dan Industri Kecil; c. Membangun dan mengembangkan <i>value change</i> antar sub sector di sector pertanian.</p>
Pariwisata (Pilihan)	<p>Dinas Pariwisata Kabupaten Buol</p>	<p>a. Terbangunnya destinasi wisata berbasis masyarakat.</p>	<p>a. Pembangunan destinasi wisata berbasis masyarakat.</p>



Pertanian (Pilihan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol	<p>a. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan</p>	<p>b. Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah; c. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; d. Peningkatan Produksi Tanaman Komoditas Perkebunan; e. Mewujudkan Swasembada Daging Sapi.</p>
Perdagangan (Pilihan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol	<p>a. Mengembangkan Struktur Ekonomi yang Tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif Berbasis Kewilayahan dan Ekonomi Kerakyatan</p>	<p>a. Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor; b. Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan BPR/LKM dan Bank Penyedia KUR; c. Memperkuat Kelembagaan melalui pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian yang baik terhadap SDM pengelola Koperasi dan usaha koperasi.</p>
Perindustrian (Pilihan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol	-	<p>a. Penyediaan lokasi pengembangan kawasan industri strategis yang berbasis pertanian; b. Penyediaan lokasi Pengembangan sentra dan klaster industri olahan dan kreatif berbasis pertanian; c. Menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka pengembangan modal ventura dan inkubator serta penguatan kemampuan industri berbasis teknologi; d. Menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka pengembangan modal ventura dan inkubator serta penguatan kemampuan industri berbasis teknologi; e. Menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka pengembangan modal ventura dan inkubator serta penguatan kemampuan industri berbasis teknologi; f. Peningkatan kemampuan teknologi industri, penguatan SDM, perluasan pasar, peningkatan nilai tambah produk, serta fasilitasi standarisasi dan HKI; g. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta pembatasan pasar modern; h. pengembangan kelompok pedagang usaha informal diarahkan untuk memberikan Kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok</p>



			pedagang eceran kecil;
Transmigrasi (Pilihan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol	Meningkatkan Transmigrasi yang Maju dan Mandiri	a. Pembangunan Pemukiman Transmigrasi; b. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi; c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

**Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Buol Periode 2018-2022; serta Berbagai Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Buol Periode 2018-2022 (Data Diolah Kembali).**

Penanggulangan kemiskinan harus dapat dideteksi terkait dengan pendekatan dalam menanggulangnya yang melekat pada pembagian urusan yang memiliki relevansi dengan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi Kabupaten Buol, penanggulangan kemiskinan lebih dominan berada pada urusan Wajib baik layanan dasar dan non layanan dasar, sedangkan urusan pilihan menjadi pendukung bagi tercapainya target-target penanggulangan kemiskinan.

Urusan wajib layanan dasar sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan Urusan: Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; dan Sosial. Sedangkan urusan Wajib non layanan dasar: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Urusan Pilihan terkait dengan: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

### **8.3. Kaji Ulang Integrasi Kebijakan Penanggulangan Intergrasi dalam RKPD**

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan yang mempertimbangkan penanggulangan kemiskinan yang melekat pada uraian setiap urusan:

#### **1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Kurangnya jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) terutama TK pembina di tiap Kecamatan (kekurangan 8 Sekolah);



2. Meningkatnya APK dan APM SD/MI menyebabkan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) bertambah;
3. Meningkatnya APK dan APM SMP/MTS menyebabkan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) bertambah;
4. Sarana dan prasarana Pendidikan pada umumnya masih terbatas terutama ruang kelas masih banyak dalam kondisi rusak, terbatasnya ruang Guru, ruang Kepala Sekolah, MCK dan ruang UKS;
5. Menurunnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;
6. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah;
7. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal.

## **2) Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Tingginya Kematian Ibu, (MMR thn 2018: 123/100.000 KH, 3255 KH, Kasus), (IMR : 18/1.000 KH, 61 kasus), tahun ini sudah ada 2 kasus kematian ibu (post operasi);
2. Tingginya angka Stunting (41,3 %) thn 2017 - Pemantauan Status Gizi (PSG), per Januari 2019 angka Stunting Kab. Buol 26,65 (tenaga pelaksana gizi semua Puskesmas);
3. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular;
4. Masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk alat kesehatan yang belum memadai;
6. Belum terdistribusinya secara baik sumber daya kesehatan;
7. Rendahnya kompetensi dan kuantitas SDM;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).



### 3) Urusan Sosial

1. Angka Kemiskinan masih cukup tinggi yang disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin;
2. Jangkauan Mutu dan Akses Pelayanan Sosial Dasar masih kurang yang disebabkan oleh terbatasnya dukungan anggaran untuk Pelayanan Sosial;
3. Sistem Jaminan Sosial Masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk yang disebabkan kurangnya dukungan anggaran untuk Pelayanan Masyarakat Miskin;
4. Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam memberdayakan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat belum efektif yang disebabkan oleh kurangnya Sinergitas Lintas Sektor;
5. Pemberdayaan PMKS belum optimal yang disebabkan terbatasnya daya dukung dan Peningkatan Keterampilan PMKS;
6. Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma, Penduduk Lanjut Usia dan Penduduk Rawan Sosial Lainnya, dalam rangka mendorong kemandirian serta memberikan Peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan yang disebabkan terbatasnya Penyediaan Aksesibilitas Pelayanan PMKS.

### 4) Urusan Tenaga Kerja

1. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat pengangguran masih cukup tinggi;
2. Rendahnya tingkat kompetensi pencari kerja sehingga kurang terserap dan ditempatkannya pencari kerja pada lingkungan pekerjaan;
3. Kurang diminatinya pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan;
4. Sarana dan prasarana pendukung penigkstsnn kesempstsnn kerja terutama Balai Latihan Kerja (BLK) belum terbangun;



5. Kurangnya jejaringan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi ;
6. Keterlambatan penyediaan perencanaan lahan dan pembangunan permukiman transmigrasi ;
7. Adanya tumpang tindih lahan;
8. Belum optimalnya bimbingan dan penyuluhan bagi transmigrasi;
9. Sarana dan prasarana pendukung transmigrasi.

#### **5) Urusan Transmigrasi**

1. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai;
2. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi;
3. Adanya tumpang tindih lahan.
4. Belum optimalnya bimbingan dan penyuluhan bagi transmigran;
5. Sarana dan prasarana pendukung transmigrasi belum memadai.

#### **6) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Fungsi penunjang kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur masih perlu ditambah baik anggarannya maupun sumber daya aparturnya;
2. Masih adanya keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran yang sangat mempengaruhi realisasi pada TEPR bulan berjalan;
3. Masih rendahnya anggaran khususnya pada bidang infrastruktur sehingga program/kegiatan untuk memenuhi aspirasi masyarakat baik hasil musrenbang maupun aspirasi DPRD tidak dapat diakomodir keseluruhan yang bersifat prioritas;

#### **7) Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**

1. belum dilaksanakan Pendataan dan data yang kami Butuhkan dari Berbagai desa Desa Belum Juga kami terimah sampai pada saat Waktu yang di tentukan, Karena, tidak Bisa bekerja secara efektif, Tidak Tersedianya Tenaga Teknik, alat penunjang untuk bekerja sangat terbatas, yakni Berupa Leptop, Drone, kamera Digital, serta tidak adanya Tenaga Art Gis, sehingga data Base Tdak Ada



### **8) Usan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal;
2. Belum tersedianya tenaga konseling (psikologi) dalam penanganan korban khusus anak;
3. Belum tersedianya sarana rehabilitasi sosial bagi anak korban/pelaku anak yang berhadapan hukum;
4. Belum optimalnya kerjasama lembaga/instansi layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak;
5. Masih kurangnya advokasi pengarusutamaan gender di berbagai aspek dalam mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

### **9) Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

1. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan;
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
3. Masih kurangnya aparatur/pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat pada umumnya.

### **10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

### **11) Urusan Perhubungan**

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan

### **12) Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1. Belum tersedianya Penataan tempat yang layak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Tempat Wisata di Negeri Lama (Nelam) Terutama Gerobak UKM, Warung UKM dan Payung untuk



digunakan pada pengembangan Ekonomo Kreatif Bagi Masyarakat di Lokasi Wisata.

2. Terkait dengan Bidang Ekonomi Kreatif Masih kurangnya Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Sehingga Kemampuan Dalam Menerjemah Pekerjaan Belum Memadai dan Hampir Tidak Berhasil oleh Karenanya di harapkan SDM yang Menempati agar dapat diberikan pembelajaran ke luar daerah yang lebih baik
3. Masih Rendahnya Pemahaman masyarakat terkait dengan Bidang Ekonomi Kreatif sehingga sangat mempengaruhi berbagai Aspek Ekonomi, dan tidak terlaksananya Program di berbagai Seksi pada Seluruh Bidang Ekraf.

### **13) Urusan Kelautan dan Perikanan**

1. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;
2. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik, perseorangan dan perusahaan;
3. Tata letak (layout) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;
4. Pola tanam tidak teratur dan sepenuhnya mengandalkan alam;
5. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;
6. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;
7. Tekhnologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;
8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal;
9. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;



10. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;
11. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;
12. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di Kabupaten Buol;
13. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.

#### **14) Urusan Pertanian**

1. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok sejalan dengan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun, untuk itu perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna;
2. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani, untuk itu diharapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi;
3. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal;
4. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik;
5. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim;



6. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani;
7. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;
8. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;
9. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;
10. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi;
11. Tata niaga ternak masih belum optimal;
12. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin.
13. Cakupan bina kelompok petani masih rendah.

#### **15) Urusan Pangan**

1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk ;
2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain;
3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial;
4. Keandalan sistem irigasi semakin menurun;
5. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi;
6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan *upstream* (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;